

CARA PANDANG

Inspirasi Terkini!

Edisi Agustus 2026

**DARURAT KORUPSI
DI DAERAH, KPK
PANEN OTT
SEPANJANG 2026**

**PENGARUH
JOKOWI MEREDUP,
AMANKAH POSISI
GIBRAN DAN PSI?**

**FAJAR BARU
PENDIDIKAN
NASIONAL:
MENINGTEGRASIKAN
HARAPAN, MENJEMPUT
INDONESIA EMAS**



INDONESIA 2026: REFORMASI, KORUPSI, DAN HARAPAN

Periode 1 Juni - 31 Desember 2025

Pindah Payroll ke BNI Dapatkan Berbagai Benefit

Reward Cashback hingga
Rp500 Ribu

Special Rate
Fasilitas Pinjaman

Bonus hingga
100 Kupon Undian
rejeki **wondr** BNI

Cash Reward **1%**
untuk Perusahaan



Dapatkan
kesempatan mengikuti
rejeki **wondr** BNI

Informasi Selengkapnya
bni.id/payroll

DAFTAR ISI

TAJUK 5

**MENAGIH INTEGRITAS
POLITIK DAN SUPREMASI
HUKUM DI INDONESIA**

HUT KE-81 RI

**HUT KE-81 REPUBLIK
INDONESIA: PUSAKA,
PROKLAMASI,
KEBERSAMAAN** 12

HUKUM

**MANDEK DI TENGAH
DARURAT KORUPSI: RUU
PERAMPASAN ASET DAN
GUGATAN PUBLIK DI ERA
PRABOWO** 16

**KASUS FEBRIE
ADRIANSYAH DAN UJIAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA** 20

**DARURAT KORUPSI DI
DAERAH, KPK PANEN OTT
SEPANJANG 2026** 28

POLITIK

**PENGARUH JOKOWI
MEREDUP, AMANKAH
POSISI GIBRAN DAN
PSI?** 36

INTERNASIONAL

**PRODUKSI MINYAK
NAIK DI TENGAH
KETIDAKPASTIAN GLOBAL** 44

**REKOR YANG
MENGGUNCANG:
SUHU EKSTREM DAN
PERINGATAN GLOBA** 48

OLAHRAGA

**SAHAM PIALA DUNIA:
KETIKA AMBISI FIFA
MENGUJI BATAS SEPAK
BOLA DUNIA** 50



HUT KE-81 RI

MENELAAH PIDATO KENEGARAAN PRABOWO SUBIANTO 2026

6

Di ruang sidang utama Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, suasana sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPRDPD berubah menjadi momen penegasan arah kebijakan yang tegas dan berani.

EDUKASI

FAJAR BARU 54
**PENDIDIKAN NASIONAL:
MENINTEGRASIKAN
HARAPAN, MENJEMPUT
INDONESIA EMAS**

MENATA INFRASTRUKTUR, 60
**MENGANGKAT MUTU
PENDIDIKAN**

MENATA KEPASTIAN 64
**MASA DEPAN GURU:
BABAK BARU KARIER
PPPK MENUJU 2027**

SDN SEPI PEMINAT, SINYAL 68
**PEMERATAAN KUALITAS
PENDIDIKAN TERUS
DIPERKUAT**

KEDAULATAN RUANG 80
**KELAS: MEMULIAKAN
MURID SEBAGAI FONDASI
KEBIJAKAN PEMBELAJARAN
MENDALAM**

OPINI

JOKOWI BUKAN 74
**ANCAMAN BAGI PDI-
PERJUANGAN**

FILM

MENYELAMI JIWA SPIDER- 78
MAN: BRAND NEW DAY

BUKU

MENJADI GURU: PILIHAN 79
ATAU TAKDIR?

ADVERTORIAL

LANGKAH NYATA GURU 85
**SD DI SEPAKU, PENAJAM
PASER UTARA
KUATKAN FONDASI
LITERASI DAN NUMERASI
PENUH EMPATI**

Korupsi Daerah Sudah di Ambang Batas Kritis

“Maraknya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa sistem pengawasan anggaran di tingkat daerah sedang tidak baik-baik saja. Modus operandi para pejabat lokal kini semakin lihai, mulai dari pengadaan barang fiktif hingga pemotongan dana insentif daerah.

Jika lembaga penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera memperketat supervisi langsung ke daerah-daerah rawan, anggaran pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil hanya akan mengalir ke kantong segelintir elite korup. Negara harus bertindak tegas tanpa pandang bulu demi menyelamatkan masa depan otonomi daerah.”

Rahmat Hidayat

Warga Kota Malang, Jawa Timur

Transparansi Pengusutan Kasus Penkum dan Integrasi Hukum

“Publik saat ini tengah menyoroti berbagai dinamika hukum yang melibatkan pejabat penegak hukum senior, termasuk dinamika yang mengaitkan nama Jampidsus Febrie Andriansyah. Kasus-kasus yang melibatkan institusi strategis kejaksaan selalu menjadi ujian besar bagi komitmen penegakan hukum di Indonesia.

Transparansi mutlak diperlukan agar tidak ada spekulasi liar di tengah masyarakat. Kejaksaan Agung dan lembaga pengawas terkait harus membuktikan bahwa proses penyelidikan maupun pemeriksaan internal berjalan objektif, independen, dan steril dari intervensi politik kekuasaan manapun.”

Siska Maharani

Praktisi Hukum, Bandung, Jawa Barat

Urgensi Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembahasan RUU Pemilu

“Wacana revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghangat di ruang publik seiring dinamika politik nasional pasca-pemilu serentak. Sayangnya, pembahasan regulasi penting ini kerap terkesan terburu-buru dan minim pelibatan masyarakat sipil secara substantif.

Aturan main pemilu seharusnya dirancang untuk memperkuat kualitas demokrasi, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan partai politik parlemen. DPR dan pemerintah wajib membuka ruang dengar pendapat seluas-luasnya bagi akademisi, pegiat pemilu, dan masyarakat luas agar produk undang-undang yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kedaulatan rakyat.”

Dimas Prasetyo

Pegiat Demokrasi, Yogyakarta

Evaluasi Konsep Sekolah Nasional Terintegrasi untuk Pemerataan Mutu Pengirim:

“Gagasan penerapan Sekolah Nasional Terintegrasi yang digaungkan pemerintah bertujuan untuk menghapus kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Namun, implementasinya di lapangan menemui banyak tantangan mendasar, mulai dari kesiapan infrastruktur digital, distribusi tenaga pendidik yang merata, hingga aksesibilitas transportasi bagi siswa.

Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya tidak terburu-buru memperluas program ini sebelum evaluasi menyeluruh terhadap pilot project dilakukan. Jangan sampai konsep yang baik di atas kertas ini justru membebani sekolah-sekolah di daerah yang fasilitas dasarnya saja masih belum memadai.”

Dian Puspitasari

Guru Sekolah Menengah, Surakarta, Jawa Tengah



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Faozan Amar, S.Ag, M.M., Jalu Dwi Putranto S.IP

Pemimpin Umum: Zulfikar Rachman **Ombudsman:** Mahmud Marhaba (Ahli Pers Dewan Pers) **Direktur:** Michael Malik

Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab: Habibi **Wakil Pimred:** Amir Fiqi, Mujamin Jassin **Koordinator Daerah:** Nafik Muthohirin (Jawa Timur), Wiwin Alfianti (Riau), Hamid Toliu (Gorontalo), Linda Sari (Sumatera Barat) **Redaktur Pelaksana:** Amir Fiqi, Edo Soeryadi **Redaktur:** Rais Syauqi, Jirga R. Azka, Amira Izzati, Wiwin Alfianti, Zoel Rachman, Haedar Zafran **IT Support:** Zulfikar Iskandar, Dede Hidayatullah **Kreatif:** Robby Firmansyah, Hengki **Media Sosial:** Obie **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayah

Alamat Redaksi Pusat

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp: (021) 82760392 dan (021) 21383521
Email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

MENAGIH INTEGRITAS POLITIK DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA



Tahun 2026 menjadi potret buram perjalanan demokrasi Indonesia. Di satu sisi, rakyat baru saja melewati pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 dengan harapan lahirnya pemimpin daerah yang berintegritas. Namun, di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru panen operasi tangkap tangan: 11 kepala daerah terjerat kasus suap, gratifikasi, hingga jual beli jabatan. Fenomena ini menegaskan bahwa biaya politik yang mahal masih menjadi akar korupsi, sementara partai politik gagal menjalankan fungsi kaderisasi.

Di tingkat nasional, dinamika politik semakin memperlihatkan rapuhnya fondasi kepercayaan. Safari politik Jokowi untuk mendongkrak PSI justru menuai penolakan di berbagai daerah. Popularitas yang dulu menjadi kekuatan kini meredup, sementara posisi Gibran sebagai wakil presiden mulai dipertanyakan. Ambisi PSI menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” pun dinilai tidak realistis, karena basis ideologis

PDI Perjuangan masih terlalu kuat untuk digeser.

Kasus korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah semakin memperburuk citra penegakan hukum. Kejanggalan demi kejanggalan dalam proses hukum memperlihatkan betapa lemahnya supremasi hukum di negeri ini. Publik pun menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan sebagai senjata pamungkas untuk memiskinkan koruptor. Namun, tarik-ulur kepentingan elite membuat regulasi vital ini terus mandek. Begitu pula RUU Pemilu, yang seharusnya menjadi instrumen reformasi untuk menekan biaya politik, justru berpotensi menjadi arena negosiasi kepentingan partai besar.

Semua fenomena ini berpangkal pada satu hal: krisis kepercayaan publik terhadap integritas politik, pendidikan, dan hukum. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar retorika. Selama partai politik masih pragmatis, selama biaya politik tetap selangit, dan selama hukum bisa dipertanyakan, maka demokrasi Indonesia akan terus dihantui bayang-bayang kelam. ■

REVOLUSI BUMN DAN JANJI KEDAULATAN: **MENELAAH PIDATO KENEGARAAN PRABOWO SUBIANTO 2026**

Di ruang sidang utama Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, suasana sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPRDPD berubah menjadi momen penegasan arah kebijakan yang tegas dan berani. Di hadapan pimpinan lembaga negara, anggota parlemen, serta mantan presiden dan wakil presiden, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan yang lebih dari sekadar laporan tahunan; pidato itu diposisikan sebagai peta jalan transformasi struktural yang ingin merombak cara negara mengelola aset publik, menata ulang prioritas fiskal, dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan. “Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujar Prabowo.

Dalam narasi yang disampaikan, penataan BUMN bukan sekadar operasi teknis; ia adalah pernyataan politik tentang akuntabilitas publik. Pemerintah menempatkan rasionalisasi BUMN sebagai instrumen

utama untuk menghentikan kebocoran anggaran dan mengalihkan sumber daya negara ke program yang langsung menyentuh kehidupan rakyat. Di balik angka-angka efisiensi itu tersimpan dua tuntutan yang saling terkait: pertama, bahwa kepemilikan publik harus menghasilkan manfaat publik; kedua, bahwa negara tidak boleh mempertahankan entitas yang menjadi beban fiskal tanpa kontribusi nyata. Jika dilaksanakan dengan konsistensi, rasionalisasi ini berpotensi memperbaiki neraca fiskal, membuka ruang anggaran untuk investasi produktif, dan memperkuat fokus anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Namun, reformasi semacam ini selalu membawa konsekuensi sosial dan politik yang kompleks. Penutupan BUMN dalam skala besar berpotensi memicu gelombang PHK, menimbulkan tekanan ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada perusahaan pelat merah, dan memantik resistensi dari jaringan patronase yang selama ini mendapat manfaat dari struktur lama. Oleh karena itu, keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari jumlah entitas yang ditutup, tetapi juga dari kualitas paket transisi yang disiapkan: kompensasi yang adil,

program reskilling dan upskilling, serta jalur penempatan kerja yang jelas. Tanpa langkah-langkah transisi yang memadai, reformasi berisiko menimbulkan ketidakstabilan sosial yang justru menggerus legitimasi kebijakan itu sendiri.

Pidato kenegaraan juga menempatkan penegakan hukum sebagai pilar penting dalam upaya memperkuat tata kelola negara. Pemerintah mengumumkan kenaikan remunerasi hakim, terutama bagi mereka yang baru memulai pengabdian, sebagai langkah untuk memperkuat independensi peradilan dan mengurangi kerentanan terhadap praktik korupsi. “Kita menjaga kemandirian hakim. Kita tingkatkan taraf hidup hakim. Tetapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim. Saudarasaudara, mengenai masalah hakim, Pemerintah saya telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280 persen,” tukas Presiden. Kenaikan gaji ini, bila diiringi mekanisme pengawasan yang kuat—audit kinerja, transparansi putusan, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran etik—dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sebaliknya, jika kenaikan



remunerasi hanya menjadi simbol tanpa perubahan substantif dalam praktik, publik akan menilai langkah itu sebagai upaya kosmetik yang gagal menyentuh akar masalah.

Kedaulatan pangan muncul sebagai benang merah lain dalam pidato tersebut. Pemerintah menegaskan

bahwa setiap kebijakan ekonomi harus langsung berdampak pada kehidupan rakyat: menciptakan lapangan kerja, menstabilkan harga pangan, dan memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Pernyataan bahwa bangsa yang kuat harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri bukan sekadar

retorika; ia menuntut koordinasi lintas kementerian—pertanian, perdagangan, perindustrian, dan keuangan—serta intervensi pasar yang cermat untuk melindungi petani tanpa merusak mekanisme pasar. “Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus





memperbaiki kehidupan rakyat. Itulah orientasi Pemerintah yang saya pimpin. Saudarasaudara sekalian, bangsa yang kuat harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” ujar beliau. Implementasi kebijakan ini menuntut perbaikan rantai pasok, akses pembiayaan mikro bagi petani, dan sistem distribusi yang efisien agar hasil produksi dapat terserap pasar domestik dengan harga yang adil.

Sektor maritim mendapat porsi khusus dalam visi pembangunan yang dipaparkan. Dengan potensi laut yang besar, pemerintah menargetkan pembangunan kampung nelayan sebagai upaya mengubah kekayaan laut menjadi kesejahteraan lokal. Laporan bahwa seratus kampung nelayan telah dibangun dan target 1.100 kampung nelayan pada akhir 2026 menunjukkan ambisi skala





besar, namun juga menuntut kesiapan logistik, fasilitas pengolahan, akses pembiayaan, dan tata kelola sumber daya pesisir yang berkelanjutan. “Hari ini, 100 Kampung Nelayan telah dibangun. Target kita, 1.100 Kampung Nelayan berdiri dan berfungsi pada akhir 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia,” ungkap Prabowo. Keberhasilan program ini akan bergantung pada integrasi antara infrastruktur penangkapan, fasilitas pengolahan hasil laut, akses pasar yang stabil, serta perlindungan terhadap praktik penangkapan yang merusak lingkungan.

Pembangunan manusia menjadi inti strategi jangka panjang yang diusung dalam pidato. Program Makan Bergizi Gratis, perluasan Sekolah Rakyat, dan

program rumah layak huni melalui skema FLPP dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini menggabungkan intervensi kesehatan, pendidikan, dan perumahan untuk menciptakan efek multiplikatif pada produktivitas keluarga prasejahtera. “Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia... Bagi jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekadar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan,” ujar Presiden. Program-program semacam ini, jika dirancang dengan baik, dapat memperkuat kapasitas produksi lokal—mendorong permintaan terhadap produk petani dan nelayan lokal, serta menumbuhkan ekosistem UMKM yang menopang distribusi dan

pengolahan.

Namun, visi besar selalu diuji oleh realitas implementasi. Penataan BUMN dan program sosial yang ambisius memerlukan kapasitas administrasi yang kuat di tingkat pusat dan daerah, alokasi anggaran yang realistis, serta sistem pengawasan yang efektif. Pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas untuk penutupan dan restrukturisasi BUMN, lengkap dengan indikator kinerja, jadwal transisi, dan mekanisme evaluasi dampak sosial-ekonomi pada setiap fase. Pilot project untuk kampung nelayan dan Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan indikator yang ketat sehingga desain program dapat disesuaikan sebelum perluasan nasional. Pembentukan komite pengawas publik yang melibatkan DPR, BPK, akademisi,



dan perwakilan masyarakat sipil dapat meningkatkan legitimasi dan memastikan akuntabilitas dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan program sosial.

Dari perspektif fiskal, penghematan yang dihasilkan dari penataan BUMN sebaiknya diarahkan ke investasi produktif yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, seperti infrastruktur perikanan, irigasi pertanian, dan program vokasi. Di sisi lain, paket transisi pekerja harus mencakup kompensasi yang adil, program pelatihan ulang, dan jalur penempatan kerja yang terkoordinasi antara kementerian terkait dan pemerintah daerah. Tanpa langkah-langkah ini, reformasi berisiko memperdalam ketimpangan dan menimbulkan gejolak sosial yang merugikan stabilitas ekonomi jangka menengah.

Indikator keberhasilan reformasi harus mencakup ukuran kuantitatif dan kualitatif: kontribusi fiskal bersih dari penataan BUMN, tingkat penyerapan tenaga kerja dari program transisi, perubahan pendapatan nelayan dan petani di wilayah pilot, serta indeks kepercayaan publik terhadap peradilan setelah reformasi remunerasi dan mekanisme akuntabilitas diterapkan. Hanya dengan metrik yang jelas dan pelaporan berkala, publik dapat menilai apakah reformasi benar-benar meningkatkan kesejahteraan atau sekadar merombak struktur tanpa hasil nyata.

Pidato kenegaraan ini menandai ambisi besar untuk merombak struktur ekonomi dan institusional negara demi efisiensi dan kesejahteraan. Ambisi itu berpotensi membuka ruang fiskal untuk investasi produktif dan memperkuat kedaulatan pangan serta

kesejahteraan masyarakat pesisir dan pedesaan. Namun keberhasilan agenda ini akan ditentukan bukan hanya oleh keputusan di tingkat pusat, tetapi oleh kemampuan pemerintah untuk melibatkan pemangku kepentingan, memperkuat kapasitas daerah, menjaga transparansi, dan menegakkan akuntabilitas dalam setiap langkah perubahan. Seperti yang diingatkan Presiden pada penutup pidatonya, pembangunan yang berkelanjutan bukan untuk satu masa jabatan, melainkan untuk satu zaman. “Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri. Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk masa depan anak cucu kita,” tukas Presiden. ■



HUT KE-81 REPUBLIK INDONESIA: **PUSAKA, PROKLAMASI, KEBERSAMAAN**

Suasana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa sejak Senin (17/08/2026) pagi. Prosesi kirab budaya dari kawasan Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka menjadi pembuka rangkaian peringatan hari bersejarah bangsa Indonesia.

Kirab tersebut membawa dua benda yang memiliki makna penting dalam sejarah kemerdekaan, yakni duplikat bendera Merah Putih dan naskah teks Proklamasi. Keduanya diarak menuju Istana Merdeka untuk digunakan dalam rangkaian Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Prosesi diawali dengan penyerahan

duplikat bendera Merah Putih dan naskah asli teks Proklamasi dari Kaskogartap I/Jakarta Brigjen TNI Fitriana Nur Heru Wibawa kepada Perwira Paspampres. Selanjutnya, kedua benda bersejarah tersebut diserahkan kepada Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila di Ruang Kemerdekaan Monas.

Duplikat bendera Merah Putih



kemudian dibawa oleh Sultana Najwa, Purna Paskibraka 2025 yang mewakili Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Aliah Sakira, Purna Paskibraka 2025 perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, mendapat amanah membawa naskah teks Proklamasi.

Keduanya menempuh perjalanan menuju Istana Merdeka dengan menaiki Kereta Kencana Garuda Prabayaksa. Kemeriah kirab semakin terasa dengan hadirnya pasukan dalam berbagai formasi. Sebanyak 45 pasukan motoris Polisi Militer mengiringi perjalanan sebagai simbol tahun Proklamasi. Barisan tersebut disusul 170 taruna/taruni yang tergabung dalam Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi

Kepolisian yang menambah semarak suasana sepanjang rute kirab.

Unsur pasukan berkuda turut menjadi bagian yang menarik dalam rangkaian kirab budaya. Sebanyak 81 pasukan berkuda turut serta sebagai simbol usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Selain itu, terdapat 17 pasukan berkuda hadir sebagai perlambang tanggal Proklamasi, delapan kuda penarik kereta kencana, dan delapan pasukan berkuda melambangkan bulan Proklamasi,

Kirab juga dimeriahkan oleh 76 pasukan berpakaian Nusantara yang menghadirkan keragaman budaya Indonesia dalam satu rangkaian perayaan kemerdekaan. Kehadiran pakaian tradisional dari berbagai daerah menjadi gambaran keberagaman yang menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari kawasan Monas, rombongan memulai perjalanan dari Cawan Monas, kemudian melintasi Jalan Medan Merdeka Barat sebelum memasuki halaman Istana Merdeka. Sepanjang perjalanan, kirab menjadi bagian dari pertunjukan kebangsaan yang memadukan unsur sejarah, budaya, militer, dan tradisi kenegaraan.

Setibanya di Istana Merdeka, Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila turun dari Kereta Kencana Garuda Prabayaksa. Duplikat bendera Merah Putih dan naskah teks Proklamasi kemudian diserahkan untuk ditempatkan di meja mimbar kehormatan.

Kirab Bendera Pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka tidak sekadar menjadi rangkaian seremoni. Di balik derap pasukan, dentuman drumben, langkah pasukan berkuda, dan semarak pakaian Nusantara, tersimpan pesan bahwa kemerdekaan

Indonesia lahir dari sejarah panjang yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hening, Proklamasi, dan Pengakuan Kolektif

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung khidmat untuk memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Inf Priyo Handoyo kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Setelahnya, 17 dentuman meriam menggema di kawasan Istana Merdeka, disertai bunyi sirene panjang. Dentuman tersebut menjadi penanda dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi, membawa suasana halaman Istana Merdeka ke dalam nuansa khidmat dan penuh penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa.

Presiden Prabowo membacakan langsung naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Usai membacakan Proklamasi, Presiden Prabowo kemudian memimpin seluruh peserta upacara untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Tanah Air. “Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan

cipta, untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan Cipta, mulai,” ucap Presiden Prabowo.

Setelah mengheningkan cipta, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipandu Menteri Agama Nasaruddin Umar. Rangkaian upacara kemudian memasuki prosesi pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim “Indonesia Berdaulat”.

Celina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dipercaya membawa Bendera Merah Putih. Ia didampingi M. Aryo Wira Zandhyka Y dari Provinsi Bengkulu sebagai pembentang, I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dari Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengerek, serta Achmad Fachri Mubarak dari Provinsi Jambi sebagai Komandan Kelompok 8.

Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Merah Putih perlahan bergerak naik menuju puncak tiang. Bendera kemudian berkibar gagah di langit halaman Istana Merdeka, disambut dengan sikap sempurna dan rasa bangga oleh seluruh peserta serta tamu undangan yang hadir.

Setelah bendera berkibar sempurna, Komandan Upacara kembali menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Laporan terakhir tersebut sekaligus menandai berakhirnya prosesi Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Rangkaian kegiatan kemudian diisi dengan persembahan lagu “Hari Merdeka” karya Husein Mutahar. Lagu tersebut dibawakan oleh Sekolah Rakyat dan Gita Bahana Nusantara (GBN), menghadirkan semangat kebangsaan sekaligus kegembiraan dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka berlangsung khidmat dan sarat makna, meneguhkan kembali semangat perjuangan dan persatuan bangsa dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Berkibarnya Sang Merah Putih, lantunan lagu kebangsaan, serta persembahan “Hari Merdeka” menjadi penutup yang menyatukan suasana haru, kebanggaan, dan semangat kebangsaan.

Senja Penurunan, Teguh Bebersamaan

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore, 17 Agustus 2026. Upacara tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Presiden Prabowo hadir sebagai Inspektur Upacara, sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, yang saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan Polda Kalimantan Timur.

Memasuki prosesi utama, tugas penurunan Bendera Merah Putih dipercayakan kepada tiga anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim Indonesia Adil





Makmur. Ketiganya menjalankan tugas dengan formasi dan gerakan yang telah dipersiapkan secara matang.

Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur bertindak sebagai Komandan Kelompok 8. Sementara itu, Mirza Rafi Navazani, pelajar SMAN 1 Sintang asal Kalimantan Barat, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Adapun Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kini menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang, mendapat amanah sebagai pengerek bendera.

Ketiga anggota Paskibraka tersebut perlahan menurunkan Sang Merah Putih dari tiang utama. Setelah berhasil diturunkan, bendera

kemudian diserahkan kepada Neeltje Deliana Insjowi Werimon, pembawa bendera asal Provinsi Papua. Dengan penuh kehormatan, Sang Merah Putih selanjutnya dibawa menuju mimbar kehormatan.

Bendera kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Kepala Negara menerima Sang Merah Putih untuk kemudian meletakkannya kembali di mimbar kehormatan.

Prosesi penurunan bendera tersebut menandai berakhirnya rangkaian Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih. Momen itu sekaligus menjadi penutup rangkaian seremoni kenegaraan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Sebelum meninggalkan mimbar

kehormatan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta upacara yang telah mengikuti rangkaian peringatan sejak pagi hingga sore dengan tertib dan penuh semangat. “Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan khidmat,” ucap Presiden.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut tidak hanya menjadi penanda berakhirnya seremoni kenegaraan, tetapi juga menghadirkan penghormatan mendalam terhadap Sang Merah Putih sebagai simbol perjuangan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Apresiasi Presiden Prabowo kepada seluruh peserta menjadi penutup yang menegaskan semangat kebersamaan dalam memperingati 81 tahun perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. ■

MANDEK DI TENGAH DARURAT KORUPSI:

RUU PERAMPASAN ASET DAN GUGATAN PUBLIK DI ERA PRABOWO



Di tengah gelombang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 11 kepala daerah sepanjang 2026, sebuah pertanyaan fundamental kembali mengemuka: seberapa kuat sebenarnya negara punya gigi untuk menggigit para koruptor? Selama ini, penegakan hukum pidana hanya berorientasi pada memenjarakan pelaku.

Sementara aset hasil kejahatan, yang kerap nilainya jauh lebih besar, sering lolos dari jangkauan negara. Di sinilah letak urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Sayangnya, meskipun sudah 17 tahun bergulir sebagai wacana dan berkali-kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), RUU ini masih saja mandek di tengah jalan. Mandek di tengah derasnya tekanan publik dan di tengah janji pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008, RUU Perampasan Aset telah melewati tiga periodisasi kepresidenan tanpa perkembangan signifikan. Bahkan pada 2012, ketika pembahasan sudah hampir mencapai final, RUU ini kembali menguap begitu saja.

Pada periode 2023-2025, meskipun didorong oleh pemerintah lewat Surpres Presiden Joko Widodo, RUU ini lagi-lagi gagal masuk prioritas tahunan.

Kini, di era Prabowo Subianto, RUU ini kembali diangkat, tetapi masih tersendat di tahap penyusunan draf dan naskah akademik. Pertanyaannya, mengapa sebuah instrumen hukum yang dianggap vital untuk pemberantasan kejahatan luar biasa



Bob Hasan

ini selalu mengalami tarik-ulur?

Mengapa RUU Ini Penting untuk Segera Disahkan?

RUU Perampasan Aset adalah sebuah terobosan hukum yang memungkinkan negara untuk merampas aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku.

Ini dikenal dengan istilah *non-convictionbased asset forfeiture* (NCB). Selama ini, ketergantungan pada perampasan berbasis putusan pidana membuat pemulihan aset tersendat ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau proses hukum tidak dapat diselesaikan.

Dengan adanya UU Perampasan Aset, negara bisa mengejar aset koruptor secara langsung, bahkan jika pelaku sudah tidak bisa diproses secara pidana.

Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi harus memastikan aset atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan dapat dipulihkan.

Paradigma ini dikenal sebagai *follow the asset* atau *follow the money*. Anggota



M. Nasir Djamil

Komisi III DPR, M. Nasir Djamil, juga menyatakan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kemampuan luar biasa karena tindak pidana tersebut tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mengatakan RUU Perampasan Aset menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh publik, karena dianggap dapat berkontribusi positif untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

“Karena hasil kejahatannya mudah dirampas oleh negara,” ujarnya.

Selain itu, RUU ini juga diharapkan dapat mengatur mekanisme *illicit enrichment*, yaitu peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dan sah dalam kaitannya dengan pendapatan legal mereka.

Konsep ini sebenarnya sudah diatur dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7/2006, namun belum diadopsi dalam UU Tipikor. Alasan klasik yang selalu dikemukakan DPR dan pemerintah adalah masih menunggu rampungnya pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar nantinya bisa disinkronkan.

Namun, para pengamat menilai ini hanyalah dalih politik belaka. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan bahwa alasan tersebut tidak lebih dari sekadar gimmick.

“Karena ada semacam keengganan ya bagi pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut,” tegasnya.



Supratman Andi Agtas

Bahkan Herdiansyah dengan tegas menyebut bahwa keengganan tersebut berkaitan erat dengan kepentingan politik elite. Ia menyebut RUU Perampasan Aset berpotensi langsung menyasar kalangan pemerintah dan DPR sendiri.

“Saya sudah berkali-kali bilang... keengganan secara serius membahas rancangan undang-undang perampasan aset karena ya pemerintah dan DPR tahu betul bahwa kalau undang-undang ini disahkan, maka yang pertama kali akan disasar dan dicerat dengan undang-undang ini adalah pemerintah dan DPR,” ujarnya.

Senada dengan itu, pakar hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof. Jawade Hafidz, menduga penundaan pengesahan RUU ini karena menyangkut kepentingan dan keamanan aset si pembuat UU.

Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa RUU ini bisa menjadi alat politik bagi rezim yang berkuasa untuk menjinakkan atau menghabisi lawan politik. Dalam perspektif hukum t a t a

negara, ketika negara diberi kuasa merampas a s e t , pertanyaan kritisnya



Zaenur Rohman

adalah: siapa yang mengawasi negara? Karena itu, desain RUU harus menjawab secara jelas siapa yang dapat meminta perampasan, berdasarkan bukti apa, siapa yang memutuskan, dan bagaimana aset dikembalikan jika negara ternyata keliru.

Anggota Komisi III DPR, M. Nasir Djamil, bahkan mengusulkan perubahan nama RUU Perampasan Aset menjadi RUU Melindungi Aset, untuk menekankan aspek perlindungan hak milik warga Negara.

Dugaan Kepentingan Elit di Balik Tarik Ulur

Castro, sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, membeberkan bahwa alasan RUU Perampasan Aset mandek karena anggota DPR menjadi salah satu pihak yang akan kena sasar.

“Saya berkali-kali sudah menjelaskan RUU ini tidak dibahas, karena kalau diketok palu, yang diseret pertama kali adalah termasuk anggota DPR yang memang berdasarkan data paling banyak terlibat dalam perkara korupsi,” katanya.

Ia juga mengacu pada data perkara korupsi yang selama ini banyak melibatkan pejabat negara.

“Bahkan yang paling banyak bermasalah tanda petik ya aset-asetnya adalah pemerintah dan DPR,



Herdiansyah Hamzah

para pejabat-pejabat termasuk begitu,” lanjutnya.

Selain itu, di balik kemandekan ini, terdapat pula fenomena menarik yang disebut sebagai dilema patronase politik. Seorang peneliti menyebut RUU Perampasan Aset menakutkan bagi elite bukan sekadar karena ancaman pemiskinan individu, melainkan juga karena potensinya menghancurkan sistem patronase modern yang mengalir deras di masyarakat.

Ketika instrumen aset dirampas negara, yang runtuh bukan sekadar karier satu individu, melainkan juga seluruh bangunan relasi sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang selama ini menopang kehidupan kolektif masyarakat di akar rumput.

Fenomena ketika rakyat sering membela politisi yang tertangkap korupsi, dari kacamata antropologis, adalah wujud nyata bekerjanya ekonomi moral.

Mampukah RUU Ini Menutup Pintu Korupsi?

Jika RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang, harapannya pelaku tindak pidana akan kesulitan untuk menikmati hasil kejahatannya.

Presiden Prabowo Subianto sendiri secara gamblang menyatakan dukungannya terhadap RUU ini. Dalam



Jawade Hafidz

pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, ia mengatakan, “Enak saja sudah nyolong, nggak mau kembalikan aset. Saya tarik saja itu. Setuju?”

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menegaskan bahwa Presiden telah memberikan perintah yang jelas agar pengesahan RUU Perampasan Aset mesti disegerakan.

Namun, efektivitas RUU ini sangat bergantung pada kualitas isinya. Zaenur Rohman mengingatkan agar pembentuk undang-undang jangan sampai mengesahkan RUU Perampasan Aset alakadarnya saja untuk meredakan tekanan luar biasa dari publik.

“RUU ini tidak boleh asal-asalan jadi, harus menunjukkan kualitas yang baik. RUU ini harus punya kontribusi untuk mengefektifkan perampasan aset kejahatan,” kata Zaenur.

Ia juga mengingatkan bahwa RUU ini harus dibuka seluas-luasnya untuk partisipasi publik, sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang meaningful participation.

Jika akhirnya disahkan, UU Perampasan Aset akan menjadi “senjata pamungkas” bagi negara dalam memiskinkan koruptor. Negara tidak perlu lagi menunggu pelaku



Saan Mustopa

tertangkap atau dihukum untuk menyita asetnya. Ini akan memberikan efek jera yang luar biasa.

Namun, tantangan terbesar justru pada implementasinya. Prosedur dan mekanisme perampasan harus diatur dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menyoroti pentingnya sistem pemerintahan berbasis digital sebagai solusi pencegahan korupsi, sehingga upaya pemberantasan tidak hanya melalui penghukuman, tetapi juga dengan memperkuat system.

Saat ini, pembahasan RUU Perampasan Aset tengah berlangsung di Komisi III DPR, yang rutin menggelar rapat dengar pendapat umum dengan mengundang berbagai pihak. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengupayakan RUU ini selesai tahun ini.

Namun, sejarah panjang kemandekan RUU ini mengajarkan bahwa political will adalah kunci. Selama ada kepentingan elite yang terancam, selama itu pula RUU ini akan terus dihadapkan pada berbagai hambatan. Publikasikan terus mengawal dan mengkritisi setiap langkah DPR dan pemerintah. ■

KASUS FEBRIE ADRIANSYAH DAN UJIAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah telah resmi ditahan di Rutan KPK. Namun, penanganan kasus korupsi yang menjerat Febrie ditemukan sejumlah kejanggalan. Publik pun membaca penegakan hukum dipermainkan.

Korupsi dan korupsi menjadi pemberitaan yang tak pernah sepi di republik ini. Di tengah kondisi rakyat yang makin terhimpit karena kesulitan ekonomi, para pejabat sibuk memperkaya diri dengan jalan melanggar hukum. Bahkan, tidak ada rasa malu praktik korupsi dilakukan oleh para penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Kasus korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah menjadi sinyal bahwa pemberantasan korupsi dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Jika tidak ada *political will* dari pemerintah maka korupsi akan menjadi ancaman yang nyata bagi kemajuan bangsa.

Publik menyaksikan di masa pemerintahan Presiden Prabowo sejumlah mega kasus korupsi terbongkar. Namun, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan mulus jika penegakkan hukum tidak berjalan transparan dan berkeadilan. Sehingga, publik hanya sekadar menonton drama penangkapan para koruptor.

Publik menanti upaya serius dari pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di republik ini. Jika tidak yang terjadi justru sebaliknya, praktik korupsi akan tetap tumbuh subur di Indonesia.

Proses hukum yang janggal

Fenomena tersebut seakan-akan terjadi dalam penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat Febrie. Pasalnya, sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penanganan kasus tersebut.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut dibaca oleh publik bahwa upaya penegakan hukum di Indonesia tebang pilih. Kejanggalan tersebut dipertontonkan secara nyata oleh Kejaksaan Agung. Serangkaian langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan terasa membingungkan, inkonsisten dan sulit dijelaskan secara hukum dan akal sehat. Sehingga yang publik rasakan

supermasi hukum di Indonesia tidak lagi sedang bekerja.

Seperti disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendaridi bahwa masyarakat sedang dipertontokan kondisi penegakan hukum yang tebang pilih. Supermasi hukum tidak berjalan untuk menegakan keadilan di republik ini. Sehingga sangat wajar jika berlahan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum akan terus terkikis.

“Kejaksaan Agung sedang menghina publik dengan memaksa masyarakat menerima proses hukum yang tidak masuk akal. Kejanggalan proses penegakan hukum kasus Febrie oleh kejaksaan menunjukkan berbagai kejanggalan yang bersifat fundamental,” katanya melalui



Hendaridi



pernyataan pers, dikutip Jumat, 17 Juli 2026.

Dia menjelaskan, kegagalan pertama terbaca pada status hukum Febrie yang berubah. Sebelum penanganan perkara diserahkan kepada Kejagung oleh Polri, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, setelah perkara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung, melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pernyataan resmi institusi, keduanya justru diposisikan sebagai saksi. Dan menurutnya perubahan yang sangat mendasar ini tidak pernah disertai penjelasan hukum yang memadai kepada publik.

Menurutnya, berdasarkan negara hukum perubahan status seseorang dalam proses pidana bukanlah tindakan administratif biasa, melainkan tindakan hukum yang

harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Diketahui, belakangan Kejagung menyebut Febrie tetap tersangka.

Kejagalan kedua adalah tidak adanya kejelasan mengenai keberadaan Febrie Adriansyah setelah perkara diambil alih Kejagung. Di tengah perhatian publik yang sangat besar, Kejaksaan Agung tidak memberikan kepastian mengenai posisi maupun langkah-langkah hukum yang sedang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Yang muncul justru informasi bahwa pencekalan terhadap Febrie Adriansyah dan Don Ritto hanya berlaku selama 20 hari dan hanya didasarkan pada permintaan Polda Metro Jaya.

“Hingga kini belum terlihat adanya permintaan pencekalan dari Kejaksaan Agung sebagai institusi

yang menangani perkara. Kelalaian semacam ini tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif semata, melainkan berpotensi mengganggu efektivitas proses penegakan hukum.” jelasnya seperti dilansir Sindonews.com.

Kejagalan ketiga adalah tidak dilakukannya penahanan terhadap Febrie Adriansyah. Hendardi mengatakan, memang hukum acara pidana tidak mewajibkan penahanan dalam setiap perkara. Namun dalam perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar, yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum dengan akses dan jejaring yang luas, keputusan untuk tidak melakukan penahanan membutuhkan argumentasi hukum yang kuat dan transparan.

Ketika argumentasi tersebut tidak



pernah disampaikan kepada publik, yang tumbuh adalah dugaan adanya patgulipat dalam penegakan hukum kasus ini.

“Rangkaian kejanggalan tersebut semakin menguatkan persepsi bahwa Kejaksaan Agung sedang mengalami konflik kepentingan yang serius dalam menangani perkara yang melibatkan mantan pejabat strategisnya sendiri. Pemihakan institusional Kejaksaan Agung dalam kasus ini sangat kentara. Kejaksaan Agung tampak berupaya mengendalikan perkara dan menutup-nutupi kebenaran, bukan mengungkap kebenaran. Penegakan hukum dan keadilan tidak tampak ditegakkan, padahal seharusnya sebaliknya. *Justice must not only be done, but must be seen to be done.*”, jelasnya.

Selanjutnya dia menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh terus dibiarkan. Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) harus mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah. Pengambilalihan bukan sekadar pilihan kelembagaan, melainkan kebutuhan untuk memulihkan integritas penegakan hukum.

“Konflik kepentingan yang melekat pada Kejaksaan Agung dalam menangani mantan pejabat puncaknya sendiri telah sedemikian nyata sehingga independensi proses hukum sulit lagi diyakini publik. Penegakan hukum tidak hanya harus dilakukan secara adil, tetapi juga harus tampak adil.”katanya.

Mantan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahmad MD juga melihat hal yang sama terdapat banyak kejanggalan dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Febrie.

Kejanggalan yang dia temukan

adalah pelimpahan perkara kasus tersebut dari Polri ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, pelimpahan kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Mahfud menilai bahwa proses tersebut mengandung sejumlah kejanggalan, mulai dari belum diperiksanya tersangka hingga belum adanya kejelasan mengenai keberadaan Febrie Adriansyah setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Dia menjelaskan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), suatu perkara baru dapat dilimpahkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Menurutnya, syarat tersebut meliputi adanya minimal dua alat bukti beserta barang bukti, tersangka telah diperiksa oleh penyidik, serta berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum. Dan dalam perkara



Febrie ada dua syarat yang belum terpenuhi.

“Seharusnya secara hukum, perkara yang katanya sudah dilimpahkan itu dikembalikan dulu ke Polri untuk diselesaikan penyidikannya. Secara hukum acara pidana (KUHP), proses yang terjadi saat ini tidak sah,”katanya seperti dilansir *TribunKaltim.co*.

Selanjutnya dia menjelaskan bahwa Febrie Adriansyah belum pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polri sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selain itu, menurutnya, berkas perkara juga belum dinyatakan lengkap (P21), sehingga mekanisme pelimpahan dinilai tidak sesuai prosedur.

“Sekarang yang disebut tersangka itu belum pernah diperiksa. Berarti pelimpahan itu melanggar ketentuan Pasal 61 KUHP. Selain itu, P21-nya juga belum ada. Mekanisme yang benar adalah Polri menyelesaikan berkas, menyerahkan ke jaksa, lalu jaksa menilai dan mengeluarkan P21. Setelah itu baru fisik orangnya diserahkan. Sekarang ini prosedurnya terbalik,”jelasnya.

Selain mengkritisi prosedur hukum, Mahfud juga mempertanyakan keberadaan Febrie Adriansyah setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, hingga kini publik belum memperoleh informasi yang jelas mengenai posisi mantan Jampidsus tersebut.

“Kalau sekarang ini kita kan tidak jelas. Ini bagaimana sih? Itu si Febrie-nya ada di mana sekarang? Apakah dia bersembunyi, disembunyikan, atau bagaimana? Publik berhak tahu kejelasan penegakan hukumnya,” tegas Mahfud.

Rakyat: Tangkap Febrie

Banyaknya kejanggalan yang ditemukan dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah menggerakkan masyarakat menuntut keadilan ditegakkan di republik ini.

Aksi demonstrasi pun digelar oleh sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa. Salah satunya adalah Massa yang mengatasnamakan Jaringan Intelektual Hukum Nasional menggelar aksi unjuk rasa di depan

Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (22/7) siang.

Mereka mendesak komitmen nyata penegakan hukum kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Salah satu tuntutan massa adalah agar penyidik Kejaksaan Agung segera menangkap dan menahan Febrie. “Tangkap Febrie Adriansyah,” ucap salah satu orator, Rabu.

Massa menyatakan bahwa bukti-bukti keterlibatan Febrie sudah ditemukan. Mereka mempertanyakan mengapa jaksa tak kunjung menangkap dan menahan Febrie.

“Sudah sampai manakah kasus Febrie Adriansyah? Apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang kejaksaan dalam menyidik eks pimpinannya,” kata seorang orator.

Ia pun mempertanyakan keberanian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam penanganan kasus ini.

Esoknya, Kamis, 23 Juli 2026, kelompok massa dari BEM Kristiani Seluruh Indonesia juga menggelar aksi di lokasi yang sama. Tuntutan yang sama disuarakan yakni mendesak Kejaksaan Agung agar tidak lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Wakil Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia, Frimus mengatakan, mereka membawa sejumlah tuntutan utama.

“Hari ini memang permintaan kami yang pertama adalah kami mendesak Kejagung untuk segera menahan Febrie Adriansyah,” kata Frimus kepada wartawan di lokasi aksi.

Mereka juga meminta agar rumah dinas Febrie di Jalan Radio I, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan



untuk segera digeledah.

Mereka juga menduga, ada lebih banyak barang bukti terkait kasus korupsi dan TPPU PT Asabri ini yang tersimpan di sini.

“Kami meminta kepada para penegak hukum untuk menggeledah kediaman ataupun rumah dinas daripada Eks Jampidsus Kejaksaan Republik Indonesia,” ujar dia.

Aksi demonstrasi kembali digelar pada Jumat 24 Juli 2026. Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh massa Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di halaman depan Kantor Kejaksaan Agung dengan membawa tikus hidup

lalu melemparkannya ke area pagar kantor.

Aksi ini merupakan simbol terhadap “tikus berdasi” yang dinilai belum ditindak tegas. Tuntutan yang sama juga disuarakan yakni mendesak Kejaksaan agar segera mengusut tuntas kasus korupsi dan TPPU serta memproses Febrie Adriansyah tanpa pandang bulu.

Febrie resmi ditahan Rutan KPK

Setelah melalui “drama” yang panjang, akhirnya mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah resmi ditahan selama 20 hari di rumah tahanan

(Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Jumat (24/7) malam.

Sebelum resmi ditahan, Febrie menjalani pemeriksaan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung pada Jumat (24/7/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Febrie awalnya berstatus sebagai saksi.

Febrie diperiksa selama hampir 10 jam sejak siang hari. Jelang tengah malam, Tim 9 Kejaksaan Agung meningkatkan status hukum Febrie dari saksi menjadi tersangka. Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana



Pencucian Uang (TPPU).

Saat digiring masuk ke mobil tahanan Kejagung, Febrie sempat menyampaikan pernyataan bahwa dirinya merupakan korban kriminalisasi.

“Saya merasa memang ini kriminalisasi. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini, di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini,” ujar Febrie.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febrie langsung digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Febrie tiba di Rutan KPK menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjalani pemeriksaan sejak siang hari tadi.

Saat turun dari mobil tahanan, Febrie tidak mengenakan baju tahanan namun tampak mengenakan batik berwarna abu-abu coklat dengan dikawal oleh keamanan. Ia kemudian langsung digiring masuk ke Rutan KPK. Proses penahanan tersebut turut dikawal dan didampingi oleh penyidik yang mengantar Febrie hingga memasuki rumah tahanan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono menjelaskan alasan Kejagung menitipkan Febrie di Rutan KPK.

Dia menjelaskan penahanan Febrie di Rutan KPK karena mempertimbangkan faktor perlindungan. Sebab, selama menjabat sebagai Jampidsus, Febrie menangani berbagai perkara besar sehingga penyidik memandang perlu memberikan perlindungan terhadap dirinya.

“Kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya terbiasa menangani kasus besar. Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan,” ujar Rudi, Jumat, 24 Juli 2026.

Selain itu, penempatan di Rutan KPK juga dilakukan demi menjaga akuntabilitas dan transparansi proses hukum sekaligus memperkuat sinergi antara Kejagung dan KPK.

Tidak menyalahi prosedur hukum

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa penahanan Febrie di Rutan KPK tidak menyalahi prosedur hukum.

Dia mengatakan bahwa seluruh

rumah tahanan negara memiliki kedudukan hukum yang sama sehingga tersangka dapat ditempatkan di rutan mana pun sepanjang berstatus sebagai rumah tahanan negara.

“Yang namanya rumah tahanan negara itu sama, tidak tergantung lokasinya. Ketika seseorang tersangka atau terdakwa ditahan, maka terbuka kemungkinan untuk ditempatkan di mana saja selama tempat itu bernama rumah tahanan negara. Karena itu tidak ada prosedur hukum yang dilanggar,” kata Fickar seperti dilansir Kompas.com, Sabtu (25/7).

Selanjutnya dia menjelaskan bahwa penentuan lokasi penahanan umumnya didasarkan pada pertimbangan tertentu, salah satunya untuk meminimalkan potensi intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, penempatan Febrie di Rutan KPK justru merupakan pilihan yang tepat karena dinilai memiliki tingkat keamanan yang tinggi dari kemungkinan adanya pengaruh pihak lain.

“Tentusaja penempatan pada rumah tahanan negara di lokasi tertentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama soal akses yang memungkinkan terjadinya intervensi. Karena itu pilihan Rutan KPK sangat tepat karena kemungkinan potensi ditembus intervensinya sangat kecil, baik intervensi kekuasaan maupun uang,” ucap dia.

Sementara itu Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyatakan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penahanan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menjadi sinyal positif dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda

pemberantasan korupsi.

“Ini langkah yang bagus. Ketika KPK turut dilibatkan, ada pesan bahwa pemerintahan Prabowo ingin proses pemberantasan korupsi berjalan lebih terbuka, lebih transparan, dan tidak hanya bertumpu pada satu lembaga,” ujarnya seperti dilansir RMol, pada Minggu, 26 Juli 2026.

Hendri menilai dengan dilibatkannya KPK menunjukkan Presiden Prabowo memiliki keinginan kuat dalam membangun koordinasi antarlembaga penegak hukum. Langkah tersebut juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

“Presiden tentu tidak perlu mengatur siapa diperiksa, siapa ditahan, atau bagaimana konstruksi hukumnya. Namun, Presiden harus menciptakan suasana agar penegak hukum berani bekerja. Keterlibatan KPK ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Prabowo memberikan ruang bagi penegakan hukum yang lebih serius,” katanya.

Analisis yang akrab disapa Hensa mengatakan bahwa dalam pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga. Namun, perlu adanya kerjasama antara KPK, Kejaksaan Agung, Polri, serta lembaga negara lainnya.

Maka itu, koordinasi dalam penanganan suatu perkara perlu dilihat sebagai perkembangan positif selama dilakukan sesuai aturan dan kewenangan masing-masing lembaga.

“Kita tidak sedang berbicara mengenai Febrie secara personal. Fokusnya bukan pada orangnya. Fokusnya adalah bagaimana negara menangani perkara korupsi dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan



kompetensi,” ucapnya.

Menurut Hensa, langkah tersebut juga dapat menjadi jawaban atas keraguan publik mengenai komitmen pemerintahan Prabowo terhadap pemberantasan korupsi.

“Kalau Prabowo konsisten dengan pola seperti ini, melibatkan KPK dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, maka saya kira Prabowo memang sedang menunjukkan dirinya sebagai pendekar antikorupsi,” kata Hensa.

Ia menambahkan, keterlibatan KPK juga penting untuk mencegah munculnya persepsi suatu perkara hanya ditangani secara internal oleh lembaga tertentu. Dengan adanya koordinasi lintas lembaga, menurut dia, proses hukum diharapkan menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Publik membutuhkan keyakinan bahwa tidak ada perkara yang ditutup-tutupi dan tidak ada pihak yang dilindungi. Pelibatan KPK menjadi penting karena memberikan tambahan kepercayaan terhadap proses yang sedang berjalan,” tuturnya.

Meski demikian, Hensa mengingatkan bahwa penilaian terhadap komitmen antikorupsi pemerintahan Prabowo tetap akan ditentukan oleh konsistensi. “Langkah ini layak diapresiasi. Namun, yang akan membuat masyarakat benar-benar percaya adalah konsistensi. Jangan hanya satu kasus. Semua perkara korupsi harus ditangani dengan semangat dan keberanian yang sama,” katanya.

Publik terus mengawal proses penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Febrie. Pemberantasan korupsi di Indonesia sedang diuji. Jika proses penegakkan hukum berjalan transparan dan berkeadilan maka upaya pemerintah Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi patut diapresiasi.

Ada harapan pemberantasan korupsi berjalan dengan adil jika kasus ini dapat terungkap dengan terang benarang. Namun, jika yang terjadi sebaliknya maka pemberantasan korupsi hanya sekadar gimik. Perang terhadap korupsi hanya pura-pura. ■

Kronologi Kasus

Senin, 6 Juli 2026:

Jumpa pers Kortastipidkor Polri

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengungkap dugaan manipulasi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU yang diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara sekitar Rp 5 triliun. Manipulasi ini berimbas pada blackout/mati listrik.

Rabu, 8 Juli 2026:

Pengeledahan Serentak 12 Titik

12 lokasi pengeledahan tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Bogor. Area yang disasar mencakup sebuah kafe di Cipete hingga aset rumah mewah. Pada pengeledahan ini polisi menyatakan dari kafe de' Clan Signature, disita aset senilai Rp 60 miliar. Sedang dari money changer KOIN senilai Rp 7,2 miliar.

Kamis, 9 Juli 2026:

Temuan Brankas Rp 476 Miliar

Pengeledahan di rumah Sentul City, Bogor, yang kemudian diakui Febrie sebagai rumah pribadinya ditemukan sebuah brankas rahasia yang sengaja disembunyikan di balik panel kayu dinding. Dari dalam brankas tersebut disita USD 4.767.300, SGD 14.083.800, 74 kg emas Batangan dan Rp 100 juta.

Jumat, 10 Juli 2026:

Ruko Cipete Digeledah

Pengembangan penyidikan meluas dengan menysar titik ke-13, yakni sebuah kompleks ruko berlantai tiga di Jalan Asem II, Cipete Selatan, Jaksel. Dari pengeledahan ini polisi menemukan tumpukan dokumen, komputer, dan sejumlah barang bukti lainnya.

Jumat pagi, 10 Juli:

Jampidsus Febrie Jumpa Pers

Febrie menggelar jumpa pers di gedung Jampidsus Kejagung. Dalam jumpa pers, dia mengakui kepemilikan rumahnya di Sentul yang digeledah Polri, membantah kepemilikan bisnis di Cipete.

Sabtu, 11 Juli 2026:

Sabtu dini hari, Febrie mundur

Pada Sabtu dini hari, lewat pesan video, jubir Kejagung mengabarkan bahwa Febrie mundur dari jabatan Jampidsus. Setelah pengunduran diri Febrie tersebut, Jaksa Agung lantas menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jampidsus.

Sabtu siang, Febrie tersangka:

Dalam jumpa pers yang dihadiri Plt Jampidsus Rudi Margono, pimpinan Komisi III DPR, dan Kortastipidkor Polri, Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengumumkan secara resmi penetapan Febrie Adriansyah dan Don Ritto, advokat yang diduga orang dekat Febrie, sebagai tersangka.

Sabtu sore: Polri serahkan kasus Febrie ke Kejagung

Polri melimpahkan/mengalihkan kewenangan penanganan ketiga perkara tersebut kepada pihak Kejaksaan Agung pada Sabtu sore. Plt. Jampidsus Kejagung, Rudi Margono, menyatakan telah menerima pelimpahan demi asas percepatan proses hukum.

Minggu, 12 Juli:

Febrie dan Don Ritto Dicegah

- Imigrasi mencegah tersangka Febrie dan Don Ritto bepergian ke luar negeri atas permintaan polisi.
- Minggu siang: Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung bersama-sama melakukan salam komando dalam acara Hari Koperasi Nasional yang dihadiri Presiden Prabowo, menangkis isu keretakan mereka.

Senin, 13 Juli:

Kapolri temui Jaksa Agung

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendatangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/7). Sigit mengungkapkan pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung.





DARURAT KORUPSI DI DAERAH, KPK PANEN OTT SEPANJANG 2026

Tahun 2026, alarm peringatan dini bagi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia berbunyi sangat kencang. Dalam kurun waktu tujuh bulan pertama tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 11 kepala daerah. Sebuah jumlah yang mencengangkan dan memantik pertanyaan serius:

di mana peran partai politik sebagai pintu gerbang rekrutmen pemimpin?

Deretan operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2026 bagai sebuah klasemen liga yang memalukan. Hingga akhir Juli, setidaknya 11 kepala daerah telah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), angka yang langsung melambungkan fenomena ini menjadi sorotan nasional.

Mereka yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan publik dan motor pembangunan di daerah justru tersandung kasus suap, pemerasan, hingga gratifikasi. Sebuah potret buram yang memperlihatkan bahwa darurat korupsi di tingkat lokal bukanlah isapan jempol belaka.

KPK mencatat, berbagai modus operandi digunakan oleh para kepala daerah ini untuk mengeruk kekayaan.

Mulai dari pengondisian proyek-proyek pemerintah daerah yang melibatkan perusahaan keluarga, jual-beli jabatan strategis, hingga pungutan liar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi menutupi biaya politik yang mahal.

Momentum ini menjadi refleksi getir bagi bangsa yang baru saja melewati pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Jika proses demokrasi hanya melahirkan pemimpin dengan integritas rendah, maka biaya yang harus ditanggung rakyat tidak hanya uang, tetapi juga masa depan pembangunan yang terhambat.

Deretan Wajah dan Bobot Kasus

CNN Indonesia dan Kompas.com merangkum daftar 11 kepala daerah tersebut dengan berbagai variasi kasus. Rangkaian operasi dibuka dengan penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, pada 19 Januari 2026. Maidi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta penerimaan gratifikasi lainnya.

Pada hari yang sama, tim KPK lainnya mengamankan Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Modusnya tergolong terang-terangan: menjual 601 jabatan perangkat desa dengan tarif Rp165-225 juta per orang, total uang yang terkumpul mencapai Rp2,6 miliar. Selain itu, Sudewo yang juga mantan anggota DPR RI diduga menerima suap proyek dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan senilai Rp3,8 miliar.

Kasus Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang terjaring pada awal Maret 2026, menyedot perhatian karena

nilai kerugian negaranya yang paling fantastis. Fadia diduga mengondisikan pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk dimenangkan oleh PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), perusahaan yang dibentuk oleh suami dan anaknya. Aliran dana yang diduga mengalir ke perusahaan keluarga itu mencapai sedikitnya Rp46 miliar. Jumlah ini dinilai cukup untuk membangun ratusan rumah layak huni dan puluhan kilometer jalan di daerahnya.

Selanjutnya, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, ditangkap pada 9 Maret 2026 terkait kasus suap “ijon” proyek di lingkungan pemerintahannya. Ia diduga menerima komisi 10-15 persen dari nilai proyek. Operasi ini juga mengamankan uang tunai Rp756,8 juta beserta dokumen dan barang bukti elektronik.

Tidak berselang lama, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menjadi tersangka kasus pemerasan kepada OPD dengan dalih setoran untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026. Uang tunai Rp610 juta diamankan sebagai barang bukti.

Beralih ke April, giliran Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang ditangkap atas kasus pemerasan kepada pimpinan OPD. Ia disebut mematok target hingga Rp5 miliar, dan berhasil mengumpulkan uang sekitar Rp2,7 miliar.

Memasuki pertengahan tahun, KPK menjaring Bupati Muara Enim, Edison, pada 8 Juni 2026 atas kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa. Uang yang diduga diberikan untuk mengubah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bernilai Rp1,6 miliar.

Pada akhir Juni 2026, Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, ditangkap dalam kasus yang

berbau jual-beli jabatan. Ia meminta Toyota Land Cruiser senilai Rp2,05 miliar sebagai “mahar” untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda).

Juli menjadi bulan yang sibuk bagi KPK. Bupati Langkat, Syah Afandin, ditangkap atas kasus dugaan penerimaan fee proyek di Dinas Pendidikan dan Perkim, dengan nilai gratifikasi mencapai Rp3,5 miliar.

Selanjutnya, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menjadi kepala daerah dengan barang bukti paling mencengangkan. Dari penggeledahan, KPK menyita uang tunai, valuta asing, dan 2,5 kilogram emas senilai total Rp21,2 miliar. Uang tersebut diduga hasil pemerasan berupa potongan insentif pajak dan setoran rutin dari OPD.

Operasi teranyar sebelum artikel ini diturunkan adalah penangkapan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada 20 Juli 2026. Ia bersama Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang dan Direktur PT Meconel Sistim Instrument ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lombok Barat. Dari 11 kepala daerah yang terjaring, semuanya adalah bupati, kecuali satu wali kota.

Jawa Tengah: Sarang Korupsi Kepala Daerah?

Fakta menarik lain yang terungkap dari data KPK adalah dominasi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan kepala daerah terbanyak yang terjerat kasus korupsi. Dari total 11 orang, empat di antaranya berasal dari provinsi yang dikenal sebagai basis budaya Jawa yang adiluhung ini. Mereka adalah Bupati Pati, Sudewo; Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq; Bupati Cilacap, Syamsul Auliya

Daftar Kasus Korupsi Kepala Daerah

dr. H. Ardito Wijaya, M.K.M.

Bupati Lampung Tengah | Lampung

Masa Jabatan: 2021 - 2025

Tanggal ditangkap: OTT KPK 10 Desember 2025

Nilai Korupsi: ±Rp7,35 Miliar

Kasus: Dugaan menerima suap dan gratifikasi senilai total kurang lebih Rp5,75 miliar terkait pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa serta alat kesehatan di Pemkab Lampung Tengah selama Februari-November 2025.

Total Kekayaan (LHKPN): Rp12.857.356.389 (Laporan 10 April 2025)



Ade Kuswara Kunang, S.H.

Bupati Bekasi | Jawa Barat

Masa Jabatan: 2025 - 2030

Tanggal ditangkap: OTT KPK 18 Desember 2025

Nilai Korupsi: Rp12,4 Miliar (Rp11,4 M + HM Kunang (Ayah) Rp1 M).

Kasus: Dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Total Kekayaan (LHKPN): Rp79.168.051.653 (Laporan 11 Agustus 2025)



Dr. Drs. H. Maldi, S.H., M.M., M.Pd.

Wali Kota Madiun | Jawa Timur

Masa Jabatan: 2025 - 2030

Tanggal ditangkap: OTT KPK 19 Januari 2026

Nilai Korupsi: ±200 Juta

Kasus: Dugaan suap terkait proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Total Kekayaan (LHKPN): Rp16.926.129.519 (Laporan 2 April 2025)



Dandi Jayusman

berulang. Ketika dalam waktu relatif singkat sudah ada 17 kepala daerah yang kembali tersangkut perkara korupsi, sebagian besar melalui OTT, itu menunjukkan bahwa persoalan ini tidak pernah benar-benar diselesaikan secara tuntas,” ujarnya.

Herdiansyah menyoroti bahwa partai politik cenderung pragmatis, mengutamakan calon dengan modal finansial besar dan elektabilitas tinggi, sementara integritas dan rekam jejak sering diabaikan.

Anatomi Modus: Dari Fee Proyek hingga “Mahar” Jabatan

Menganalisis lebih dalam, ada pola modus operandi yang hampir seragam di antara para kepala daerah tersebut. Tiga modus utama mendominasi: pertama, pengondisian proyek atau penerimaan fee dari kontraktor, seperti yang terjadi di Pekalongan, Rejang Lebong, Muara Enim, dan Lombok Barat; kedua, pemerasan terhadap bawahannya atau jual-beli jabatan, sebagaimana modus yang digunakan oleh Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bupati Tulungagung, dan Bupati Kuantan Singingi; ketiga, penerimaan gratifikasi dalam jumlah besar, seperti yang dialami oleh Bupati Sukoharjo dan Bupati Langkat.

Pengamat politik dari Perkumpulan

Rachman; dan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Dandi Jayusman, menilai tingginya angka di Jawa Tengah bukan semata-mata karena intensitas penindakan KPK, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam rekrutmen politik di daerah tersebut.

“Ini adalah bukti bahwa partai politik kita gagal dalam kaderisasi. Partai

politik seharusnya dapat memfilter pejabat yang memiliki mental korup. Ini seharusnya dilakukan sedari awal sebelum mereka duduk di pemerintahan,” tegas Dandi.

Komentar senada disampaikan Peneliti Pusat Studi Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah. Ia menilai fenomena ini bukanlah kejadian luar biasa yang berdiri sendiri, melainkan persoalan sistemik yang terus berulang.

“Situasi ini sebenarnya terus



Herdiansyah Hamzah

untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, menjelaskan bahwa tingginya biaya politik menjadi akar dari semua modus ini. Para kandidat mengeluarkan biaya sangat besar selama kampanye. Setelah terpilih, mereka berusaha mengembalikan modal tersebut dengan cara-cara instan, salah satunya adalah korupsi.

“Biaya politik yang mahal mendorong kepala daerah yang terpilih berpikir bagaimana cara mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan,” kata Haykal.

Hasrat menutup modal inilah yang mendorong mereka untuk mencari jalan pintas, baik melalui pemerasan, suap, maupun jual beli jabatan.

Mantan penyidik senior KPK yang



Praswad Nugraha

kini menjabat Ketua Southeast Asia Anti-Corruption Syndicate (SEA Actions), Mochamad Praswad Nugraha, menambahkan bahwa persoalan utamanya bukanlah pada besaran biaya kampanye yang sah, melainkan biaya-biaya ilegal yang timbul akibat praktik politik uang.

“Jika terus terjadi, praktik politik uang dikhawatirkan akan terus mendorong pejabat yang terpilih untuk mencari cara demi mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama

proses politik,” ungkapnya.

Para pengamat sepakat bahwa tingginya biaya politik menjadi akar dari semua kasus ini. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menjelaskan bahwa pengeluaran besar dalam Pilkada tidak hanya terjadi saat kampanye, tetapi justru dimulai jauh sebelum itu.

“Saat mengajukan pencalonan saja sudah diperlukan mahar politik. Calon untuk mendapatkan rekomendasi dari

Daftar Kasus Korupsi Kepala Daerah

H. Sudewo, S.T., M.T.

Bupati Pati | Jawa Tengah

Tanggal ditangkap: OTT KPK 19 Januari 2026

Nilai Korupsi: ±2,6 Miliar, berpotensi nilai pemerasan sampai ±54,5 Miliar.

Kasus: Dugaan pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa serta dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Total Kekayaan (LHKPN): Rp31.519.711.746 (Laporan 11 April 2025)

Masa Jabatan: 2025 - 2030



Dr. Hj. Fadia Arafik, S.E., M.M.

Bupati Pekalongan | Jawa Tengah

Tanggal ditangkap: OTT KPK 3 Maret 2026

Nilai Korupsi: ±46 Miliar.

Kasus: Dugaan proyek pengadaan barang dan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan, dengan mengintervensi proses tender proyek pemerintah daerah ke perusahaan keluarga.

Total Kekayaan (LHKPN): Rp85.623.500.000 (Laporan 30 Maret 2025)

Masa Jabatan: 2025 - 2030



Muhammad Fikri Thobari, SE., M.AP.

Bupati Rejang Lebong | Bengkulu

Tanggal ditangkap: OTT KPK 9 Maret 2026

Nilai Korupsi: ±980 Juta

Kasus: Dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Total Kekayaan (LHKPN): Rp19.530.683.491 (Laporan 19 Agustus 2024)

Masa Jabatan: 2025 - 2030



Daftar Kasus Korupsi Kepala Daerah



**Dr. Syamsul Auliya Rachman,
S.STP., M.Si.**

Bupati Cilacap | Jawa Tengah

Tanggal ditangkap: OTT KPK 14 Maret 2026

Nilai Korupsi: ±750 Juta

Kasus: Dugaan pemerasan dan pengumpulan iuran THR dari 25 perangkat daerah, 2 RSUD, dan 20 puskesmas dengan ancaman rotasi jabatan jika tidak setor.

Total Kekayaan (LHKPN): Rp12.039.790.782
(Laporan 19 Januari 2026)

Masa Jabatan: 2025 - 2030



H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E.

Bupati Tulungagung | Jawa Timur

Tanggal ditangkap: OTT KPK 10 April 2026

Nilai Korupsi: ±2,7 Miliar

Kasus: Dugaan memeras pejabat dan OPD dengan ancaman menggunakan surat pernyataan mundur ASN jika tidak memenuhi setoran.

Total Kekayaan (LHKPN): Rp20.335.211.000
(Laporan 3 Maret 2026)

Masa Jabatan: 2025 - 2030



Chyntia Ingrid Kalangit, S.KM.

Bupati Kepulauan Sitaro | Sulawesi Utara

Masa Jabatan: 2025 - 2030

Tanggal ditangkap: 5 Mei 2026

Nilai Korupsi: ±22,7 Miliar

Kasus: Dugaan korupsi dana bantuan korban bencana Gunung Ruang, Sitaro.

Total Kekayaan (LHKPN): Rp11.839.080.809
(Laporan 12 Februari 2026)



Jamiluddin Ritonga

Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Dandi Jayusman, menegaskan bahwa kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi menjadi penyebab utama berulangnya kasus korupsi kepala daerah.

Menurutnya, partai politik seharusnya menjadi pintu pertama untuk menyaring calon pemimpin yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pejabat yang memiliki mental korup lolos hingga menduduki jabatan publik.

“Partai politik selalu ambil jalan pintas dengan memilih calon pejabat publik yang sudah terkenal dan berpotensi mendulang banyak suara, padahal kompetensinya diragukan,” ujar Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal.

Darurat Integritas dan Seruan Reformasi

Kondisi ini memicu seruan dari berbagai kalangan agar pemerintah dan partai politik melakukan pembenahan sistemik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut angkat bicara. Ia meminta partai politik untuk “menyekolahkan” calon kepala daerah sebelum diusung dalam

partai politik harus merogoh kocek miliaran,” ujarnya.

Ia mencontohkan, jika satu kursi DPRD dikonversi senilai Rp500 juta dan seorang calon bupati membutuhkan dukungan 30 kursi, maka dana yang harus disiapkan untuk mahar politik dapat mencapai sekitar Rp15 miliar.

Setelah mendapatkan rekomendasi, calon masih harus mengeluarkan biaya kampanye yang berkisar Rp10-15 miliar untuk akomodasi dan alat peraga kampanye. Belum lagi praktik

“serangan fajar” atau politik uang yang jumlahnya sangat tergantung dari jumlah pemilih yang dibutuhkan.

Untuk mengamankan suara, calon juga harus menyediakan anggaran bagi saksi di tempat pemungutan suara. Jika ada 6.000 TPS, dengan biaya Rp300 ribu per saksi, maka diperlukan sekitar Rp1,8 miliar. Belum lagi anggaran untuk tim teknologi informasi yang bertugas meng-input hasil perolehan suara.

Peneliti dari Pusat Kajian

Pilkada.

Menurutnya, pembekalan tentang tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan birokrasi sangat penting agar calon pemimpin tidak dibohongi oleh stafnya dan tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

“Yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu,” ujar Tito.

Praswad Nugraha mengingatkan agar maraknya OTT ini tidak dijadikan alasan untuk membatasi demokrasi. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat dapat berjalan beriringan dengan pemberantasan korupsi yang efektif, seperti yang terjadi di negara-negara Skandinavia.

“Oleh karena itu, fokus pembenahan seharusnya diarahkan pada perbaikan tata kelola politik dan penguatan integritas penyelenggara negara, bukan pada pembatasan ruang demokrasi,” ujarnya.

Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai 17 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam periode ini menjadi alarm penting bagi pembenahan sistem demokrasi, khususnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Ada sebuah ironi pahit yang menyelimuti perjalanan demokrasi Indonesia. Di satu sisi, pesta rakyat Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 telah usai, melahirkan para pemimpin baru yang diharapkan membawa perubahan di tingkat lokal. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru sibuk menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para kepala daerah yang baru saja dilantik. 11 kepala daerah terjaring

Daftar Kasus Korupsi Kepala Daerah



Abdul Azis, S.H., M.H.
Bupati Kolaka Timur | Sulawesi Tenggara
Masa Jabatan: 2021 - 2026
Tanggal ditangkap: OTT KPK 8 Agustus 2025
Nilai Korupsi: ±Rp9 Miliar (Fee 8% dari proyek Rp126 M)
Kasus: Dugaan suap proyek pembangunan RSUD Kelas C Kolaka Timur.
Total Kekayaan (LHKPN): Rp7.217.149.804 (Laporan 28 Maret 2024)



H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.
Gubernur Riau
Masa Jabatan: 2025 - 2030
Tanggal ditangkap: OTT KPK 3 November 2025
Nilai Korupsi: ±Rp7 Miliar (Komitmen), Rp1,6 M disita.
Kasus: Dugaan pemerasan/suap "Jatah Preman" di jajaran Dinas PUPR.
Total Kekayaan (LHKPN): Rp4.806.046.622 (Laporan 31 Maret 2024)



H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.
Bupati Ponorogo | Jawa Timur
Masa Jabatan: 2021 - 2025
Tanggal ditangkap: OTT KPK 7 November 2025
Nilai Korupsi: ±2,6 Miliar.
Kasus: Dugaan suap terkait paket pekerjaan di RSUD Harjono, dengan rincian jatah mencapai Rp1,4 miliar.
Total Kekayaan (LHKPN): Rp6.358.428.124 (Laporan 31 Maret 2025)

dalam operasi senyap tersebut bernama OTT itu merupakan rekor yang memalukan dan sekaligus menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam sistem rekrutmen politik di negeri ini.

Fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar kasus hukum individual. Ini adalah gejala sistemik yang berakar dari proses demokrasi yang berbiaya tinggi. Biaya politik yang mahal, yang dimulai dari mahar politik untuk mendapatkan “tiket”

pencalonan hingga praktik politik uang di hari pemungutan suara, telah menciptakan lingkaran setan.

Para kandidat yang mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk terpilih, setelah menduduki kursi kekuasaan, merasa “berhak” untuk mengembalikan modalnya melalui cara-cara yang melanggar hukum. Korupsi menjadi jalan pintas yang paling logis dalam logika mereka yang terdistorsi.

Ultimatum dan Wacana Pembatasan Biaya

Mendagri Tito Karnavian telah lama menyuarakan keprihatinannya terhadap fenomena ini. Bahkan sejak tahun 2019, Tito menyebut bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK bukanlah prestasi.

Ia menyatakan, gampang saja bagi KPK menangkap pejabat daerah yang berpotensi korupsi, karena memang rentan dilakukan demi mengembalikan modal tinggi yang mereka keluarkan saat pilkada.

“Ongkos tinggi itu membuat dia cari balik modal. Sehingga, ya, tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, investigasi, mentarget kepala daerah, sangat mudah sekali. Pasti akan korupsi,” ujarnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada pertengahan 2026, Tito mengemukakan wacana untuk membatasi biaya pilkada melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia berencana mengusulkan pengaturan batasan biaya pilkada untuk menekan praktik korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah setelah terpilih.

Dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah di Surabaya, Tito juga menegaskan bahwa pengawasan 24 jam terhadap kepala daerah tidak mungkin dilakukan, sehingga semua bermuara pada integritas pribadi.

Pernyataan Tito ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Politisi senior Anas Urbaningrum menekankan bahwa yang terpenting adalah konsistensi dalam menegakkan aturan yang sudah ada, terutama terkait praktik mahar politik dan politik uang.

Tito Karnavian

“Pertama, rekomendasi tanpa mahar bukan hanya diucapkan. Tetapi benar-benar dipraktikkan. Kedua, politik uang diawasi dan pelakunya benar-benar disanksi tegas,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto pun tidak tinggal diam. Ia memberikan peringatan keras kepada para pejabat yang masih nekat melakukan korupsi atau menyembunyikan harta kekayaan secara ilegal. Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo menegaskan pemerintahannya akan memanfaatkan teknologi pertahanan paling canggih, termasuk satelit dan radar penembus tanah, untuk membongkar penyelewengan.

“Saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini membuat ruang gerak para pelaku kejahatan keuangan semakin sempit. Ia mengancam akan mengerahkan radar militer yang biasa digunakan untuk mendeteksi ranjau dan melacak bunker-bunker penyimpanan aset hasil korupsi.



“Sekarang ada teknologi, ya. Ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu, saudara-saudara,” tegasnya.

Tak hanya mengincar bunker bawah tanah, Presiden Prabowo juga memperingatkan para pengusaha atau pejabat yang mencoba memanipulasi laporan kepemilikan aset lahan atau perkebunan berskala besar dengan menggunakan citra satelit.

“Jangan main-main sama teknologi, ya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, Prabowo juga menyentil persoalan klasik di lapangan, yakni adanya keterlibatan oknum aparat keamanan yang kerap menjadi pelindung atau *backing* dari berbagai praktik ilegal.

“Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backing-nya. Backing-nya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau, ya cokelat,” kata Prabowo yang langsung disambut tawa riuh dan tepuk tangan dari para anggota dewan.

Prabowo juga menyoroti adanya dana Rp39 triliun yang diduga milik para koruptor dan kriminal yang disimpan di rekening-rekening



tidak jelas, termasuk yang mengatasnamakan istri simpanan. Pemerintah berencana menyita aset-aset tersebut jika setelah diumumkan selama satu tahun tidak ada yang mengklaim.

“Mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut,” ujar Presiden Prabowo.

Reformasi Sistemik

Maraknya OTT kepala daerah ini telah memicu seruan dari berbagai kalangan agar pemerintah dan partai politik melakukan pembenahan sistemik. Ketua Southeast Asia Anti-Corruption Syndicate (SEA Actions), Mochamad Praswad Nugraha, mengingatkan agar maraknya OTT ini tidak dijadikan alasan untuk membatasi demokrasi. Ia menekankan

bahwa demokrasi yang sehat dapat berjalan beriringan dengan pemberantasan korupsi yang efektif, seperti yang terjadi di negara-negara Skandinavia. “Oleh karena itu, fokus pembenahan seharusnya diarahkan pada perbaikan tata kelola politik dan penguatan integritas penyelenggara negara, bukan pada pembatasan ruang demokrasi,” ujarnya.

Praswad menambahkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada besaran biaya kampanye yang sah, melainkan pada biaya-biaya ilegal yang timbul akibat praktik politik uang.

“Jika terus terjadi, praktik politik uang dikhawatirkan akan terus mendorong pejabat yang terpilih untuk mencari cara demi mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses politik,” ungkapnya.

Dari sisi psikologi dan sosiologi, para pelaku umumnya bukanlah orang yang

sejak awal berniat jahat. Mereka bekerja dengan mekanisme pembenaran halus yang menonaktifkan suara hati. “Semua orang melakukannya”, “ini untuk mengembalikan biaya politik”, “sebagian saya sedekahkan”. Namun, apapun pembenarannya, perbuatan korupsi tetap merugikan keuangan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat.

Di ujung tahun 2026 ini, publik masih akan menanti kelanjutan proses hukum terhadap para kepala daerah tersebut. Lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana bangsa ini belajar dari pengalaman pahit ini. Selama partai politik belum serius melakukan kaderisasi, selama biaya politik masih mahal, dan selama penegakan hukum belum memberikan efek jera, maka darurat korupsi di daerah akan terus menjadi bayang-bayang kelam yang menghantui demokrasi Indonesia. ■



PENGARUH JOKOWI MEREDUP, AMANKAH POSISI GIBRAN DAN PSI?

Jokowi terus berupaya memastikan Gibran dua periode bersama Prabowo Subianto. Namun, upaya tersebut sulit terwujud, Jokowi pun melakukan manuver melalui PSI.

Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2029 tinggal dua tahun. Pemilu 2029 menjadi penentu bagi dinasti Joko Widodo (Jokowi) apakah akan tetap eksis atau tersingkir dalam perpolitikan nasional. Sehingga sangat wajar Presiden ke-7 RI ini secara terang-terangan menyatakan diri akan berjuang habis-habisan untuk

memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi menyatakan hal tersebut saat memberikan arahan dalam Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 31 Januari 2026. Bahkan, dengan penuh emosional, Jokowi menyatakan masih sanggup datang ke berbagai tempat di Indonesia untuk memastikan partai yang dipimpin

oleh anaknya, Kaesang Pangerap sukses dalam kontestasi Pemilu 2029 mendatang.

“Kalau diperlukan saya harus datang, saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten/kota, kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup,” tegas Jokowi.

Pernyataan tersebut langsung dibuktikan, Jokowi bersama PSI menggelar Safari Politik di sejumlah wilayah. Provinsi Lampung menjadi tempat pertama dan rencananya akan dilanjutkan ke Nusa Tenggara Timur pada 31 Juli 2026 mendatang.

Safari Politik Jokowi merupakan manuver untuk menguji seberapa besar pengaruh Jokowi usai lepas dari jabatannya sebagai presiden RI. Seperti disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina bahwa kunjungan Jokowi bukan sekadar agenda silaturahmi biasa. Menurutnya, terdapat misi pribadi yang ingin dicapai oleh Jokowi, terutama dalam menguji sejauh mana tingkat popularitasnya di mata publik setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Menurutnya agenda Safari Politik Jokowi ini merupakan pergerakan yang sangat dibutuhkan oleh PSI. Pasalnya, PSI akan sulit menjadi partai yang diperhitungkan jika tidak mendapat suntikan pengaruh langsung dari Jokowi.

“Ini sih bukan tentang relawan Jokowi, kalau Bang Freddy (Sekjen Relawan Projo) itu sudah bisa dia hidup sendiri. Yang belum mampu hidup sendiri itu PSI yang masih sangat membutuhkan Pak Jokowi,” ujarnya dalam program dialog *Overview* yang dipandu jurnalis *Tribunnews* dari kantor redaksi Solo, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026).

Dia pun mengatakan bahwa Safari Politik Jokowi tidak hanya untuk penguatan PSI. Namun, ada hal yang lebih penting adalah untuk investasi politik jangka panjang bagi keluarga Jokowi sendiri. Khususnya bagaimana menyelamatkan karir Gibran dan Kaesang dalam politik kuasa di negeri ini.

“Kita enggak mungkin lupa bagaimana aksi-aksi seorang Jokowi menyelamatkan karir politik anak-anaknya *wabil khusus* Gibran dan Kaesang.”

“Susah sekali dibantah bahwa peran Gibran terpilih sebagai wakil presiden itu karena Jokowi dan peran peran Kaesang Kaesang menjadi ketua umum itu juga peran Jokowi,” tambahnya.

Dia pun menilai langkah yang diambil mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak lain bermuara pada satu aspek fundamental yang dicari oleh setiap mantan penguasa, yaitu jaminan posisi yang aman di masa purnatugas. Sebab, jika melihat kondisi saat ini nama Jokowi sering disebut dalam sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia. Dan, kasus dugaan ijazah palsu menjadi hantu yang selalu membayangi langkah Jokowi dan keluarga ke depannya.

Safari Politik Jokowi tak mulus

Langkah awal safari politik yang dilakukan oleh Jokowi dinilai tidak berjalan sesuai dengan harapan. Safari Politik yang digelar di Lampung pada akhir Juni 2026 tidak berjalan mulus. Bukan meninggalkan kesan positif, namun sebaliknya. Kunjungan tersebut justru memicu gelombang reaksi negatif dan aksi penolakan.

Kedatangan Jokowi di Lampung tidak lagi disambut dengan hangat, namun kehadirannya disambut dengan penolakan.



Muhammad Guntur Romli

Massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Bandar Lampung. Mereka menyampaikan penolakan terhadap safari politik Jokowi sembari mengangkat sejumlah isu, mulai dari dugaan pelanggaran HAM, penegakan hukum, hingga polemik ijazah.

Aksi berlangsung di kawasan Tugu Adipura Kota Bandar Lampung pada Sabtu (27/6/2026) dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Ratusan personel disiagakan membentuk barikade agar massa tidak mendekati lokasi agenda kunjungan Jokowi.

Massa membawa berbagai spanduk dan poster bernada kritik. Di antaranya bertuliskan “Hak Rakyat untuk Melihat Ijazah Asli Jokowi”, “Kami Tolak Kriminalisasi Terhadap Aktivis dan Tokoh Hanya Karena Selebar Ijazah”, hingga “Pak Jokowi, Jika Anda Seorang Negerawan Tunjukkan Ijazahmu di Publik”.

Selanjutnya, safari politik Jokowi di Lampung juga menciptakan kesan arogan. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini secara simbolis seakan-akan ingin merendahkan partai politik tertentu yakni dengan menginjak



kepala kerbau saat dirinya menerima gelar kehormatan adat Lampung di Kedaton Keagungan Lampung, pada Sabtu (27/6/2026).

Foto dan video Jokowi saat meletakkan kaki di atas kepala kerbau pun langsung direspons keras oleh kader dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Guntur Romli menyatakan bahwa tindakan Jokowi yang menginjak kepala hewan kurban merupakan ekspresi dari kesombongan.

Sebab, di dalam tradisi apapun hewan kurban harus tetap diperlakukan dengan hormat. Bukan malah menginjak kepala hewan kurban tersebut.

“Saya juga tidak tahu kalau maksudnya seperti itu, tapi biasanya kalau hewan yang dikurbankan itu dihormati loh, mau dengan acara adat sekalipun, bukan diinjak seperti itu,” ujar Guntur Romli.

Namun, PDIP tidak ingin mengaitkan tindakan Jokowi tersebut sebagai penghinaan terhadap lambang partai. Sebab sudah jelas bahwa

lambang PDI Perjuangan adalah kepala banteng bukan kepala kerbau. “Biarkan rakyat yang nilai. Tapi bagi kami logo PDI Perjuangan itu banteng, bukan kerbau, bukan sapi. Banteng itu satwa yang dilindungi yang tidak mungkin dijadikan kurban atau tumbal,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua DPP PSI Bestari Barus menjelaskan, foto Jokowi yang viral menginjak kepala kerbau saat berkunjung ke Lampung adalah prosesi adat. Dalam momen itu, kata Bestari, Jokowi sedang menerima gelar kehormatan adat Lampung.

“Kenapa posisinya seperti itu? Itu kan adat budaya kita gitu, bagian daripada adat budaya. Dan enggak mungkin Pak Jokowi kemudian melakukan hal-hal yang di luar daripada adat budaya tersebut,” ujar Bestari kepada wartawan, Minggu, 28 Juni 2026.

Menurut Bestari, jika ada pihak-pihak yang menyindir prosesi itu sama seperti menghina budaya tersebut. Dia meminta, foto Jokowi menginjak kepala kerbau jangan ditafsirkan

dengan arti yang lain.

Bestari menekankan tidak ada unsur kesengajaan dari Jokowi dengan menginjak kepala kerbau. Hal itu semata-mata hanya menjalani budaya adat. “Ya itu tokoh-tokoh masyarakat sana yang mengundang. Jadi Pak Jokowi diberikan atribut, diberikan gelar baginda apa lah gitu ya, dan kemudian ada orang yang menghina adat budaya Lampung. Kader PDI-P gitu. Kan sungguh sangat tidak bijak. Jangan sembaranganlah memberikan predikat-predikat gitu,” jelasnya.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, jika ditafsirkan secara politik ritual Jokowi menginjak kepala kerbau di Lampung menjadi simbol bahwa PSI siap melawan dan menumbangkan dominasi PDIP di Lampung.

Menurutnya, penggunaan simbol kepala kerbau yang diinjak kaki Jokowi dalam safari politiknya di Lampung itu tidak bisa dianggap sekadar prosesi adat biasa.

“Simbolis kepala kerbau yang digunakan dalam ritual dan identik dengan logo PDIP, banyak tafsir yang ingin Jokowi sampaikan,” kata Hari seperti dikutip *RMOL*, Minggu, 28 Juni 2026.

Dia menganalisis, dengan posisi baru Jokowi sebagai Dewan Pembina



Bestari Barus

PSI, manuver teatrikal tersebut merupakan bentuk komunikasi politik tingkat tinggi terkait peta persaingan dengan PDIP.

Secara vulgar, Hari mengibaratkan ritual tersebut seperti pertarungan antara kekuatan baru melawan sang petahana. “Dengan posisi Jokowi sebagai pembina PSI, bisa saja itu bagian dari bahasa politik bahwa PSI mampu bersaing dengan PDIP. Atau jelasnya Gajah mampu menginjak Banteng. Jadi Jokowi ingin mengatakan bahwa PSI mampu mengatasi dan bersaing dengan PDIP,” terang Hari blak-blakan.

Meski membaca adanya sinyal konfrontasi dan unjuk kekuatan, Hari tidak menampik adanya sisi psikologis lain di balik pilihan simbol tersebut. Ada kemungkinan tersisa romantisasi masa lalu antara Jokowi dengan partai yang telah membesarkan namanya hingga menjadi presiden dua periode.

“Dengan kata lain, Jokowi sejujurnya mungkin masih sayang dengan PDIP, sehingga simbolnya masih digunakan dalam acara ritualnya,”katanya.

Tidak hanya di Lampung, rencana agenda safari politik Jokowi di Jawa Barat juga disambut dengan penolakan. Masa yang tergabung dalam Gerakan Umat Melawan Kezaliman dan Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GAUM-K dan GMKR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 14 Juli 2026.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana safari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di wilayah Jawa Barat. Dalam aksi itu, peserta membentangkan spanduk berisi berbagai tuntutan serta menyampaikan orasi di depan gerbang DPRD Jawa Barat.

Koordinator lapangan aksi, Hari Nugraha mengatakan, penolakan tersebut dilatarbelakangi sejumlah alasan yang menurut mereka masih menjadi persoalan. Salah satunya berkaitan dengan polemik mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut mereka, kasus ini hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum apakah ijazah Jokowi asli atau palsu.

Tidak berhenti di Jawa Barat, penolakan safari politik Jokowi juga digaung di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan sikap penolakan tersebut disampaikan secara tegas oleh mantan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) NTT, Hildebertus Seli.

Aksi penolakan tersebut wujud rasa kekecewaan mereka. Mereka menganggap Jokowi telah mengkhianati perjuangan. Padahal mereka sudah berjuang habis-habisan untuk mengawal Jokowi selama dua periode. Namun, di penghujung masa kekuasaannya, Jokowi yang dahulu menjadi harapan itu tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang diperjuangkan.

“Saya melihat arah politik yang

berkembang justru membuat saya mempertanyakan komitmen terhadap demokrasi, etika kekuasaan, dan semangat reformasi,” ujarnya, Kamis, 30 Juli 2026.

Secara tegas, pria kelahiran Flores tersebut menyatakan bahwa perjuangannya bersama rekan-rekan relawan Jokowi telah disia-siakan. Baginya, sikap politik Jokowi justru menimbulkan kesan bahwa kepentingan kekuasaan ditempatkan di atas kualitas demokrasi.

Selanjutnya dia mengakan bahwa Safari Politik Jokowi tidak dibutuhkan oleh rakyat yang saat sedang menghadapi berbagai kesulitan.

Sehingga, rakyat tidak butuh pencitraan politik atau manuver untuk menjaga popularitas.





Rakyat, saat ini membutuhkan sikap kenegarawanan, tanggung jawab moral, dan dukungan nyata terhadap pemerintahan yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

“Saya tidak akan diam hanya karena pernah menjadi relawan. Kesetiaan kepada demokrasi harus lebih besar daripada kesetiaan kepada seorang tokoh,” tegasnya.

Apakah Gibran mulai tersingkir?

Kurangnya antusias masyarakat menyambut safari politik Jokowi menjadi pertanda bahwa pengaruh Presiden ke-7 RI kian meredup. Hal ini menjadi alarm bahaya bagi PSI dan Gibran menuju kontestasi Pemilu 2029 mendatang. Semakin meredupnya pengaruh Jokowi, PSI dan Gibran harus bekerja ekstra keras meyakinkan masyarakat, sehingga pada Pemilu mereka akan mendapatkan tingkat elektoral yang tinggi.

Jokowi pun menyadari betul bahwa peluang Gibran untuk memenangkan Pilpres 2029 sangat kecil jika harus bertarung secara terbuka dengan Prabowo. Sehingga untuk mengamankan posisi Gibran agar tetap mendapatkan kursi kekuasaan



Prasetyo Hadi

sejak awal Jokowi secara terbuka dan tegas memberikan dukungan dua periode kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, sikap politik Jokowi tersebut sampai detik ini tak kunjung mendapatkan respons dari Prabowo Subianto. Prabowo memilih diam, malah lebih terlihat menunjukkan kedekatan dengan para ketua partai politik koalisi pemerintahan. Hal ini menunjukkan sinyal bahwa Ketua Umum Partai Gerindra ini sedang menjaga jarak dengan Gibran.

Sejumlah kejadian menjelaskan kondisi tersebut. Dan yang terbaru dan menjadi perbincangan publik saat Gibran tidak lagi duduk di samping Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna

di Istana Negara pada 20 Juli 2026. Tempat duduk Gibran disejajarkan satu baris dengan para menteri koordinator, sementara Prabowo berada di posisi tengah.

Sebagai perbandingan, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang juga berlokasi di Istana Negara pada 13 Maret 2026 lalu, kursi Gibran sejajar dengan Prabowo. Saat itu, ia duduk satu meja dengan Prabowo, tepatnya di sisi kiri sang Kepala Negara.

Sehingga, dari peristiwa tersebut publik pun semakin yakin bahwa hubungan Prabowo dan Gibran tidak lagi solid.

Namun, Istana membantah keretakan hubungan antara Prabowo dan Gibran. Seperti disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa perubahan tata letak kursi hanya persoalan kebutuhan teknis. Jangan ditafsirkan liar yang menyimpulkan bahwa terjadi keretakan diantara Prabowo dan Gibran.

“Tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan,” ucap Prasetyo kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.

Dia menjelaskan bahwa dalam sidang kabinet kemarin Prabowo ingin memaparkan hasil evaluasi program prioritasnya sekaligus capaian selama sekitar 21 bulan masa pemerintahannya. Menurut Prasetyo, pemaparan Presiden perlu didukung oleh data yang ditampilkan melalui teleprompter.

Maka dari itu, Prabowo duduk di hadapan jajaran pembantunya di Kabinet. “Secara layout kalau kemarin diperhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut



kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata,” tutur Prasetyo.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini membantah anggapan bahwa perubahan tata letak kursi keduanya berkaitan dengan ketidaksetaraan antara sang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dia menegaskan pemerintahan yang dipimpin Prabowo-Gibran tetap solid. Selain itu, seluruh jajaran kabinet juga berfokus menjalankan program-program prioritas nasional.

“Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden, menjadi garis dari program kerja dan prioritas nasional semata-mata semua untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pengamat

komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan berubahnya posisi tempat duduk Gibran yang tidak lagi berada di samping Prabowo pasti akan menjadi menjadi perbincangan publik.

Menurutnya, perbincangan publik didominasi dengan persepsi bahwa hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sedang tak baik-baik saja.

“Wajar bila hal itu menimbulkan spekulasi politik. Publik bisa saja menilai hal itu sebagai indikasi hubungan presiden dan wakil presiden sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya, Rabu, 22 Juli 2026.

Selain ini, menurutnya persepsi renggangnya hubungan keduanya juga diperkuat dari foto Gibran yang duduk bersebelahan dengan Airlangga Hartarto. Ia menilai dalam foto itu

wajah Gibran terkesan agak tegang.

Padahal selama ini wajah Gibran dalam foto kerap tenang, bahkan cenderung santai. “Perubahan wajah tersebut memberi kesan Gibran dalam rapat tersebut kurang nyaman,” katanya.

Selanjutnya dia menjelaskan, selama ini sidang kabinet selalu menempatkan presiden duduk berdampingan dengan wakil presiden. Ia menyebut hal itu sesuai aturan protokoler. Presiden duduk di sebelah kanan, dan wakil presiden duduk disamping kiri presiden.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa hal tersebut hanya dimaknai sebagai indikasi. Seperti apa hubungan Prabowo dan Gibran, menurutnya hanya mereka berdua yang tahu.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik



Jamiluddin-Ritonga

Indonesia, Adi Prayitno. Menurutnya perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.

Spekulasi yang berkembang di tengah publik bahwa posisi Gibran sebagai wakil presiden secara perlahan sedang disingkirkan.

“Jangan-jangan ini menjadi tanda-tanda bahwa posisi wakil presiden semakin terpinggirkan, tidak mendapatkan tempat, dan seterusnya,” kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Rabu, 22 Juli 2026.

Menurut Adi, di media sosial bahkan berkembang narasi yang mengaitkan pengaturan posisi duduk tersebut dengan hubungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

“Ada juga di media sosial yang membangun narasi, jangan-jangan ini menjadi garis tegas bahwa sebenarnya hubungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa spekulasi tersebut belum tentu benar. Ia juga mengutip penjelasan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan pengaturan posisi duduk dalam sidang kabinet semata-mata dilakukan karena kebutuhan teknis dan tidak berkaitan dengan persoalan politik.

Kendati demikian, Adi mengakui isu tersebut telah berkembang menjadi perbincangan hangat di media sosial. “Tentu saya tidak mau berspekulasi. Tapi sebagai warga negara biasa tentu berharap semoga semuanya baik-baik saja, dan rasa-rasanya hubungan Presiden dan Wakil Presiden itu baik-baik saja,” tandasnya.

Relawan Gibran bermunculan

Posisi duduk Gibran yang tidak berada di samping Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026 tidak bisa dibaca secara pasti apakah hubungan Prabowo dan Gibran tidak lagi solid. Namun, itu hanya spekulasi bisa jadi benar dan bisa jadi salah.

Pasalnya hingga saat ini belum ada indikator vulgar, Prabowo dan Gibran benar-benar pecah kongsi. Belum ada pernyataan terbuka saling menyerang.

Namun, ada fakta menarik dengan mulai bermunculannya kelompok-kelompok relawan secara khusus mengonsolidasikan dukungan untuk Gibran. Sebutnya saja munculnya relawan GP-Gibran (Garda Pemuda Generasi Indonesia Bersatu untuk Rakyat dan Nusantara).

Relawan yang diketuai oleh Perri Sibarani mengklaim telah terbentuk di 38 provinsi, menjangkau hampir setengah dari 416 kota/kabupaten, memiliki sekitar 10 ribu anggota, dan secara terbuka menyatakan tujuan mendorong Gibran menjadi Presiden ke-9 Republik Indonesia.

Selain itu, muncul relawan yang menamakan dirinya Jaringan Nasional Go Gibran. Secara terang-terangan Sekretaris Jenderal Jaringan Nasional Go Gibran Azwar Muhammad menyebut bahwa Gibran adalah sosok yang tepat untuk maju sebagai calon presiden. Pasalnya Gibran dapat membawa kepentingan anak muda di Indonesia.

“Zaman sudah berubah sekarang. Yang mampu menjawab persoalan anak muda ada pada Mas Gibran. Sosok anak muda yang benar-benar muda,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan anak-anak muda sekarang sangat jauh berbeda dengan anak dulu. Cita-cita anak muda dulu ingin jadi presiden, insinyur, dan dokter. Sementara saat ini, ada yang mau jadi youtuber atau konten kreator.

“Semua capres-cawapres harus





memikirkan dan memformulasikan program-program yang berdampak langsung pada kehidupan anak muda,” katanya.

Adanya juga relawan Militan Gibran Nusantara (MGN) yang dipimpin Andi Azwan. Organisasi dideklarasikan pada 20 Mei 2026 di Jakarta ini juga telah membentuk kepengurusan di 38 provinsi dengan target memperluas jaringan hingga seluruh Indonesia.

Fokusnya mengawal program pemerintahan Prabowo-Gibran serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Menariknya, banyak pengurusnya berasal dari jaringan relawan Jokowi, termasuk Andi Azwan merupakan mantan Wakil Ketua Joman.

Ada pula Gibranisti, komunitas relawan lebih cair dan berbasis

dukungan akar rumput, terutama melalui media sosial dan aktivitas komunitas. Walaupun tidak seformal GP-Gibran maupun MGN, kelompok ini tetap aktif membangun citra politik Gibran sebagai figur muda penerus Jokowi.

Munculnya relawan-relawan pendukung Gibran for RI 1 jika dibaca secara politik memperlihatkan bahwa posisi Gibran untuk kembali dipasangkan dengan Prabowo sangat kecil. Sehingga diperlukan perahu baru bagi Gibran agar bisa tatap berkompetisi pada Pilpres 2029 mendatang sebagai penantang Prabowo.

Seperti disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, kemunculan

relawan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di berbagai daerah merupakan bagian dari strategi politik untuk membangun persepsi, bahwa Gibran memiliki basis dukungan yang kuat menjelang Pemilihan Presiden 2029.

Menurutnya, strategi tersebut dilakukan di tengah hasil sejumlah survei yang disebut masih menunjukkan tingkat elektabilitas Gibran yang relatif rendah.

Pembentukan jaringan relawan dinilai berkaitan dengan upaya meningkatkan posisi tawar Gibran dalam konstelasi politik nasional, termasuk dalam kemungkinan konfigurasi pasangan calon pada Pilpres mendatang.

Menurutnya langkah tersebut tidak lepas dari hasil sejumlah survei yang menurutnya, belum menempatkan Gibran pada posisi yang kuat dibandingkan tokoh politik lainnya. Kondisi itu membuat para pendukung Gibran berupaya membangun citra bahwa Wakil Presiden memiliki dukungan akar rumput yang besar di berbagai wilayah.

Dia pun mengaitkan kemunculan relawan tersebut dengan intensitas safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke sejumlah daerah. Dia menilai, kedua langkah itu saling melengkapi untuk memperkuat persepsi politik mengenai posisi Gibran menjelang 2029.

Jamiluddin mengakui, pesan utama yang ingin dibangun adalah bahwa Gibran merupakan figur yang layak diperhitungkan dalam kontestasi politik nasional dibandingkan kandidat lainnya. Menurutnya, melalui cara ini para relawan bisa mendorong Gibran kepada Prabowo, bahwa jika tidak memilih Gibran, maka Prabowo keliru. ■

PRODUKSI MINYAK NAIK DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Bagaimana keputusan OPEC+ untuk menaikkan target produksi mulai September 2026 menguji pasar yang masih bergelora oleh konflik dan serangan terhadap fasilitas energi

Keputusan OPEC+ pada akhir Agustus 2026 untuk menaikkan target produksi mulai September muncul sebagai respons kolektif terhadap tekanan pasokan yang dirasakan di pasar minyak global. Di ruang rapat, angkaangka kuota dan proyeksi teknis menjadi fokus; di pasar, reaksi datang dari berita lapangan—serangan drone, gangguan jalur pengapalan, dan kerusakan fasilitas pengolahan—yang mampu mengubah harga dalam hitungan jam. Pernyataan ringkas dari laporan pemantauan pasar menyatakan, “Keputusan untuk menaikkan target produksi

mulai September dimaksudkan untuk merespons tekanan pasokan dan menstabilkan harga.” Kalimat ini menempatkan langkah kolektif tersebut sebagai upaya meredam lonjakan harga, namun juga mengakui batasan nyata yang mengiringi implementasi kebijakan semacam itu.

Menetapkan kuota berbeda dengan merealisasikan produksi. Realisasi tambahan output bergantung pada kapasitas teknis, kesiapan lapangan, dan keamanan infrastruktur. Banyak negara anggota OPEC+ menghadapi keterbatasan investasi, masalah teknis, atau kendala logistik yang membuat peningkatan output menjadi proses bertahap. Beberapa negara memilih menahan produksi meski kuota dinaikkan karena pertimbangan fiskal domestik. Oleh karena itu, pasar tidak hanya menilai keputusan kuota, tetapi juga menilai apakah kuota itu akan diterjemahkan menjadi barel yang benar-benar tersedia untuk pengiriman.

Sentimen pasar tetap menjadi penentu utama pergerakan harga dalam jangka pendek. Trader dan manajer portofolio bereaksi cepat terhadap berita geopolitik; posisi derivatif dan leverage memperbesar dampak berita tersebut sehingga laporan tentang insiden keamanan sering kali memicu lonjakan volatilitas yang tajam. Laporan pemantauan





pasar menegaskan bahwa “pasar tetap bergelora akibat konflik yang sedang berlangsung dan serangan terhadap infrastruktur energi.” Ungkapan ini merangkum dilema yang dihadapi pelaku pasar: meskipun pasokan dapat ditambah secara kuantitatif, risiko fisik dan ketidakpastian geopolitik dapat meniadakan atau bahkan membalikkan efek stabilisasi yang diharapkan.

International Energy Agency menempatkan keputusan OPEC+ dalam kerangka yang lebih luas. IEA mengingatkan bahwa pasokan tambahan memang dapat membantu

meredakan tekanan harga jangka pendek, tetapi sentimen pasar tetap rapuh karena ketegangan geopolitik yang berlanjut dan gangguan terhadap kapasitas penyulingan di beberapa wilayah. Pernyataan IEA menyatakan, “Meskipun pasokan tambahan dapat membantu meredakan tekanan harga jangka pendek, sentimen pasar tetap rapuh mengingat ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung dan gangguan terhadap kapasitas penyulingan di beberapa bagian Eropa.” Pernyataan ini menegaskan bahwa stabilitas harga bukan hanya soal jumlah barel yang tersedia,

melainkan juga soal kepercayaan pasar terhadap kelangsungan aliran pasokan dan kemampuan fasilitas pengolahan untuk memproses minyak menjadi produk yang dibutuhkan konsumen.

Dua titik geopolitik utama menekan pasar saat ini: Timur Tengah dan Ukraina. Timur Tengah, sebagai pusat produksi dan jalur pengapalan strategis, selalu menjadi sumber premi risiko. Gangguan terhadap Selat Hormuz atau serangan terhadap fasilitas lepas pantai dapat memotong aliran minyak mentah secara signifikan. Di Eropa Timur, serangkaian serangan terhadap kilang dan fasilitas



energi di Ukraina telah mengganggu aliran produk minyak dan bahan bakar ke pasar regional, memaksa beberapa negara mencari pasokan alternatif dari luar kawasan. Dampak semacam ini tidak hanya bersifat lokal; perubahan rute perdagangan dan kenaikan biaya logistik dapat merambat ke pasar global dan menambah tekanan harga.

Pernyataan resmi OPEC+ yang mengumumkan kenaikan kuota menegaskan tujuan stabilisasi pasar. Communiqué OPEC+ menyatakan, “Kelompok ini telah sepakat untuk menaikkan target produksi mulai September guna mengatasi tekanan pasokan dan mendukung stabilitas pasar.” Pernyataan ini menempatkan langkah kolektif sebagai respons terhadap tekanan yang sudah terasa di pasar, namun communiqué tersebut juga mengakui batasan implementasi karena realisasi tambahan produksi

bergantung pada kapasitas teknis dan kesiapan lapangan masing-masing negara anggota.

Suara dari negaranegara produsen memperlihatkan keseimbangan antara niat politik dan realitas teknis. Arab Saudi menegaskan komitmen terhadap stabilitas pasar dan kesiapan bekerja sama dengan mitra untuk memastikan pasokan tambahan sampai ke pasar sesuai kebutuhan. Pernyataan resmi Riyadh menyatakan, “Arab Saudi tetap berkomitmen pada stabilitas pasar dan akan bekerja sama dengan mitra untuk memastikan pasokan tambahan sampai ke pasar sesuai kebutuhan.” Di sisi lain, perwakilan kementerian energi Rusia mengingatkan bahwa setiap kenaikan harus mencerminkan kemampuan produksi yang nyata dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut berbunyi, “Kami akan berkoordinasi erat dengan mitra OPEC+, tetapi

setiap kenaikan harus mencerminkan kemampuan produksi nyata dan berkelanjutan.” Kedua sikap ini mencerminkan dinamika OPEC+: ada dorongan politik untuk menenangkan pasar, namun ada pula kehati-hatian teknis yang menuntut bukti kapasitas.

Dampak keputusan OPEC+ terasa berbeda di berbagai wilayah. Bagi negaranegara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kombinasi harga minyak global dan kebijakan domestik menentukan beban fiskal dan kesejahteraan sosial. Indonesia, meski merupakan produsen minyak, masih bergantung pada impor produk minyak tertentu sehingga fluktuasi harga internasional dapat memperbesar beban subsidi atau menekan anggaran negara jika harga domestik dipertahankan. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan memantau perkembangan dan

menggunakan cadangan strategis serta langkah fiskal untuk melindungi konsumen bila diperlukan. Pernyataan resmi menyebutkan, “Indonesia akan memantau perkembangan dengan cermat dan menggunakan cadangan strategis serta langkah fiskal untuk melindungi konsumen bila diperlukan.” Pendekatan ini menunjukkan kombinasi kebijakan pasokan, fiskal, dan cadangan strategis sebagai alat mitigasi.

Melihat ke depan, beberapa skenario layak dipertimbangkan. Dalam skenario optimis, negaranegara OPEC+ merealisasikan tambahan produksi sesuai kuota, gangguan geopolitik tidak meluas, dan permintaan global tidak mengalami lonjakan tak terduga. Dalam kondisi ini, tambahan pasokan dapat meredam lonjakan harga dan memberi ruang bagi stabilitas jangka menengah. Namun skenario ini mengandaikan realisasi produksi berjalan lancar dan risiko geopolitik tetap terkendali. Sebaliknya, skenario pesimis menggambarkan eskalasi konflik di Timur Tengah atau gangguan

berkelanjutan pada fasilitas energi di Ukraina sehingga gangguan pasokan melampaui kapasitas penutup dari kenaikan produksi. Dalam skenario tersebut, pasar akan mengalami lonjakan harga yang tajam, memicu tekanan inflasi global dan menekan pertumbuhan ekonomi. Antara dua ekstrem itu, yang paling mungkin terjadi dalam jangka pendek adalah skenario transisi: volatilitas tinggi, harga bergerak dalam rentang lebar, dan kebijakan fiskal serta cadangan strategis diuji.

Respons yang efektif memerlukan kombinasi langkah. Pemerintah perlu memperkuat cadangan strategis dan menyusun kebijakan fiskal yang adaptif sehingga anggaran tidak runtuh saat harga melonjak. Perusahaan energi harus memperkuat manajemen risiko melalui hedging dan investasi pada keamanan infrastruktur. Kerja sama regional juga penting: mekanisme saling bantu pasokan dan koordinasi logistik dapat meredam dampak guncangan sementara. Di pasar keuangan, transparansi data produksi

dan pengiriman akan membantu meredam spekulasi yang berlebihan; pelaku pasar membutuhkan sinyal implementasi yang jelas, bukan sekadar janji kuota.

Keputusan OPEC+ untuk menaikkan target produksi mulai September 2026 adalah langkah penting yang menunjukkan upaya kolektif untuk menambah pasokan dan menstabilkan pasar. Namun keputusan administratif itu bukan obat mujarab. Konflik di Timur Tengah dan serangan terhadap fasilitas energi di Ukraina tetap menjadi pemicu volatilitas. Dalam jangka pendek, pasar kemungkinan akan terus bergerak volatil, bereaksi terhadap berita keamanan dan data permintaan. Dalam jangka menengah, efektivitas kebijakan OPEC+ akan bergantung pada realisasi produksi, kondisi logistik, dan perkembangan geopolitik. Bagi negaranegara importir, kombinasi kebijakan fiskal yang adaptif, cadangan strategis yang memadai, dan percepatan diversifikasi energi menjadi kunci untuk mengurangi kerentanan. Bagi pelaku pasar, manajemen risiko dan kesiapan operasional menjadi penentu daya tahan menghadapi guncangan.

Di akhir hari, kuota adalah salah satu alat dalam kotak kebijakan energi global, tetapi stabilitas pasar menuntut lebih dari angka. Bukti di lapangan, keamanan infrastruktur, dan kerja sama lintas negara yang mampu meredam dampak kejutan menjadi penentu utama. Sampai buktibukti itu terlihat, pasar akan terus menimbang setiap berita, dan setiap insiden akan diuji oleh pertanyaan yang sama: apakah tambahan pasokan benar-benar tersedia, dan dapatkah rantai pasok global menahan guncangan berikutnya? ■





REKOR YANG MENGGUNCANG:

SUHU EKSTREM DAN PERINGATAN GLOBAL

Agustus 2026 menorehkan catatan kelam dalam sejarah iklim dunia. Bulan ini bukan sekadar panas, melainkan sebuah peringatan keras bahwa perubahan iklim telah beralih dari ancaman masa depan menjadi kenyataan yang sedang berlangsung. Dari Asia hingga Amerika, dari Afrika Utara hingga Eropa, suhu melonjak ke angka yang sebelumnya hanya ada dalam simulasi komputer. Kini, dunia benar-benar mengalaminya.

“Kami belum pernah melihat kondisi seperti ini sebelumnya.” ujar Kenji Nakamura, pejabat Badan Meteorologi Jepang, ketika negaranya mencatat lima hari berturut-turut dengan suhu di atas 40°C. Di Korea Selatan, Yangsan mencapai 42,5°C, rekor tertinggi dalam 122 tahun.

Eropa pun tak luput. Prancis dan Inggris menghadapi gelombang panas kelima sejak Mei, dengan suhu mendekati 40°C. Western Europe mencatat rata-rata suhu

Juni–Juli 21,62°C, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sungai Rhine dan Danube surut drastis, mengganggu pengiriman barang dan memaksa penutupan reaktor nuklir di Hungaria. “Transportasi air kami lumpuh, dan energi terancam.” kata **István Horváth**, pejabat energi Hungaria. Di Afrika Utara, Mesir bagian selatan mendekati 47°C, sementara kota-kota besar menghadapi kombinasi panas dan kelembapan berbahaya. Pemerintah Kairo mengeluarkan peringatan



kesehatan publik, meminta warga tetap berada di dalam ruangan. “Kami menghadapi ancaman kesehatan massal,” kata Dr. Layla Hassan, Menteri Kesehatan Mesir.

Amerika Utara dilanda heat dome yang menjerat barat Amerika Serikat dengan suhu 115–118°F (46–48°C). Las Vegas mencapai 46°C, sementara Phoenix melaporkan lebih dari 1.000 kasus heatstroke dalam seminggu. “Ini bukan lagi sekadar musim panas. Ini adalah krisis kesehatan,” ujar Mayor Kate Gallego, Wali Kota Phoenix. Rumah sakit di Roma, New Delhi, dan Phoenix melaporkan lonjakan pasien hingga tiga kali lipat. “Kami bekerja di luar kapasitas,” kata Maria Bianchi, perawat di Roma.

Dampak sosial dan ekonomi terasa nyata. Permintaan listrik melonjak, memicu pemadaman bergilir di beberapa negara. Di Jepang, konsumsi listrik mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Panas ekstrem dan kekeringan menekan hasil panen gandum dan jagung hingga turun 15%. Di India, petani mengeluhkan gagal panen. “Tanah kami retak, air

tidak ada, panen hilang,” kata Ramesh Kumar, petani di Uttar Pradesh. Sungai-sungai besar di Eropa surut drastis, menghambat pengiriman barang, sementara jalur kereta di Spanyol rusak akibat rel yang melengkung karena panas.

Suara para pemimpin dunia dan ilmuwan menggema di tengah krisis ini. Sekjen PBB António Guterres memperingatkan. “El Niño bukan hanya di depan pintu – ia sudah masuk ke rumah dan menyalakan api.” Zeke Hausfather dari Berkeley Earth menegaskan. “Dunia kembali terbakar oleh perubahan iklim dengan cara yang semakin sulit diabaikan.

Ini akan terus memburuk,” Dr. Elena Rossi dari European Environment Agency menambahkan. “Kita tidak lagi melihat s k e n a r i o terburuk di komputer. Kita sedang

mengalaminya.” Lee Min-jun, seorang pemimpin Asia, mengaitkan krisis iklim dengan tanggung jawab sosial. “Kita harus bekerja bersama untuk memastikan bumi tetap layak huni.”

Gelombang panas Agustus 2026 bukan sekadar fenomena musiman. Ia adalah bukti nyata bahwa perubahan iklim telah mencapai titik kritis. El Niño yang menguat memperburuk tren pemanasan global, menciptakan kondisi ekstrem yang melampaui kapasitas adaptasi banyak negara. Dampaknya terasa di semua sektor: kesehatan, energi, pangan, hingga transportasi. Uni Eropa mempercepat transisi energi terbarukan dan memperkuat sistem peringatan dini. Amerika Serikat mengumumkan paket bantuan darurat untuk kota-kota yang terdampak heat dome. Jepang dan Korea Selatan membuka

ribuan pusat perlindungan panas. Namun, tantangan besar tetap ada: pendanaan, koordinasi global, dan komitmen politik. ■

Antonio Guterres



SAHAM PIALA DUNIA:

KETIKA AMBISI FIFA MENGUJI BATAS SEPAK BOLA DUNIA

Ketika wacana penjualan sekitar dua puluh persen saham komersial Piala Dunia pertama kali muncul, itu bukan sekadar rencana bisnis; itu adalah pemicu krisis legitimasi yang mengguncang tatanan sepak bola internasional. Gagasan untuk mengubah salah satu aset olahraga paling ikonik menjadi instrumen investasi menarik perhatian modal besar dan memancing reaksi keras dari federasi, klub, pemain, dan publik. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjadi wajah publik dari inisiatif ini dan berkali-kali menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah memperluas manfaat Piala Dunia ke seluruh penjuru dunia. “Kami ingin semua negara merasakan manfaat Piala Dunia, bukan hanya segelintir negara kaya,” ujar Gianni Infantino.

Latar belakang gagasan ini berakar pada tekanan finansial dan kebutuhan diversifikasi pendapatan yang dirasakan oleh badan olahraga global setelah dekade pertumbuhan hak komersial yang fluktuatif. Dokumen internal dan pernyataan awal yang bocor ke media menunjukkan bahwa model yang diusulkan akan mengemas hak komersial Piala Dunia dalam sebuah entitas terpisah dan menawarkan sebagian sahamnya kepada investor institusional untuk mendapatkan modal awal yang besar. Rencana teknis itu memicu



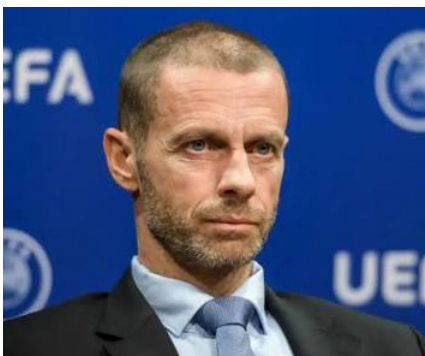
Gianni Infantino

perdebatan hukum tentang status aset publik olahraga dan batasan tata kelola yang harus diterapkan pada investor eksternal. Sumber yang sama mencatat bahwa angka sekitar dua puluh persen berasal dari perhitungan proyeksi arus kas lima tahun yang disusun oleh konsultan keuangan eksternal yang bekerja sama dengan FIFA.

Di Eropa, reaksi keras datang dari UEFA dan para pemangku kepentingan utama di benua yang menguasai pasar komersial sepak bola global. Aleksander Čeferin, Presiden UEFA, menolak gagasan itu dengan tegas dan menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh dikendalikan oleh investor semata. “Sepak bola adalah budaya,

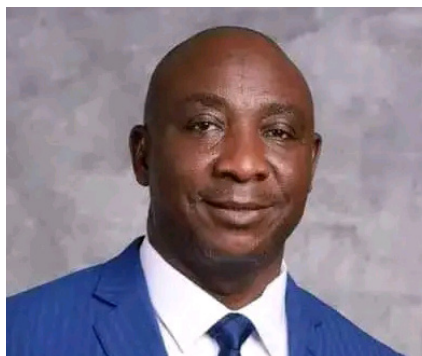
bukan sekadar saham di pasar,” tukas Aleksander Čeferin. Pernyataan resmi UEFA yang dipublikasikan menyertakan analisis dampak terhadap kalender kompetisi Eropa dan proyeksi penurunan pendapatan hak siar klub jika perhatian global terpecah oleh kepemilikan komersial yang baru. Laporan internal UEFA yang dirilis bersamaan memperkirakan potensi penurunan nilai hak siar Liga Champions hingga persentase dua digit dalam skenario paling ekstrem.

Di Afrika, suara yang lebih pragmatis muncul dari federasi yang selama ini bergantung pada aliran solidaritas FIFA untuk membiayai program pengembangan. Ibrahim Gusau,



Aleksander Čeferin

Presiden Federasi Sepakbola Nigeria, menyatakan bahwa mereka melihat peluang dari aliran dana baru untuk pembangunan stadion dan program usia muda, tetapi menekankan perlunya mekanisme transparan. “Kami ingin pembangunan tetap berjalan, meski jalannya bukan lewat penjualan saham,” ungkap Ibrahim Gusau. Pernyataan ini mencerminkan temuan survei cepat yang dilakukan oleh beberapa media terhadap federasi



Ibrahim Gusau

Afrika, di mana mayoritas responden menyatakan dukungan bersyarat terhadap setiap mekanisme yang menjamin aliran dana langsung ke proyek pembangunan.

Di Amerika Selatan, CONMEBOL memperingatkan dampak negatif terhadap kompetisi regional. Alejandro Domínguez, Presiden CONMEBOL, memperingatkan bahwa penjualan saham Piala Dunia berpotensi menggerus nilai kompetisi regional



Alejandro Domínguez

seperti Copa América. “Kami tidak bisa membiarkan Piala Dunia menjadi monopoli finansial yang menelan semua perhatian,” ujar Alejandro Domínguez. Analisis yang dikutip oleh media regional menunjukkan bahwa sponsor utama Copa América dan mitra hak siar telah mengadakan pertemuan darurat untuk menilai eksposur kontrak mereka terhadap perubahan struktur komersial Piala Dunia.

Di Asia, posisi AFC yang dipimpin Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menunjukkan dukungan berhati-hati terhadap investasi yang dapat memperkuat liga domestik dan infrastruktur, namun menuntut jaminan tata kelola. “Kami ingin Asia menjadi bagian penting dari panggung dunia, dan investasi bisa membantu mewujudkannya,” ungkap Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Dokumen yang beredar menyebutkan bahwa AFC mengajukan proposal amandemen pada mekanisme pembagian pendapatan yang akan memastikan persentase tetap dialokasikan untuk proyek regional sebelum distribusi ke pemegang saham komersial.

Ancaman boikot menjadi titik kritis yang mengubah dinamika negosiasi. Ketika UEFA dan CONMEBOL mulai mengisyaratkan kemungkinan tidak mengirimkan tim ke Piala Dunia jika struktur kepemilikan baru mengikis peran federasi, dunia sepak bola menghadapi skenario yang hampir tak terbayangkan: turnamen global tanpa beberapa kekuatan sepak bola terbesar. “Kami tidak akan ragu mengambil langkah tegas demi menjaga tradisi dan integritas sepak bola,” tukas Aleksander Čeferin. “Jika suara kami diabaikan, maka kami akan mempertimbangkan untuk tidak ikut serta,” ujar Alejandro Domínguez. Ancaman boikot ini segera memicu perhitungan ulang oleh investor potensial karena ketidakhadiran tim-tim Eropa atau Amerika Selatan akan memangkas nilai hak siar dan sponsor secara signifikan. Laporan pasar yang dikutip di halaman yang Anda buka memperkirakan bahwa skenario boikot parsial dapat menurunkan proyeksi pendapatan Piala Dunia hingga puluhan persen.

Reaksi pasar modal tercermin dalam volatilitas saham klub-klub yang terdaftar publik. Ketika rumor penjualan saham merebak, saham beberapa klub mengalami penurunan intraday yang nyata karena investor menilai risiko terhadap pendapatan jangka panjang dari hak siar dan sponsor. Analisis pasar di London yang diwawancarai oleh media menyatakan bahwa kepastian adalah kunci bagi investor. “Investor lebih suka kepastian, dan kepastian datang ketika FIFA membatalkan rencana penjualan saham,” ujar analis pasar di London. Data perdagangan yang dikutip menunjukkan lonjakan volume perdagangan pada saham klub tertentu pada hari-hari ketika pernyataan resmi dan bocoran dokumen muncul.

Di balik perdebatan publik, negosiasi politik berlangsung intens di ruang tertutup. Sumber yang dikutip oleh halaman tersebut melaporkan bahwa pertemuan darurat antara perwakilan FIFA, UEFA, CONMEBOL, AFC, CAF, dan CONCACAF berlangsung selama beberapa putaran, dengan mediasi oleh tokoh-tokoh independen dari dunia hukum olahraga dan konsultan keuangan. Agenda utama adalah mencari formula yang menjaga aliran dana untuk federasi berkembang tanpa menyerahkan kontrol strategis atas aset Piala Dunia kepada investor eksternal. Dokumen pertemuan yang bocor menunjukkan beberapa opsi teknis, termasuk pembentukan dana abadi yang dikelola oleh badan independen, penerbitan obligasi bertopang pendapatan Piala Dunia, dan mekanisme pembagian pendapatan yang diprioritaskan untuk proyek pembangunan.

Opsi pembentukan dana abadi mendapat perhatian karena menawarkan jalan tengah: modal awal



Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa

dapat diperoleh melalui instrumen utang atau kontribusi filantropi besar, sementara kendali operasional dan hak suara atas keputusan komersial tetap berada di tangan FIFA dan federasi. Beberapa federasi Afrika dan Asia menyambut gagasan ini karena menjanjikan aliran dana yang stabil tanpa harus melepaskan saham strategis. Namun opsi ini juga menuntut tata kelola yang ketat dan audit independen untuk memastikan dana benar-benar digunakan sesuai tujuan. Halaman yang Anda buka mencatat bahwa proposal dana abadi itu mencakup klausul distribusi tahunan yang mengalokasikan persentase tetap untuk pembangunan infrastruktur, program pelatih, dan pengembangan usia muda.

Teknis lain yang dibahas adalah penerbitan obligasi bertopang pendapatan Piala Dunia, di mana investor membeli obligasi yang dibayar kembali dari arus kas hak siar dan sponsor tanpa memperoleh saham kepemilikan. Model ini dianggap lebih ramah tata kelola karena tidak mengubah struktur kepemilikan, tetapi tetap menghadirkan risiko leverage yang harus dikelola. Konsultan keuangan yang menyiapkan model proyeksi menyarankan batas leverage konservatif dan mekanisme pemutusan otomatis jika pendapatan



turun di bawah ambang tertentu. Rekomendasi ini kemudian menjadi bagian dari paket opsi yang diajukan kepada anggota eksekutif FIFA.

Tekanan publik dan ancaman boikot akhirnya memaksa perubahan arah. Setelah pertemuan intens dan konsultasi dengan federasi regional, FIFA mengumumkan pembatalan rencana penjualan dua puluh persen saham komersial Piala Dunia. Gianni Infantino menyatakan bahwa organisasi akan mencari solusi lain yang lebih transparan dan lebih adil bagi semua pihak. “Kami akan mencari solusi lain yang lebih transparan dan lebih adil bagi semua pihak,” ujar Gianni Infantino. Pengumuman resmi itu disertai janji untuk mengeksplorasi alternatif seperti dana abadi, obligasi bertopang pendapatan, dan peningkatan program solidaritas tanpa mengorbankan kontrol federasi atas aset strategis.

Pembatalan tersebut menenangkan pasar dalam jangka pendek dan

meredakan ancaman boikot, tetapi meninggalkan pertanyaan besar tentang bagaimana kebutuhan pendanaan jangka panjang akan dipenuhi. Beberapa federasi kecil menuntut jadwal implementasi yang jelas untuk mekanisme alternatif, sementara federasi besar menekankan pentingnya menjaga integritas kompetisi dan kalender. Laporan yang dikutip memperlihatkan bahwa negosiasi lanjutan akan fokus pada tiga hal utama: transparansi aliran dana, mekanisme pengawasan independen, dan formula pembagian pendapatan yang adil.

Dampak jangka menengah dari episode ini kemungkinan akan memengaruhi cara badan olahraga global mendesain instrumen pembiayaan. Model yang mengutamakan instrumen utang bertopang pendapatan dan dana abadi yang dikelola independen kini menjadi opsi yang lebih realistis dibandingkan penjualan saham

langsung. Pakar tata kelola olahraga yang dikutip menyarankan agar setiap solusi baru disertai aturan tata kelola yang mengikat, audit berkala, dan keterlibatan pemangku kepentingan regional dalam pengawasan. “Tanpa tata kelola yang kuat, setiap aliran modal baru akan menimbulkan risiko baru bagi integritas olahraga,” ujar seorang pakar tata kelola yang diwawancarai.

Akhirnya, episode penjualan saham Piala Dunia menjadi pelajaran penting tentang batas komersialisasi dalam olahraga global. Ia menunjukkan bahwa aset budaya seperti Piala Dunia tidak bisa diperlakukan semata-mata sebagai komoditas finansial tanpa mempertimbangkan legitimasi, suara federasi, dan dampak pada ekosistem sepak bola. Keputusan pembatalan menegaskan bahwa kompromi politik, bukan sekadar logika pasar, tetap menjadi penentu akhir dalam pengelolaan aset olahraga global. ■



FAJAR BARU PENDIDIKAN NASIONAL:

MENGINTEGRASIKAN HARAPAN, MENJEMPUT INDONESIA EMAS

Di tengah deru perubahan zaman dan tuntutan akan kualitas sumber daya manusia yang semakin kompetitif, Indonesia mengambil langkah berani. Bukan sekadar perubahan kurikulum atau sekadar perbaikan fisik bangunan, pemerintah kini sedang meletakkan fondasi

melalui sebuah konsep yang disebut Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Sebanyak 17 SNT telah resmi memulai lembaran baru layanan pendidikan pada tahun ajaran 2026/2027. Ini bukan sekadar angka administratif; ini adalah manifesto transformasi tata kelola pendidikan yang menjanjikan pemerataan kualitas dari pusat hingga

ke pelosok.

Membaca Arah Baru Pendidikan Indonesia

Konsep SNT lahir dari kebutuhan mendesak akan adanya “rumah” yang mampu menampung, membimbing, dan mengembangkan potensi murid secara utuh. Menteri Pendidikan Dasar



dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dalam pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 17 SNT di Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa model ini merupakan bagian dari upaya besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.

“Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan salah satu model pendidikan khusus yang kita kembangkan sebagai penjabaran dari Instruksi Presiden yang telah diterbitkan oleh Bapak Presiden dan sebagai bagian dari usaha besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi menjadi sejarah baru karena mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027,” ujar Menteri Mu'ti.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa SNT bukanlah proyek jangka pendek. Ia adalah instrumen strategis. Menteri Mu'ti menjelaskan bahwa SNT memberikan kesempatan bagi murid yang memiliki kemampuan istimewa, baik di bidang akademik maupun

nonakademik, untuk tumbuh lebih cepat dan optimal dalam lingkungan yang mendukung. Pendidikan, dalam pandangan SNT, bukanlah proses penyeragaman, melainkan proses penyediaan ruang bagi keragaman potensi.

“Tujuannya untuk memberikan kesempatan dan pelayanan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan istimewa, khususnya dalam bidang akademik maupun nonakademik, untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan lebih baik lagi,” tutur beliau.

Integrasi Sebagai Transformasi Tata Kelola

Salah satu aspek paling revolusioner dari SNT adalah konsep “integrasi” itu sendiri. Seringkali, masalah pendidikan di Indonesia terkendala oleh fragmentasi layanan antarmengkoordinasi dan ketimpangan fasilitas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa SNT membawa paradigma baru dalam

tata kelola.

“Intinya adalah satu transformasi tata kelola. Jadi, mengintegrasikan kelembagaan, tadinya beberapa sekolah menjadi satu manajemen sekolah,” ujar Pratikno.

Transformasi ini menyentuh akar permasalahan efisiensi. Dengan mengintegrasikan kelembagaan, fasilitas pendidikan yang sebelumnya terpisah-pisah kini dapat dimanfaatkan secara kolektif. Pratikno mencontohkan penggunaan infrastruktur seperti lapangan olahraga, gedung olahraga, hingga laboratorium. Jika sebelumnya fasilitas tersebut terbatas pada satu sekolah, kini dengan sistem terintegrasi, sumber daya tersebut menjadi aset bersama yang mendukung kebutuhan pembelajaran secara lebih masif dan efisien.

“Lapangan sepak bola bersama antarsekolah karena terintegrasi. GOR juga digunakan beberapa sekolah yang tadinya dua sekolah menjadi satu sekolah, satu kesatuan. Transformasi infrastruktur termasuk laboratorium



dan lain-lain, sehingga ini lebih efisien,” kata Pratikno.

Namun, integrasi ini tidak berhenti pada efisiensi infrastruktur. Ini adalah tentang integrasi proses pembelajaran yang lebih holistik. Pemerintah ingin memastikan bahwa prestasi murid tidak hanya diukur dari angka-angka di atas kertas atau nilai ujian semata.

Pratikno menegaskan, “Berprestasi itu bukan hanya akademik, bukan hanya matematika nilainya 10, bukan hanya fisika nilainya 10. Berprestasi itu macam-macam, bisa akademik maupun nonakademik melalui seni atau olahraga.”

Dengan pandangan ini, SNT diharapkan mampu menciptakan ekosistem di mana murid tidak dipaksa untuk unggul dalam satu dimensi saja, melainkan didorong untuk menjadi individu yang utuh, yang mampu menemukan kekuatannya sendiri, tanpa meninggalkan kompetensi dasar

lainnya.

Suara dari Akar Rumput: Gowa dan Kupang

Jika kebijakan adalah “otak” dari sebuah program, maka wajah murid dan guru adalah “nadi” yang membuatnya hidup. Di SNT 09 Gowa dan SNT 10 Kupang, kita melihat bagaimana kebijakan ini diterjemahkan menjadi realitas yang menyentuh harapan anak-anak.

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, kehadiran SNT 10 Kupang menjadi jawaban atas dahaga akan layanan pendidikan yang setara. Marisa, seorang murid SMP di SNT 10 Kupang, membagikan kisahnya. Baginya, SNT bukan sekadar sekolah baru; ini adalah wadah yang memungkinkan bakatnya berkembang.

“Karena SNT punya kualitas pendidikan yang bagus, disiplin, dan banyak kegiatan yang bisa

mengembangkan diri kita,” ucap Marisa.

Marisa adalah potret anak Indonesia yang memiliki bakat terpendam. Selain berprestasi akademik, ia memiliki suara emas yang telah membawanya menjuarai berbagai lomba menyanyi, termasuk di gereja. Ia menceritakan proses panjang di balik setiap prestasi yang diraihnya.

“Saya rajin bernyanyi di rumah dan selalu latihan setiap hari agar suara saya lebih baik, dan tidak pernah menyerah. Walaupun awalnya sering gagal,” kenangnya. Bagi Marisa, SNT menawarkan fasilitas dan bimbingan yang selama ini ia rindukan untuk bisa melampaui keterbatasan. “Karena SNT punya fasilitas dan guru pembimbing yang bisa bantu saya mengasah bakat lebih maksimal dan lancar.”

Di sekolah yang sama, Chika, seorang murid jenjang SMA, memiliki catatan prestasi yang tidak kalah



Marisa dan Chika, siswi SNT 10 Kabupaten Kupang, NTT

mengagumkan: Juara 1 Lomba Puisi, Juara 1 Pidato Bahasa Indonesia, dan Juara Harapan 1 Cerdas Cermat tingkat kabupaten. Chika mengakui bahwa di balik setiap piala yang diraihnya, ada perjuangan melawan rasa cemas.

“Saya banyak latihan, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha walaupun kadang merasa gugup,” ungkapnya. Pilihan Chika untuk bergabung dengan SNT didorong oleh keinginan sederhana namun kuat: “Karena saya ingin lebih percaya diri dan terus mengembangkan kemampuan saya.”

Di sisi lain, para pendidik yang bertugas di SNT mengemban tanggung jawab untuk mengawal mimpi-mimpi tersebut. Dian Ahmad Sasmito, guru IPAS di SNT 10 Kupang, menceritakan bagaimana tim Tenaga Pendamping Pembelajaran (TPP) bekerja.

“Selama MPLS ini tim Tenaga Pendamping Pembelajaran (TPP) kebersamai anak-anak secara kolosal atau pun dalam *discussion group*. Selain itu, kami juga memandujalannya kegiatan MPLS menjadi moderator, narasumber, instruktur senam anak Indonesia hebat. Utamanya kami memberikan layanan kepada murid jika terjadi kendala ataupun membutuhkan pendampingan,” papar Dian.

Bagi Dian, melihat antusiasme murid-murid di NTT adalah melihat secercah masa depan. “Saya melihat bakat, cita-cita anak-anak, dan harapan. sehingga ke depannya saya berharap melalui SNT ini bisa menjadi sekolah yang pemeratakan layanan pendidikan yang berkualitas dan membantu anak-anak untuk menggapai mimpinya.”



Dudung Abdurachman

Membangun Fondasi: Infrastruktur dan Komitmen

Pemerintah menyadari bahwa transisi menuju SNT adalah pekerjaan besar. Pada tahap awal ini, pemerintah mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada milik Kemendikdasmen maupun pemerintah daerah sebagai lokasi pembelajaran sementara. Namun, komitmen untuk pembangunan gedung yang lebih representatif sudah di depan mata.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan, “Pada tahap awal, penyelenggaraan 17 Sekolah Nasional Terintegrasi di seluruh Indonesia dilakukan di fasilitas yang dimiliki Kemendikdasmen dan fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah. Proses pembangunan sedang dipersiapkan dan diharapkan pada tahun depan Sekolah Nasional Terintegrasi telah memiliki gedung sendiri dengan fasilitas yang representatif, yang memungkinkan kalian semua dapat belajar dengan sebaik-baiknya.”

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, menambahkan perspektif mengenai pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan program ini. Ia menegaskan bahwa infrastruktur hanyalah wujud fisik, namun keberhasilan sesungguhnya terletak pada sinergi.



Himmatul Aliyah



Agisni Ramadan

“Sekolah Nasional Terintegrasi bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan intervensi strategis negara dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang dekat dengan masyarakat hingga ke seluruh pelosok negeri,” tegas Dudung.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Aliyah, memberikan apresiasi atas langkah konkret yang dilakukan Kemendikdasmen. Baginya, angkatan pertama SNT ini memikul beban tanggung jawab historis yang besar.

“SNT angkatan pertama ini diharapkan bisa menjadi teladan yang baik untuk angkatan-angkatan berikutnya,” ujar Himmatul. Kehadiran SNT diharapkan tidak hanya menjadi “sekolah unggulan” yang eksklusif,



melainkan menjadi model bagi sekolah-sekolah di sekitarnya untuk terus berbenah dan meningkatkan mutu.

Menatap Masa Depan

Di Bogor, Agisni Ramadan, murid jenjang SMP di SNT 7 Bogor, yang merupakan lulusan terbaik di sekolah asalnya, kini menatap masa depan sebagai dokter spesialis. Sementara itu, rekan sekolahnya, Nadine A. Zuhrah Farista, yang memiliki rekam jejak Pramuka Garuda, juga memiliki harapan serupa untuk berkembang di lingkungan baru ini.

Kisah Agisni, Nadine, Marisa, dan Chika adalah narasi kecil dari sebuah perubahan besar. Mereka adalah representasi dari jutaan anak Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi tak terbatas, namun seringkali terbentur oleh akses dan fasilitas yang tidak merata.

SNT, dengan segala bentuk integrasinya, mencoba meruntuhkan tembok-tembok pemisah tersebut. Ia hadir sebagai wujud nyata negara yang tidak lagi sekadar hadir sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator yang menyediakan ruang belajar yang lebih

manusiawi, lebih terintegrasi, dan lebih berorientasi pada pengembangan talenta.

Perjalanan ini memang baru dimulai. 17 sekolah yang telah beroperasi hanyalah titik awal. Masih ada tantangan dalam memastikan keberlanjutan kurikulum, kesiapan guru, hingga pembangunan fisik yang ideal. Namun, dengan semangat integrasi dan fokus pada “anak sebagai pusat pendidikan,” Indonesia sedang meniti jalan yang benar untuk menjawab tantangan masa depan.

Pada akhirnya, Sekolah Nasional Terintegrasi adalah sebuah janji. Janji bahwa tidak ada lagi anak yang tertinggal, bahwa setiap bakat akan mendapatkan wadahnya, dan bahwa pendidikan bermutu adalah hak setiap anak, di mana pun mereka berada—dari pusat kota hingga ke pelosok daerah. Dengan melangkahnya angkatan pertama SNT di tahun ajaran 2026/2027, kita mungkin sedang menyaksikan fajar baru bagi pendidikan Indonesia. Fajar yang membawa optimisme, bahwa Indonesia Emas bukan sekadar utopia, melainkan sebuah realitas yang sedang kita bangun bersama hari ini. ■

SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI

Sekolah Bermutu Lebih Dekat
Untuk Anak Indonesia

Sekolah Nasional Terintegrasi

Sekolah bermutu yang hadir di daerah untuk memberi kesempatan lebih setara bagi anak-anak Indonesia agar dapat belajar, tumbuh, mengembangkan minat dan bakat, serta meraih masa depan yang lebih baik di tempat mereka berasal dan tinggal.

Pilar Utama SNT

Fondasi yang menggerakkan ekosistem
Sekolah Nasional Terintegrasi.

- ✓ **Pembelajaran yang Berkesinambungan**
Pembelajaran kelas VII-XII dibaca sebagai satu siklus, bukan jenjang yang terpisah.
- ✓ **Mutu yang Merata**
Unggul tetapi tetap inklusif, talenta daerah diberi akses dan dukungan bermutu.
- ✓ **Dampak terhadap Lingkungan Sekitar**
SNT menjadi hub mutu, talenta, praktik baik, dan sumber daya untuk sekolah sekitar.

Konsep SNT

- 1 **Ekosistem**
Bukan hanya sekolah; melibatkan guru, keluarga, daerah, mitra dan jejaring
- 2 **Terintegrasi**
Satu visi, satu peta belajar, satu sistem data, dan satu penjaminan mutu.
- 3 **Unggul & inklusif**
Keunggulan dibangun melalui dukungan, bukan hanya seleksi.
- 4 **Global berkarakter**
Daya saing internasional tetap berakar pada Pancasila dan nasionalisme.

MENATA INFRASTRUKTUR, MENGANGKAT MUTU PENDIDIKAN



Pendidikan tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Ia adalah sebuah ekosistem hidup yang membutuhkan tatanan fisik yang mendukung agar ide-ide bisa bertumbuh, karakter ditempa,

dan potensi digali dengan maksimal. Memahami urgensi ini, pemerintah Indonesia kini tengah menggenjot percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, sebuah langkah strategis yang tidak sekadar memperbaiki bangunan, melainkan sebuah upaya sistemik untuk memastikan lebih dari 70 ribu satuan pendidikan di seluruh penjuru tanah air memiliki fondasi yang kokoh pada tahun 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan sebuah analogi yang sangat mendasar: sarana fisik sekolah adalah “raga” bagi keberlangsungan pendidikan. Ibarat tubuh manusia, jika raganya tidak dalam kondisi yang prima, maka fungsi-fungsi di dalamnya—yakni proses kognitif dan pembentukan karakter—akan mengalami hambatan yang signifikan. Dalam konteks pendidikan modern, revitalisasi ini bukanlah sekadar proyek pembangunan fisik yang bersifat administratif, melainkan investasi fundamental pada kualitas pembelajaran itu sendiri. Ketika sebuah ruang kelas diperbaiki, atap yang bocor diganti, fasilitas

laboratorium dilengkapi, atau sanitasi sekolah dibenahi, yang sebenarnya sedang dibangun adalah martabat proses belajar mengajar itu sendiri.

Secara kebijakan, langkah akselerasi ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui pendekatan yang inklusif dan terukur. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur memiliki korelasi langsung terhadap hasil belajar peserta didik. Sekolah yang memiliki sarana memadai cenderung mampu menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan mendukung kesehatan mental serta motivasi belajar siswa. Lingkungan fisik yang layak memberikan pesan kepada siswa bahwa pendidikan mereka dihargai, yang pada gilirannya menciptakan ikatan psikologis yang kuat antara peserta didik dengan institusi pendidikannya.

Revitalisasi ini juga dirancang untuk mengubah wajah sekolah menjadi pusat gravitasi komunitas. Sekolah diharapkan tidak hanya





menjadi tempat fungsional bagi pengajaran administratif, tetapi bertransformasi menjadi ruang interaksi sosial yang dinamis, aman, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan menyatukan elemen fisik dan pedagogis, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap sekolah menjadi tempat yang ramah bagi keberagaman metode pembelajaran, dari pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) hingga pendekatan digital yang semakin mendesak untuk diadopsi di seluruh daerah.

Lebih jauh lagi, inisiatif ini mencerminkan sebuah transisi paradigma di mana pembangunan sarana sekolah dipandang sebagai bagian dari strategi besar untuk menjamin pemerataan kualitas pendidikan secara nasional. Pemerintah menyadari bahwa

kesenjangan fasilitas sering kali menjadi akar dari ketimpangan capaian akademik. Oleh karena itu, melalui program ini, pemerintah berupaya memperkecil jurang fasilitas antara sekolah di daerah perkotaan dengan sekolah di pelosok daerah, sehingga akses terhadap lingkungan belajar yang berkualitas tidak lagi menjadi kemewahan, melainkan hak dasar setiap anak bangsa.

Selain aspek fisik, revitalisasi ini juga menyentuh dimensi ketahanan sekolah. Lingkungan yang direvitalisasi juga mencakup integrasi standar keamanan, termasuk kesiapan terhadap bencana, yang saat ini menjadi perhatian utama dalam menciptakan satuan pendidikan yang aman dan kondusif. Dengan mengintegrasikan aspek ketahanan fisik dan kenyamanan lingkungan, sekolah menjadi tempat yang bukan

hanya aman dari sisi struktural, tetapi juga nyaman secara sosial dan emosional.

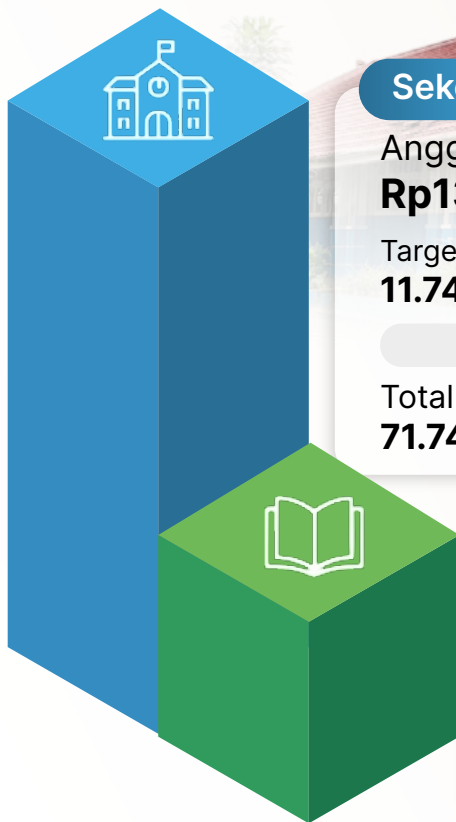
Dengan akselerasi yang dilakukan, revitalisasi ini membawa harapan baru bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Melalui peningkatan sarana fisik yang terarah, kita sedang menyiapkan panggung yang lebih kokoh bagi anak-anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Ini adalah perjalanan panjang untuk memastikan bahwa setiap warga sekolah, baik guru maupun siswa, mendapatkan ruang yang paling layak untuk menumbuhkembangkan potensi terbaik mereka, sekaligus mengukuhkan kembali komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembenahan infrastruktur yang bermartabat. ■

Akselerasi Revitalisasi Sekolah dan Madrasah

Target dan Realisasi

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), per 7 Agustus 2026
Kementerian Agama (Kemenag) 3 Agustus 2026.

Pemerintah berupaya mengakselerasi revitalisasi sekolah dan madrasah pada 2026 dengan target lebih dari 70 ribu unit pada 2026. Program ini untuk mendukung pembelajaran yang aman dan nyaman.



Sekolah

Anggaran
Rp13,4 triliun

Target awal **11.744 unit** Tambahan **60.000 unit**
(anggaran masih dibahas)

Total **71.744 unit** Realisasi **23.144 unit**

Madrasah

Anggaran
Rp 4 triliun

Target **1.408 unit** Realisasi **556 unit**

Manfaat Revitalisasi

Menjadikan proses pembelajaran aman, nyaman, dan layak.



Menyerap **1,1 juta** tenaga kerja selama pelaksanaan revitalisasi.



Memperluas akses pendidikan. Proporsi penduduk tidak /belum pernah sekolah **2,85%** 2025, turun dari **2,88%**.



Mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia **75,90** 2025.



Upaya Pemerintah Mengakselerasi Revitalisasi



Mendorong dinas pendidikan mempercepat pengajuan revitalisasi sekolah /madrasah.



Melakukan pengawasan bersama kementerian lain untuk memastikan kualitas dan ketepatan sasaran.



Menerapkan mekanisme swakelola, yakni sekolah mengelola sendiri pembangunannya.

“

Pemerintah terus mempercepat transformasi pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.



Abdul Mu'ti

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah



MENATA KEPASTIAN MASA DEPAN GURU:

BABAK BARU KARIER PPPK MENUJU 2027

Perjalanan panjang penataan status kepegawaian guru di Indonesia akhirnya memasuki babak baru yang lebih terang. Pemerintah, melalui sinergi lintas kementerian/lembaga bersama Pimpinan DPR RI, resmi membuka jalur pengembangan karier yang jelas dan terukur bagi ratusan ribu guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan strategis ini tidak sekadar menjawab persoalan administrasi kepegawaian, tetapi juga menjadi angin segar bagi upaya peningkatan martabat dan kesejahteraan tenaga pendidik nasional. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 2026, pemerintah secara resmi menyiapkan skema transisi yang akan mulai bergulir pada

tahun 2027.

Dua Jalur Utama Peningkatan Karier Guru

Langkah progresif ini dirancang untuk merangkul berbagai klaster kepegawaian guru yang ada di lapangan saat ini. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tantangan penataan guru di Indonesia

melibatkan jumlah yang cukup besar, dengan total 908.617 guru berstatus PPPK, di mana sebanyak 231.246 di antaranya masih berstatus PPPK paruh waktu.

Melalui kebijakan baru ini, pemerintah merumuskan dua arah jalur karier yang konkret:

- Transisi PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu: Guru yang saat ini menjalankan tugasnya dengan status PPPK paruh waktu diberikan kesempatan luas untuk mengikuti proses seleksi atau pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu mulai tahun 2027.
- Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS: Bagi guru yang telah lebih dulu mengabdikan diri sebagai PPPK penuh waktu, pemerintah membuka pintu seluas-luasnya untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan pendaftaran yang dijadwalkan mulai dibuka pada awal 2027.

Kendati demikian, seluruh proses transisi ini tetap berjalan secara terstruktur dengan mengikuti mekanisme, pemenuhan persyaratan, ketersediaan formasi, serta ketentuan resmi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah berwenang.

Solusi Jangka Panjang untuk Pemerataan Kualitas

Di balik rumusan kebijakan yang komprehensif ini, tersimpan tantangan nyata terkait distribusi tenaga pendidik yang belum merata di berbagai daerah. Para pengamat dan pemangku kepentingan pendidikan menilai bahwa kejelasan jalur karier ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi talenta-talenta guru terbaik untuk bersedia mengabdikan diri di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dengan adanya jaminan kepastian



masa depan, stigma bahwa pengabdian sebagai guru kontrak atau PPPK membatasi jenjang profesionalisme perlahan-lahan mulai dikikis. Guru tidak lagi perlu merasa cemas mengenai keberlanjutan status kerja mereka dalam jangka panjang, sehingga fokus utama dapat sepenuhnya diarahkan pada inovasi pembelajaran di ruang-ruang kelas.

Ekosistem Guru yang Berkelanjutan

Lebih dari sekadar persoalan status, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar membangun ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan berkesinambungan. Pemerintah menyadari bahwa guru adalah ujung tombak transformasi pendidikan nasional. Oleh karena itu, skema pengembangan karier ini dirancang untuk menciptakan mobilitas profesional yang dinamis, di mana guru memiliki kesempatan untuk terus tumbuh dan meningkatkan jenjang

jabatannya tanpa harus terjebak dalam stagnasi status.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan angka turnover (pergantian) guru di sekolah-sekolah, terutama di wilayah yang selama ini kesulitan mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas. Dengan adanya kepastian jenjang karier yang tertata, loyalitas guru terhadap institusi pendidikan tempat mereka bertugas akan semakin menguat, yang pada akhirnya akan menciptakan stabilitas dalam proses belajar mengajar. Stabilitas inilah yang menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya budaya sekolah yang kondusif dan berorientasi pada pencapaian murid.

Komitmen Pemerintah: Kesejahteraan Beriringan dengan Kompetensi

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen),



Abdul Mu'ti, menyambut baik dan mengapresiasi kesepakatan lintas sektor ini. Menurutnya, kepastian status kepegawaian merupakan fondasi penting agar para guru dapat mencurahkan perhatian penuh pada tugas utama mereka di kelas: mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.

"Ini tentu kabar baik bagi para guru kita. Kami berterima kasih atas arahan dan dukungan Bapak Presiden yang menjadikan kesejahteraan dan kepastian karier guru sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Lebih lanjut, Mu'ti menegaskan bahwa penataan status kepegawaian ini tidak berjalan sendiri. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa peningkatan karier senantiasa sejalan dengan penguatan kompetensi, perlindungan profesi, serta apresiasi yang layak atas dedikasi dan pengabdian para guru di berbagai penjuru tanah air.

"Upaya tersebut berjalan

beriringan dengan penguatan berbagai aspek profesi guru, mulai dari kesejahteraan dan perlindungan hingga pengembangan kompetensi serta apresiasi terhadap dedikasi dan pengabdian guru," tambahnya.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Kemendikdasmen terus memperkuat kesejahteraan melalui penyaluran aneka tunjangan. Sepanjang semester I 2026, tercatat penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) mencapai Rp37,9 triliun untuk 1,68 juta guru, Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp1,5 triliun untuk lebih dari 65 ribu guru, serta Dana Tambahan Penghasilan (DTP) mencapai Rp25 miliar untuk lebih dari 25 ribu guru. Selain itu, berbagai program peningkatan kompetensi seperti Pelatihan Pembelajaran Mendalam (PM), Koding & Kecerdasan Artifisial (KKA), hingga pelatihan guru Bahasa Inggris terus digalakkan untuk menjawab kebutuhan guru di lapangan.

Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci

Keberhasilan implementasi kebijakan besar ini tentu tidak terlepas dari soliditas kerja sama antara pemerintah pusat, DPR RI, serta pemerintah daerah selaku instansi pembina kepegawaian di tingkat lokal. Sinkronisasi data formasi dan alokasi anggaran menjadi pekerjaan rumah bersama yang terus diselaraskan agar transisi menuju tahun 2027 dapat berjalan tanpa hambatan administratif yang berarti.

Dukungan legislatif dipandang sangat vital untuk memastikan payung hukum dan alokasi fiskal tetap berpihak pada keberlanjutan karier guru. Dengan komitmen bersama yang kuat, setiap perubahan kebijakan diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pendidik di lapangan, tanpa ada guru yang tertinggal dari radar perhatian negara.

Menyongsong Harapan Baru

Dengan adanya kejelasan peta jalan karier ini, para guru di seluruh Indonesia kini memiliki proyeksi masa depan yang lebih pasti. Pemerintah mengimbau para guru dan masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi resmi terkait mekanisme, persyaratan teknis, jadwal, formasi, dan tahapan seleksi melalui kanal-kanal resmi Kementerian PANRB maupun instansi pemerintah terkait.

Langkah ini menandai bahwa negara hadir secara nyata dalam merawat fondasi pendidikan nasional—memastikan bahwa mereka yang berada di garis depan mencerdaskan bangsa mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan jaminan karier yang bermartabat.



Melalui kebijakan baru ini, pemerintah merumuskan dua arah jalur karier yang konkret:



Transisi PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu:

Guru yang saat ini menjalankan tugasnya dengan status PPPK paruh waktu diberikan kesempatan luas untuk mengikuti proses seleksi atau pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu mulai tahun 2027.



Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS:

Bagi guru yang telah lebih dulu mengabdikan diri sebagai PPPK penuh waktu, pemerintah membuka pintu seluas-luasnya untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan pendaftaran yang dijadwalkan mulai dibuka pada awal 2027.



“

Ini tentu kabar baik bagi para guru kita. Kami berterima kasih atas arahan dan dukungan Bapak Presiden yang menjadikan kesejahteraan dan kepastian karier guru sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Mendikdasmen
Abdul Mu'ti



SDN SEPI PEMINAT, SINYAL PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN TERUS DIPERKUAT

Tahun ajaran 2026/2027 meninggalkan kesan yang menyedihkan bagi sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di sejumlah daerah di Indonesia. Pasalnya, minat masyarakat untuk menitipkan anak-anak mereka di SDN mengalami penurunan.

Penurunan minat masyarakat terhadap SDN terlihat nyata dengan munculnya fenomena kekurangan murid di SDN di sejumlah daerah. Bahkan, lebih miris lagi, sejumlah SDN sama sekali tidak menerima murid. Dan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di pulau Jawa tapi juga terjadi di

pulau lainnya seperti Sumatera.

Misal di Sumatera, fenomena kekurangan murid dialami oleh SDN 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung, Lampung. Pada ajaran baru tahun ini, sekolah tersebut hanya mendapat dua siswa baru.

Fenomena yang serupa juga terjadi di Wilayah Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebanyak 73 sekolah di kabupaten tersebut mengalami kekurangan murid. Dan yang paling parah dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 02 dan Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 01 hanya menerima tiga orang murid,

padahal kuota tersedia sebanyak 28 orang.

Tidak berhenti di Jawa Tengah, peristiwa yang serupa terjadi di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Tulungagung. Sejumlah SDN di wilayah tersebut sama sekali tidak mendapatkan murid baru. Sekolah yang dimaksud adalah SDN 1 Tenggong, SD Negeri 4 Besuki, dan SDN 5 Bungur. Bahkan, SDN 1 Tenggong telah dua tahun terakhir tak mendapat siswa baru.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan catatan dari Dinas Pendidikan daerah tersebut, ada empat SDN yang tidak



memiliki siswa baru, yaitu SDN Nailan, SDN Setono, SDN 3 Pomahan, dan SDN 4 Tempuran. Bahkan sudah dua tahun berturut-turut SDN Nailan tidak mendapatkan siswa baru, sehingga kini kelas satu dan dua tak memiliki murid. Total muridnya kini hanya 13 orang.

Bergeser ke wilayah Jawa Barat, fenomena kekurangan murid juga terjadi di Kabupaten Ciamis. Dari total 743 SD di kabupaten ini, empat SD dilaporkan hanya memperoleh satu murid baru, salah satunya adalah SDN 2 Salakaria. Total siswa di sekolah itu kini 32 murid. Dan masih banyak sekolah-sekolah negeri yang mengalami hal yang serupa.

Fenomena kekurangan murid yang dialami SDN itu menjadi perbincangan publik. Di saat sekolah dasar negeri kesulitan mendapatkan murid, malah sekolah dasar swasta mengalami hal yang sebaliknya. Masyarakat berebut agar anak-anak mereka bisa masuk di

sekolah swasta meski dengan bayaran yang mahal.

Misalnya di SD Muhammadiyah Sapen di Yogyakarta. Untuk bisa masuk ke sekolah tersebut masyarakat antre sangat panjang. Dan kuota murid baru sudah penuh hingga tahun ajaran 2032–2033. Sehingga orang tua rela mendaftarkan anaknya sejak masih bayi, bahkan ada yang mendaftar sebelum anak lahir.

Selain sekolah Muhammadiyah, sekolah swasta lainnya juga menjadi rebutan orang tua seperti Labschool Rawamangun dan Labschool Kebayoran. Di sekolah tersebut tidak hanya jenjang sekolah dasar, di semua jenjang kerap kali pendaftarannya melebihi kapasitas daya tampung.

Respons Kemendikdasmen

Fenomena kekurangan murid di sekolah dasar negeri langsung di respon oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu'ti. Dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah bersama dengan pemerintah daerah untuk menangani sekolah yang kekurangan murid pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Dia mengatakan langkah awal yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), khususnya terhadap sekolah yang memiliki kurang dari 100 murid, termasuk sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 orang. Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar koordinasi penyusunan kebijakan.

Dan dia mengatakan bahwa kebijakan penanganan sekolah dengan jumlah murid terbatas akan disusun bersama pemerintah

daerah mengingat pengelolaan satuan pendidikan berada di bawah kewenangan masing-masing daerah.

Mendikdasmen tegas mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen terus mendorong pemerataan mutu pendidikan, sehingga sekolah mampu memberikan layanan yang berkualitas bagi para peserta. Dengan adanya layanan yang berkualitas ini maka sekolah negeri akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga kembali menjadi pilihan.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu menguatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/7).

Selanjutnya dia mengatakan bahwa fenomena kekurangan murid di sekolah negeri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal. Namun ada faktor lainnya, yakni perubahan jumlah penduduk usia sekolah, perpindahan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, pilihan masyarakat terhadap satuan pendidikan, serta kondisi geografis yang berbeda di setiap daerah.

Maka itu, menurutnya persoalan ini harus diselesaikan dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Langkah yang akan dilakukan yakni dengan memetakan kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan perkembangan demografi dan persebaran penduduk.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa pemerintah juga akan mengevaluasi daya tampung sekolah agar sesuai

dengan kebutuhan wilayah, memperkuat perencanaan pendidikan berbasis data, serta memastikan sekolah dengan jumlah murid terbatas tetap memperoleh pendampingan dan layanan pendidikan yang optimal.

Selain itu, evaluasi terhadap kondisi sekolah akan dilakukan secara berkala agar kebijakan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Kemendikdasmen juga menyoroti perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah. Berdasarkan hasil studi Litbang Kompas pada 2025, sebagian orang tua cenderung memilih menyekolahkan anak pada jenjang sekolah dasar di satuan pendidikan yang memiliki afiliasi keagamaan.

Mendikdasmen mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, hingga masyarakat, untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas dan merata.

“Kami mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Melalui kolaborasi ini, semoga setiap sekolah dapat berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya, sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara dan bermutu,” katanya.

Momentum Pemda lakukan evaluasi

Fenomena kekurangan murid di SDN di sejumlah daerah harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah (Pemda) melakukan evaluasi dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf di Bandar Lampung pada Selasa, 14 Juli 2026 seperti dilansir *Kompas.id*

Dia mengatakan, evaluasi yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas sekolah. Selain itu, evaluasi dalam sistem pembelajaran, dan kualitas guru di sekolah yang jumlah muridnya semakin berkurang.

Dia mengatakan tidak semua sekolah negeri sepi peminat. Ini menjadi sinyal bahwa kualitas pendidikan di sekolah negeri tidak merata. Menurutnya inilah yang menjadi penyebab berkurangnya siswa yang mendaftar di sekolah negeri.

Menurutnya kekurangan peminat juga mencerminkan bahwa masyarakat semakin tidak percaya dengan kualitas pendidikan di sekolah milik pemerintah.

“Pemerintah perlu berupaya memperbaiki sarana dan prasarana ataupun kualitas pembelajaran di sekolah sehingga orangtua berminat mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah negeri,” tegasnya.

Sistem penerimaan murid baru yang mempertimbangkan domisili, katanya, bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Namun, tidak meratanya kualitas pendidikan membuat masyarakat akhirnya tetap lebih mengutamakan memilih sekolah yang dianggap unggul.

Kondisi inilah yang membuat sejumlah sekolah akhirnya kekurangan siswa. Sementara jumlah pendaftar di sekolah favorit atau unggulan sering kali melebihi kapasitas.

Karena itulah, pemerintah semestinya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang kurang peminat. Ke depan, pemerintah



Nur Rakhman Yusuf



Asroni Paslah

juga perlu menata ulang sistem penerimaan agar siswa bisa didistribusikan secara lebih merata dengan mempertimbangkan domisili tempat tinggalnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah juga mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sekolah negeri yang mengalami kekurangan peserta didik baru.

Asroni menilai bahwa fenomena sekolah negeri yang terus kekurangan murid tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Maka itu, Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra itu meminta agar Pemda melalui dinas pendidikan melakukan pemetaan dan kajian mendalam terhadap penyebab rendahnya minat

masyarakat.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang perlu ditelusuri, mulai dari perubahan demografi penduduk, keberadaan sekolah lain yang lebih diminati, kualitas layanan pendidikan, hingga kondisi fasilitas sekolah.

Dia menambahkan, pihaknya akan segera meminta penjelasan resmi dari pemerintah terkait kondisi sejumlah sekolah yang setiap tahun mengalami kekurangan murid. Selain itu, DPRD juga mendorong adanya langkah-langkah pembenahan yang konkret agar sekolah negeri tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

"Jangan sampai sekolah negeri kehilangan kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir melakukan perbaikan, baik melalui peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi guru, revitalisasi sarana dan prasarana, maupun program promosi sekolah yang lebih baik kepada masyarakat," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, bahwa fenomena kekurangan murid di sekolah dasar negeri harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah

harus dilakukan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sekolah negeri.

"Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu, 15 Juli 2026.

Menurutnya dalam merespon fenomena tersebut tidak cukup cukup dijawab hanya dengan menutup atau menggabungkan sekolah. Sebab, negara memiliki tanggung jawab agar setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

"Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Legislator dari PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa sekolah tanpa murid dinilai menunjukkan beberapa persoalan sekaligus. Di satu wilayah, penyebabnya mungkin penurunan jumlah anak usia sekolah.



Puan Maharani

Sementara di wilayah lain, persoalannya dapat berkaitan dengan perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman, atau menurunnya kepercayaan orang tua terhadap mutu dan karakter layanan sekolah negeri.

Maka itu, dia berpesan agar pemerintah tidak boleh menerapkan satu solusi yang sama untuk seluruh daerah. Yang perlu dilakukan, katanya pemerintah harus segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan.

"Pemerintah perlu segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan, berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk sedikitnya untuk sepuluh tahun ke depan," jelasnya menambahkan.

Selanjutnya dia mengatakan berdasarkan peta tersebut, ini lah yang menjadi dasar dalam melakukan evaluasi eksistensi sekolah. Dia menuturkan evaluasi untuk menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan, atau tetap dipertahankan karena memiliki



fungsi strategis bagi akses pendidikan masyarakat.

“Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, Pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman,” jelasnya.

“Termasuk waktu tempuh yang wajar, kesiapan sekolah penerima, serta jaminan bahwa anak dari keluarga rentan tidak putus sekolah karena lokasi pendidikan menjadi semakin jauh,” katanya menambahkan.

Dan dia pun mengingatkan, keputusan yang diambil tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah murid atau biaya operasional. “Sekolah negeri juga perlu melakukan transformasi agar kembali relevan dengan harapan masyarakat,” tambahnya.

Dan tidak kalah penting yakni bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki kualitas pembelajaran, penguatan karakter dan pendidikan keagamaan, kompetensi guru, keamanan sekolah, hingga komunikasi dengan orang tua.

“Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga,” katanya.

Sebagai penutup, dia memastikan bahwa pihaknya akan mengawal agar penataan sekolah dasar dilakukan sebagai reformasi layanan pendidikan, bukan sekadar pengurangan jumlah satuan pendidikan.

“Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak sekolah yang digabung, melainkan apakah setiap anak tetap memiliki akses yang mudah dan memperoleh pendidikan dasar dengan mutu yang lebih baik,” tutupnya.

Data penting gambarkan perubahan struktur masyarakat

Sementara itu, Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora sekaligus pengamat pendidikan nasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Endro Dwi Hatmanto, S.Pd., M.A., Ph.D., menilai bangku-bangku kosong di sekolah merupakan data penting yang menggambarkan perubahan struktur masyarakat sekaligus tantangan dalam perencanaan pendidikan.

“Fenomena ini jelas bukan sekadar persoalan jumlah siswa. Bangku kosong itu sebenarnya merupakan data kebijakan. Kondisi tersebut dapat menunjukkan perubahan struktur penduduk, ketidaktepatan lokasi sekolah, ketimpangan mutu, perubahan harapan masyarakat, atau kurang baiknya perencanaan pendidikan,” katanya dikutip <https://lldikti5.kemdiktisaintek.go.id/>.

Dia menjelaskan bahwa SPMB pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui empat jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, implementasinya di berbagai daerah masih perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan konsentrasi siswa hanya pada sekolah-sekolah tertentu. Empat jalur tersebut juga menjadi dasar pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027.

Ia mencontohkan, penetapan daya tampung sekolah negeri yang terlalu besar tanpa mempertimbangkan jumlah anak usia sekolah dan keberadaan sekolah swasta dapat menyebabkan penumpukan peserta didik di sejumlah sekolah. Akibatnya, sekolah lain, baik negeri maupun swasta, mengalami kekurangan siswa.

“Pemerataan jangan hanya dimaknai sebagai membagi murid



berdasarkan jarak. Pemerataan juga berarti menata kapasitas sekolah secara rasional, meningkatkan mutu sekolah yang belum diminati, serta memastikan sekolah negeri dan swasta dipandang sebagai satu ekosistem pendidikan,” paparnya.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap regulasi di tingkat pusat. Pemerintah daerah juga perlu memperbaiki pemetaan jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan, perkembangan kawasan permukiman, persebaran sekolah, kapasitas masing-masing satuan pendidikan, serta kebutuhan setiap wilayah.

Pemerintah dinilai telah mengambil langkah awal dengan melakukan pemetaan sekolah yang memiliki jumlah murid sedikit. Namun, data tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah. Kemendikdasmen saat ini juga tengah mendata SDN dengan jumlah murid kurang dari 60 orang sebagai bahan evaluasi nasional.



“Data jumlah kelahiran, anak usia sekolah, perpindahan penduduk, pembangunan kawasan perumahan, daya tampung sekolah, jumlah guru, hingga proyeksi lima sampai sepuluh tahun ke depan harus dibaca secara bersamaan,” terangnya.

Selain pemerintah, dia mendorong setiap sekolah melakukan evaluasi internal secara objektif. Sekolah perlu menilai apakah kualitas pembelajaran telah sesuai dengan harapan masyarakat, apakah peserta didik merasa aman, bagaimana komunikasi dengan orang tua dibangun, serta apakah program yang ditawarkan masih relevan dengan kebutuhan zaman.

Sekolah juga perlu memiliki ciri khas dan program yang benar-benar didukung oleh mutu pembelajaran, bukan sekadar dikemas sebagai strategi promosi. Menurut Endro, kepercayaan masyarakat tumbuh dari pengalaman belajar siswa, kualitas guru, keamanan lingkungan sekolah, serta keterbukaan komunikasi dengan orang tua.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan

lebih bijak dalam memilih sekolah bagi anak. Status favorit maupun popularitas sekolah tidak seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan.

“Pemilihan sekolah jangan hanya didasarkan pada label favorit atau gengsi. Sekolah yang dekat dari rumah, memiliki guru yang peduli, menyediakan lingkungan yang aman, dan sesuai dengan karakter anak justru sering kali menjadi pilihan yang lebih tepat,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan bahwa kebijakan penggabungan atau penutupan sekolah harus menjadi pilihan terakhir. Namun, sebelum mengambil langkah tersebut, pemerintah perlu mengupayakan revitalisasi mutu, redistribusi guru, penguatan sarana dan prasarana, kerja sama antarsekolah, hingga penyediaan transportasi pendidikan apabila akses menjadi kendala.

Menurutnya, penggabungan sekolah juga harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan jarak, kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, kapasitas sekolah tujuan, serta

dampaknya terhadap siswa dan tenaga pendidik. Sebab, tujuan utama kebijakan pendidikan bukan sekadar mempertahankan seluruh bangunan sekolah agar tetap beroperasi. Hal yang lebih penting ialah memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, aman, mudah dijangkau, dan berkeadilan.

“Kita perlu beralih dari perencanaan pendidikan yang bersifat administratif menuju perencanaan berbasis data dan proyeksi demografi. Setiap keputusan harus berangkat dari kebutuhan anak dan karakter wilayah, bukan semata-mata dari pertimbangan efisiensi,” tegasnya.

Dia pun menilai fenomena sekolah sepi peminat harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, demografi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan berbasis data, kebijakan pendidikan diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mampu mengantisipasi kebutuhan pendidikan pada masa mendatang. ■

JOKOWI BUKAN ANCAMAN BAGI PDI-PERJUANGAN

Oleh : **Amir Fiqi**, Penulis merupakan pendidik sekaligus pemerhati sosial dan politik

Pemilihan umum (Pemilu) 2029 menjadi ajang pembuktian bagi Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Sebagai mantan orang nomor satu di republik ini apakah masih memiliki pengaruh yang besar sehingga bisa menjadi penentu kemenangan bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ambisi PSI pada Pemilu 2029 sangat besar, tidak hanya sekadar lolos mendapat tiket masuk dalam parlemen, namun PSI juga memiliki ambisi untuk mengalahkan PDI Perjuangan dengan ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” bukan lagi menjadi “kandang banteng”.

Bahkan, PSI secara terbuka menyatakan “perang” melawan PDI Perjuangan dengan menempatkan Ketua Umumnya, Kaesang Pangarep pada pemilihan legislative (Pileg) di daerah pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi Solo, Boyolali, dan Klaten, sebuah wilayah yang dikenal sebagai basis kuat PDI Perjuangan. Kaesang akan bertarung melawan Puan Maharani yang merupakan putri dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Mengubah Jawa Tengah menjadi “kandang gajah” merupakan ambisi yang sangat ambisius dan sangat sulit untuk diwujudkan. Sebab, PDI Perjuangan memiliki basis massa yang sangat kuat. Partai berlambang kepala banteng ini memiliki pemilih yang loyal, sehingga sangat sulit untuk digeser oleh partai-partai lain, apalagi PSI yang merupakan partai pendatang baru yang tidak

memiliki massa yang kuat hingga ke akar rumput.

PSI mungkin merasa percaya diri dan berbicara besar ingin mengubah Jawa Tengah menjadi “kandang gajah” karena ada sosok besar di belakang mereka, yakni Jokowi. Namun, apakah Jokowi benar-benar masih memiliki pengaruh besar sehingga mampu mendongkrak elektoral untuk partai berlogo gajah itu.

PDIP besar bukan faktor Jokowi

Kelompok pendukung Jokowi kerap menyatakan bahwa Jokowi merupakan sosok yang memiliki jasa besar yang mampu membawa kemenangan bagi PDI Perjuangan. Alasannya yang mereka narasikan adalah Jokowi sudah terbukti mampu memenangkan kontestasi politik dari pemilihan wali kota Surakarta, pemilihan gubernur DKI Jakarta, hingga pemilihan presiden (Pilpres) sebanyak dua kali. Sehingga, Jokowi adalah sosok yang sangat dicintai dan diharapkan oleh masyarakat.

Kemenangan -kemenangan tersebut menurut para pendukung Jokowi mendatangkan berkah bagi PDI Perjuangan itu sendiri. Sehingga, alhasil mampu menghantarkan PDI Perjuangan menjadi pemenang pada Pileg tahun 2019. Namun, yang perlu kita analisis lebih dalam apakah kemenangan itu benar-benar murni karena faktor Jokowi, atau hanya kebutuhan Jokowi saat itu menjadi presiden. Namun, data berbicara jujur untuk menjelaskannya. Meski PDI Perjuangan menjadi



pemenang, namun tidak terjadi lonjakan suara yang signifikan. Suara PDIP hanya bertambah sekitar 1 persen. Pada Pileg 2014, PDI Perjuangan mendapatkan suara 18,96 persen sementara pada Pileg 2019 PDI Perjuangan berubah menjadi 19,33 persen.

Data tersebut bisa menggambarkan bagaimana pengaruh Jokowi terhadap PDI Perjuangan. Jawabannya adalah Jokowi sudah pasti tidak memberikan efek elektoral yang besar bagi PDI Perjuangan. Kondisi ini tidak sejalan dengan posisinya yang saat itu menjabat sebagai presiden yang memiliki kemampuan yang besar untuk mendongkrak elektoral PDI Perjuangan. Namun, faktanya PDI-Perjuangan tidak mendapatkan berkah elektoral dari Jokowi.

Selanjutnya, Pileg 2024 semakin mempertegas bahwa Jokowi benar-benar tidak memberikan pengaruh yang besar bagi PDI Perjuangan. Hal tersebut dapat dijelaskan, meski Jokowi tidak lagi

menjadi bagian dari PDI Perjuangan, partai yang dipimpin Megawati ini tetap berkibar dan dicintai oleh rakyat. Meski suaranya berkurang PDIP tetap menjadi pemenang Pileg dengan perolehan suara sebanyak 17,68 persen. Maka, jika Jokowi memiliki dampak elektoral yang besar, seharusnya suara PDI Perjuangan terjun bebas pada Pileg 2024 lalu. Namun, faktanya suara PDI Perjuangan hanya berkurang sekitar 2 persen. Sehingga, ini semakin mempertegas bahwa pengaruh Jokowi sangat kecil bagi eksistensi partai sebesar PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan akan tetap besar meski tidak ada Jokowi. Sehingga, mantan Gubernur Jakarta ini tidak menjadi ancaman serius bagi eksistensi partai berlambang kepala banteng ini.

Namun, yang perlu dipertanyakan adalah apakah Jokowi masih memiliki pengaruh?. Jika masih memiliki pengaruh mengapa Jokowi gagal membesarkan PSI. Kegagalan tersebut telah

terjawab, sebab pada Pileg 2024 lalu, partai yang dipimpin oleh anaknya Kaesang Pangarep tidak mendapatkan tiket masuk ke gedung parlemen. Padahal, PSI sudah habis-habisan menyatakan sebagai partainya Jokowi. Dan di belakang layar Jokowi secara sembunyi-sembunyi dengan kekuasaan yang dia pegang sebagai presiden tidak juga mampu mendongkrak suara PSI secara signifikan. PSI hanya mendapatkan suara pada Pileg 2024 sebesar 3,64 persen.

Pencitraan Jokowi tak lagi menarik

Jokowi merupakan sosok yang identik dengan pencitraan. Berbekal pencitraan yang menarik sehingga mampu menghantarkan dirinya selalu berhasil memenangkan setiap kontestasi pemilihan umum, yakni dari tingkat wali kota, gubernur hingga menghantarkannya sebagai presiden selama dua periode.

Pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi telah berhasil menghipnotis seluruh rakyat Indonesia. Dengan gaya sederhana, jujur, tidak korupsi, dan rakyat merupakan figur yang sangat diharapkan oleh rakyat. Sebab, pada saat itu para elit pejabat di negeri di mata rakyat dinilai elitis, dan korup.

Bahkan, pencitraan Jokowi sebagai sosok yang pekerja keras dirinya rela masuk ke dalam gorong-gorong. Atraksi ini semakin meyakinkan bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin yang diharapkan untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik.

Pencitraan-pencitraan yang dilakukan Jokowi memang harus dilakukan untuk menarik dukungan rakyat. Sebab di era demokrasi yang liberal ini politik pencitraan ini merupakan sebuah keniscayaan. Siapa yang mampu menampilkan wajah dan gesture yang diharapkan oleh rakyat maka dia akan memenangkan persepsi. Sehingga, siapa yang mampu mengemas dirinya dengan baik, dan mampu mencitrakan diri sebagai figur yang memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh para pemilih maka akan menjadi pemenang di hati rakyat yang akan dikonversikan dalam bilik suara. (Anwar Arifin: 2014).

Ini lah yang berhasil dimainkan oleh Jokowi. Dia adalah aktor yang luar biasa dalam memainkan

drama. Sehingga, dia mampu tampil dengan cantik di panggung politik Indonesia. Keberhasilan dia dalam bermain peran menghantarkan dia menjadi penguasa republik selama 10 tahun.

Namun, setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden pencitraan yang berusaha dia pertahankan tidak lagi menarik. Tidak menariknya Jokowi karena tersandung sejumlah masalah. Dari ambisinya yang besar untuk membangun dinasti, sejumlah kasus korupsi yang menyeret Namanya serta kasus yang tak kunjung tuntas yakni soal dugaan ijazah palsu.

Jokowi di mata publik tidak lagi sebagai sosok yang sederhana, Jokowi tidak lagi dianggap sosok yang bersih dari korupsi, Jokowi tidak lagi dianggap sosok yang merakyat. Jokowi dalam persepsi publik saat ini adalah sosok yang berani menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya, dan membangun politik dinasti guna memperkaya diri dan keluarganya.

Dari sinilah pencitraan yang selama ini dibangun oleh Jokowi telah hancur. Padahal, Jokowi besar karena citranya yang sederhana, tidak korupsi dan merakyat. Sehingga, apa kekuatan yang masih dimiliki Jokowi saat ini. Padahal kekuatan terbesarnya selama ini adalah dengan membangun pencitraan diri.

Kegagalan pencitraan Jokowi telah terbukti. Dalam sejumlah safari politiknya mendapatkan penolakan dari masyarakat. Bahkan, pencitraan yang ingin dibangunnya menjadi tokoh yang diperhitungkan dengan dinobatkan sebagai bangsawan/raja baik di Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) juga dipersoalkan. Dan ini justru menjadi polemik yang semakin membawa dirinya sebagai sosok yang haus akan kekuasaan. Dari sinilah pencitraan Jokowi telah gagal, dan tidak lagi semarik dulu.

PDIP Partai Ideologis

Safari politik Jokowi dinilai tidak efektif untuk mempertahankan pengaruhnya dan membesarkan PSI. Hal ini menjadi sinyal kegagalan PSI untuk mengubah Jawa Tengah dari “kandang banteng” menjadi “kandang gajah”. Sebab, Jawa Tengah adalah basis massa PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng ini memiliki massa yang loyal



karena berangkat dari dukungan ideologis.

PDIP dianggap bagian dari perjuangan ajaran-ajaran Bung Karno. Pengaruh Bung Karno yang masih melekat ini sangat sulit digeser. Massa yang lahir dari ideologis akan setia dan loyal. Sehingga, akan sulit tergantikan, apalagi oleh PSI yang merupakan partai baru yang sosok ketua umumnya, Kaerang Pangarep tidak memiliki kedekatan baik secara ideologis dan emosional dengan basis massa yang ada di akar rumput.

Berbeda dengan PDI Perjuangan, Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri merupakan anak dari Sang Prklamotor, dan memiliki pengalaman politik yang panjang dan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Sehingga, jika dibandingkan dengan Kaesang, ini antara bumi dan langit.

Selama ini, PSI dalam menggalang dukungan tidak berbasis ideologis, tapi melalui jalur pragmatis. Jika massa yang lahir dari pragmatis karena diiming-imingi oleh materi makan tidak akan loyal dan setia. Sehingga, akan mudah berpindah ke lain hati, tergantung seberapa besar

memberikan keuntungan yang besar kepada mereka. Sehingga, perjuangan PSI akan terasa berat karena semuanya harus diwujudkan dalam bentuk materi.

Ditambah lagi, citra PSI sebagai partai baru semakin berat, karena dihadapkan sejumlah persoalan yang melakat pada Jokowi, kasus dugaan ijazah palsu sangat berdampak bagi pengaruh Jokowi. Ditambah lagi Gibran, dengan permasalahan yang sama yakni soal ijazah SMA. Masalah-masalah ini menjadi penghalang bagi PSI.

Sebab, untuk memenangkan pertarungan politik persepsi itu sangat penting. Jika PSI sudah dipersepsi sebagai partai yang bermasalah maka akan sulit mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Sedangkan kepercayaan itu yang nantinya akan dikonversikan dalam bilik suara pada Pemilu.

Sebagai kesimpulan, penulis memiliki pandangan bahwa Jokowi bukanlah ancaman bagi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan akan tetap menjadi besar tanpa adanya Jokowi. Dan Jateng akan tetap menjadi “kandang banteng” bukan berubah menjadi “kandang gajah”. ■

MENYELAMI JIWA SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY



Setelah kekacauan multiversal yang masif dalam *Spider-Man: No Way Home*, Marvel Studios dan Sony Pictures mengambil langkah berani dengan memperkecil skala cerita melalui *Spider-Man: Brand New Day*—yang kerap dihubungkan dengan semangat awal baru atau *Brand New Home* bagi sang tokoh utama. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, film berdurasi 145 menit ini sukses besar secara komersial dengan pendapatan global melampaui dua miliar dolar, sekaligus menjadi salah satu tontonan paling emosional dan membumi bagi sang Manusia Laba-laba.

Cerita bermula empat tahun setelah mantra Doctor Strange menghapus identitas Peter Parker dari ingatan seluruh dunia. Peter kini hidup sepenuhnya seorang diri di New York City tanpa sokongan teknologi canggih ala Stark, bantuan para Avengers, ataupun kehadiran MJ dan Ned yang telah melupakannya. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya secara penuh sebagai pahlawan jalanan yang berjuang demi warga biasa. Namun, tekanan mental yang luar biasa akibat kesendirian ini perlahan memicu perubahan biologis misterius pada tubuhnya, termasuk evolusi kekuatan laba-laba dan kemunculan jaring organik, di tengah ancaman jaringan kriminalitas baru yang jauh lebih berbahaya.

Pendekatan *street-level* yang intim menjadi daya tarik

terbesar dalam film ini. Alih-alih mempertaruhkan nasib alam semesta atau dimensi lain, narasi kembali berfokus pada esensi klasik Spider-Man, yaitu pertarungan jalanan, dilema moral personal, dan perlindungan langsung terhadap masyarakat sipil. Tom Holland memberikan penampilan akting paling matang dan bernyawa sejauh ini. Penampilannya semakin kuat berkat kehadiran karakter baru yang diperankan oleh Sadie Sink serta dinamika intens dengan wajah lama seperti Jon Bernthal sebagai The Punisher dan Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner. Kepiawaian Destin Daniel Cretton dalam meracik sekuens aksi yang dinamis dengan drama psikologis yang menyentuh membuat keseluruhan durasi film terasa begitu padat dan berkesan.

Di balik kemegahan adegan aksinya, film ini menyimpan pesan mendalam mengenai kerapuhan manusia dan proses penyembuhan diri. Salah satu pesan utama yang terkuak adalah bahaya dari isolasi diri dan kebiasaan menanggung beban seorang diri. Setelah peristiwa besar di masa lalu, Peter mengira bahwa menjadi pahlawan mandiri berarti harus mengasingkan diri dari dunia sosial, padahal manusia sekuat apa pun tetap membutuhkan ikatan emosional agar tidak kehilangan arah. Selain itu, film ini menyoroti arti sejati dari merelakan dan memulai lagi dari titik nol, mengajarkan bahwa menerima kenyataan pahit—bahkan ketika orang-orang terkasih harus bahagia tanpa mengenal kita—merupakan bentuk kedewasaan tertinggi. Di atas segalanya, film ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati seorang pahlawan bukanlah jaring laba-laba atau teknologi canggih, melainkan ketulusan hati nurani seorang manusia biasa.

Secara keseluruhan, *Spider-Man: Brand New Day* menjelma lebih dari sekadar tontonan pahlawan super penumpas kejahatan. Ia adalah sebuah refleksi mendalam tentang kehilangan, pencarian jati diri, dan keberanian untuk bangkit kembali dari titik terendah kehidupan, menjadikannya salah satu karya paling berarti dalam lanskap sinema modern. ■

MENJADI GURU:

PILIHAN ATAU TAKDIR?

Pertanyaan klasik mengenai esensi profesi keguruan kembali mengemuka di ruang publik, mengajak kita merenungkan kembali alasan-alasan dasar yang menuntun seseorang untuk melangkah ke ruang kelas. Di tengah dinamika transformasi pendidikan nasional yang bergerak cepat, mulai dari penyesuaian regulasi, tuntutan kompetensi, hingga gelombang digitalisasi pembelajaran, profesi guru sering kali berada di persimpangan jalan yang dilematis. Perdebatan abadi antara apakah menjadi guru merupakan sebuah pilihan sadar yang diperhitungkan secara rasional ataukah sebuah takdir garis hidup yang penuh panggilan jiwa dikupas secara tajam dan memikat oleh Yudis Herdi melalui karyanya yang berjudul *Menjadi Guru: Pilihan atau Takdir?*

Buku ini hadir melampaui batasan bacaan motivasi konvensional. Yudis Herdi berhasil menyajikan sebuah refleksi sosiologis dan psikologis yang memotret realitas kehidupan pendidik secara jujur tanpa balutan romantisasi yang berlebihan. Penulis menyoroti bagaimana idealisme awal seorang guru sering kali diuji oleh beratnya beban administratif, pelaporan teknis, dan tekanan struktural di lapangan. Melalui penuturan yang mengalir, pembaca diajak untuk menyelami pergulatan batin para pendidik, baik di perkotaan yang berhadapan dengan disrupsi teknologi maupun di pelosok

daerah dengan segala keterbatasan infrastrukturnya, yang tetap memilih untuk bertahan demi masa depan generasi bangsa.

Lebih dari sekadar memetakan pergulatan emosional, buku ini juga menyoroti tuntutan adaptasi di era modern. Yudis Herdi secara cermat menguraikan bagaimana seorang pendidik dituntut untuk bertransformasi menjadi pembelajar sepanjang hayat, menguasai model pembelajaran kontemporer, dan memanfaatkan perangkat digital secara bijak tanpa kehilangan esensi interaksi kemanusiaan. Isu krusial mengenai peningkatan kesejahteraan dan perlindungan martabat guru turut disandingkan secara proporsional, menegaskan bahwa peningkatan mutu pengajaran tidak akan berjalan efektif tanpa adanya jaminan keadilan struktural bagi para pendidiknya.

Kelebihan utama karya ini terletak pada pilihan bahasanya yang membumi, lugas, namun kaya akan daya gugah empati. Penulis mampu menerjemahkan rumitnya diskursus kebijakan pendidikan ke dalam narasi naratif yang dekat dengan denyut keseharian guru di lapangan. Setiap bab disusun secara organik, membawa pembaca menelusuri lapisan demi lapisan makna pengabdian tanpa terasa menggurui. Meskipun pembaca dari kalangan umum mungkin memerlukan waktu lebih untuk mencerna beberapa ulasan terkait



kompleksitas administratif, hal tersebut tidak mengurangi substansi dan kedalaman pesan yang ingin disampaikan.

Pada akhirnya, *Menjadi Guru: Pilihan atau Takdir?* merupakan sebuah karya esensial yang layak dibaca oleh siapa saja yang peduli terhadap arah peradaban pendidikan. Buku ini memberikan pengingat yang kuat bahwa terlepas dari bagaimana seseorang memulai perjalanan ini—baik melalui pertimbangan karier yang matang maupun takdir panggilan hidup—pada titik akhir, profesi guru adalah sebuah ikatan moral yang menuntut ketahanan mental, keikhlasan, dan keberanian untuk terus bertumbuh bersama anak didik.

■

KEDAULATAN RUANG KELAS:

MEMULIAKAN MURID SEBAGAI FONDASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN MENDALAM

Arus zaman selalu membawa angin perubahan dalam peta jalan dunia pendidikan global maupun nasional. Di tengah tuntutan era digital yang bergerak cepat, kecerdasan buatan yang merasuki berbagai lini kehidupan, serta kompleksitas sosial yang kian menantang, kebijakan pendidikan di tanah air mengalami metamorfosis yang signifikan. Transformasi ini tidak lagi sekadar berorientasi pada pencapaian angka-angka statistik kelulusan atau penumpukan hafalan kognitif yang

kering, melainkan bergeser menuju esensi yang jauh lebih substansial, yakni pembentukan manusia seutuhnya melalui apa yang kini digaungkan sebagai pembelajaran mendalam. Dalam kerangka kebijakan yang progresif ini, sebuah prinsip fundamental kerap kali menjadi poros penggerak yang menentukan hidup-matinya sebuah reformasi pedagogis, yaitu filosofi memuliakan murid. Prinsip ini bukan sekadar pemanis wacana kebijakan, melainkan jiwa yang menghidupkan seluruh instrumen regulasi, kurikulum, dan praksis di ruang-ruang kelas.

Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah:

“Transformasi pendidikan yang kita dorong bukan sekadar mengganti instrumen teknis, melainkan melakukan reposisi mendasar pada cara kita memandang peserta didik. Kebijakan ini adalah mandat untuk memastikan bahwa sekolah bukan lagi menjadi tempat ‘penyeragaman’, melainkan ruang ‘pemuliaan’—di mana martabat anak menjadi kompas utama dalam setiap pasal regulasi dan kurikulum yang kita susun.”

Kebijakan pendidikan yang berfokus pada pembelajaran mendalam menuntut adanya pergeseran paradigma yang radikal dari model birokratis yang kaku
m e n u j u



Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

ekosistem yang humanis. Selama dekade-dekade sebelumnya, dunia pendidikan kerap terjebak dalam jebakan mekanistik. Sekolah sering kali dianalogikan sebagai pabrik, di mana murid diposisikan sebagai produk mentah yang harus dicetak melalui standar yang seragam, diuji dengan instrumen yang serba kuantitatif, dan dipantau melalui indikator administratif yang mengabaikan keunikan individu. Kebijakan semacam ini, betapapun niat awalnya mulia untuk meratakan mutu, kerap berujung pada alienasi. Anak-anak didik merasa terasing dari proses belajar mereka sendiri, tertekan oleh beban kurikulum yang padat, dan kehilangan kegembiraan esensial dalam menimba pengetahuan. Di sinilah intervensi kebijakan yang berakar pada filosofi memuliakan murid menemukan urgensinya yang paling mendesak.

Memuliakan murid, jika ditelusuri melalui akar filosofis kebangsaan kita, menemukan resonansi yang sangat kuat dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pengajaran yang berpusat pada anak sering kali disalahpahami sebagai bentuk pembiaran atau hilangnya otoritas pendidik. Padahal, esensi yang sesungguhnya adalah menempatkan keselamatan dan kebahagiaan jiwa anak sebagai hukum tertinggi dalam pendidikan. Ketika sebuah kebijakan pendidikan dirumuskan dengan semangat memuliakan murid, maka setiap pasal, pedoman kurikulum, dan kerangka asesmen dirancang bukan untuk mengekang atau menilai anak dari satu sudut pandang yang sempit, melainkan untuk merawat potensi unik yang dibawa setiap individu sejak lahir. Kebijakan yang mendukung pembelajaran mendalam mengakui bahwa setiap anak adalah subjek yang aktif, merdeka, dan bermartabat, bukan sekadar objek pasif penerima transfer informasi dari guru.

Dukungan terhadap kebijakan pembelajaran mendalam yang berlandaskan pemuliaan murid ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat tantangan psikologis generasi masa kini. Beban informasi yang masif, tekanan sosial, dan standar standar artifisial yang diciptakan oleh media sosial menuntut sekolah untuk menjadi tempat perlindungan yang aman secara psikologis.

Terkait pentingnya fondasi neurosains dalam ekosistem belajar, Dr. Itje Chodidjah, pakar dan praktisi pendidikan, menjelaskan:

“Secara neurosains, otak manusia tidak dirancang untuk belajar dalam kondisi penuh tekanan atau ketakutan. Ketika kita memuliakan murid melalui penciptaan ruang aman secara psikologis, kita sesungguhnya sedang membuka gerbang bagi fungsi kognitif tingkat tinggi. Lingkungan yang bebas dari rasa takut adalah nutrisi terbaik bagi tumbuhnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang kompleks.”

Kebijakan yang mendorong suasana belajar yang penuh kesadaran, kebermaknaan, dan kegembiraan tidak akan pernah terwujud apabila relasi antara pendidik dan peserta didik masih dilandasi oleh dominasi kuasa yang opresif. Pemuliaan murid menuntut adanya dekonstruksi terhadap relasi kuasa yang feodal di dalam kelas. Guru bukan lagi penguasa tunggal kebenaran yang memegang palu penghakiman, melainkan fasilitator, mitra dialog, dan penjaga gawang moral yang mendampingi proses pencarian pengetahuan anak dengan penuh empati dan rasa hormat.

Dalam konteks praksis kebijakan, memuliakan murid diterjemahkan melalui kebebasan yang bertanggung jawab yang diberikan kepada para guru dan sekolah untuk merancang pengalaman belajar yang kontekstual. Transformasi nyata di ruang kelas ini dirasakan langsung oleh Muhammad Nur Rizal, Ph.D., inisiator Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) sekaligus praktisi pendidikan:

“Dulu, saya merasa sukses jika seluruh murid hafal materi dan mampu menjawab soal ujian dengan seragam. Namun, setelah beralih ke pendekatan pembelajaran mendalam, saya sadar bahwa keberhasilan sebenarnya justru terjadi saat murid berani mengajukan pertanyaan ‘mengapa’ dan merasa aman untuk berbuat salah. Kelas bukan lagi pabrik untuk mencetak robot, melainkan laboratorium kemanusiaan tempat mereka belajar menjadi manusia merdeka.”

Kebijakan kurikulum yang fleksibel

memberikan ruang bagi sekolah untuk membaca realitas lokal, memahami latar belakang sosio-kultural peserta didik, dan menyesuaikan materi pembelajaran agar relevan dengan kehidupan nyata mereka. Ketika seorang guru mendengarkan aspirasi siswanya, mengakui pendapat mereka dalam diskusi kelas, dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menentukan arah eksplorasi proyek belajar mereka, pada saat itulah kebijakan negara turun ke bumi dalam wujud yang paling nyata. Pemuliaan murid mengubah dinamika kelas dari ruang indoktrinasi yang membosankan menjadi ruang perjumpaan intelektual yang hidup, dinamis, dan penuh gairah penemuan.

Lebih jauh lagi, filosofi memuliakan murid memiliki korelasi langsung dengan efektivitas kognitif dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Sains kognitif modern telah membuktikan bahwa otak manusia tidak didesain untuk menyerap informasi secara optimal dalam kondisi penuh ketakutan, kecemasan, atau tekanan yang berlebihan. Ketika anak-

anak merasa direndahkan, diabaikan, atau dipermalukan karena kesalahan belajar yang mereka lakukan, sistem saraf mereka akan masuk ke dalam mode bertahan hidup, yang secara otomatis menutup akses terhadap pemikiran tingkat tinggi, kreativitas, dan penalaran kritis. Sebaliknya, ketika sebuah kebijakan pendidikan berhasil menciptakan iklim di mana

kesalahan dipandang sebagai bagian normal dari proses belajar dan setiap suara dihargai, rasa aman psikologis tercipta. Rasa aman inilah yang menjadi tanah subur bagi tumbuhnya kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kolaboratif yang menjadi inti dari pembelajaran mendalam.

Kebijakan yang mendukung pemuliaan murid juga menuntut perubahan mendasar dalam cara kita memandang asesmen atau penilaian. Selama bertahun-tahun, sistem evaluasi pendidikan kita terjebak dalam tirani ujian standar yang mereduksi kompleksitas kecerdasan manusia menjadi sekadar angka-angka di atas kertas. Kebijakan pembelajaran mendalam menantang kemapanan ini dengan mendorong asesmen yang bersifat formatif, autentik, dan menghargai proses perkembangan unik setiap anak. Memuliakan murid dalam konteks asesmen berarti menolak untuk melabeli seorang anak sebagai “bodoh” atau “gagal” hanya karena mereka tidak unggul dalam satu jenis kecerdasan tertentu. Kebijakan asesmen yang berkeadilan mengakui spektrum kecerdasan yang luas, menghargai usaha keras, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat, alih-alih mematikan motivasi melalui kompetisi yang tidak sehat.

Tentu saja, perjalanan menginstitusionalisasikan filosofi memuliakan murid melalui kebijakan publik bukanlah tanpa tantangan. Selalu ada resistensi dari mereka yang merindukan masa lalu, di mana keteraturan semu, keseragaman birokratis, dan kepatuhan buta dianggap sebagai puncak kedisiplinan. Sebagian pihak mungkin berargumen bahwa pendekatan yang memuliakan murid akan melemahkan otoritas guru atau melahirkan generasi yang kurang tangguh. Namun, argumen semacam ini lahir dari pemahaman yang keliru tentang makna pemuliaan itu sendiri. Memuliakan murid tidak berarti memanjakan mereka tanpa batasan atau meniadakan aturan. Justru, di dalam kerangka pembelajaran mendalam, penghargaan terhadap martabat anak berjalan seiring dengan penanaman tanggung jawab sosial, kedisiplinan



Dr. Itje Chodidjah

diri, dan etika berelasi yang kuat. Disiplin yang lahir dari kesadaran dan rasa hormat jauh lebih kokoh dan bertahan lama dibandingkan disiplin yang dipaksakan melalui ancaman sanksi dan ketakutan.

Peran negara melalui kebijakan pendidikan nasional memegang tanggung jawab besar untuk terus merawat dan memperkuat ekosistem yang berpihak pada tumbuh kembang anak ini. Kebijakan pelatihan guru, misalnya, harus direformasi secara total agar para pendidik tidak hanya dibekali dengan kompetensi teknis pedagogis semata, tetapi juga disentuh hatinya untuk memiliki kepekaan empati, kecerdasan emosional, dan komitmen etis terhadap martabat setiap peserta didik. Guru-guru yang dimuliakan oleh sistem melalui dukungan kesejahteraan, apresiasi profesional, dan kebebasan berkarya akan lebih mudah untuk menularkan energi positif tersebut kepada murid-murid di kelas mereka. Hubungan timbal balik antara kebijakan makro yang berpihak pada kemanusiaan pendidik dan peserta didik ini akan melahirkan gelombang transformasi budaya sekolah yang berkelanjutan.

Apabila kita menengok masa depan bangsa, investasi terbesar bukanlah pada beton-beton gedung sekolah yang megah atau digitalisasi perangkat keras semata, melainkan pada kualitas interaksi manusiawi yang terjadi di dalam ruang-ruang kelas setiap hari. Pandangan ini turut disuarakan oleh Dra. Ratna Dewi, M.Si., perwakilan Dewan Orang Tua Murid Nasional:

“Bagi kami sebagai orang tua, kebijakan ini memberikan harapan baru. Kami tidak ingin anak-anak hanya menjadi penonton di masa depan. Kami berharap sekolah menjadi rumah kedua di mana karakter mereka dijaga, rasa ingin tahu mereka dirawat, dan nilai-nilai kemanusiaan mereka dimuliakan sebagai pondasi untuk menghadapi dunia yang kian tidak menentu.”

Kebijakan pendidikan yang menempatkan pembelajaran mendalam sebagai strategi utama pembangunan sumber daya manusia hanya akan mencapai sasaran tertingginya apabila ia didasari oleh ketulusan moral untuk memuliakan murid. Di tangan anak-anak yang merasa dihargai, didengarkan, dan diakui eksistensinya lah masa

depan peradaban ini diletakkan. Mereka tidak akan tumbuh menjadi warga negara yang penurut tanpa nalar, melainkan individu-individu merdeka yang kritis, kreatif, berempati tinggi, dan siap membawa bangsa ini melangkah dengan penuh percaya diri di kancah global.

Oleh karena itu, dukungan konsisten terhadap kebijakan pendidikan yang berporos pada pemuliaan murid dan pembelajaran mendalam merupakan sebuah keharusan sejarah yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Setiap pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan di tingkat pusat, kepala satuan pendidikan, para guru di garis depan, hingga orang tua dan masyarakat luas, harus bergandengan tangan mengawal arah transformasi ini agar tidak tergelincir kembali ke dalam rutinitas birokratis yang mekanistik. Ruang kelas harus dikembalikan pada hakikat aslinya, yakni sebagai ruang suci tempat persemaian akal budi, kasih sayang, dan kemerdekaan berpikir. Dengan menempatkan filosofi memuliakan murid sebagai kompas moral dan operasional dalam setiap kebijakan pembelajaran

mendalam, kita sedang menanam benih-benih peradaban yang unggul, bermartabat, dan humanis untuk generasi masa depan Indonesia. ■



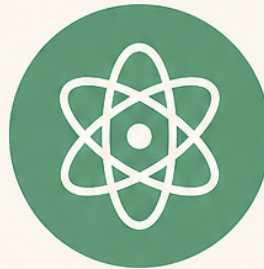
Muhammad Nur Riza

Prinsip Pembelajaran Mendalam



Berkesadaran

Peserta didik aktif dalam pembelajaran serta mampu meregulasi diri



Bermakna

Peserta didik menerapkan pengetahuan secara kontekstual



Menggemirakan

Suasana belajar positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi



Empat pilar menurut Ki Hajar Dewantara



Olah Pikir (Intelektual)

Mengasah akal dan nalar kritis



Olah Hati (Etikal)

Menanamkan nilai dan budi pekerti



Olah Rasa (Aestetik)

Mengembangkan kepekaan estetika dan empati



Olah Raga (Kinestetik)

Menjaga kesehatan fisik dan ketangguhan



LANGKAH NYATA GURU SD DI SEPAKU, PENAJAM PASER UTARA KUATKAN FONDASI LITERASI DAN NUMERASI PENUH EMPATI

Setiap anak terlahir unik dan cerdas. Masing-masing dikaruniai bekal kecerdasan yang berbeda-beda. Termasuk kecerdasan literasi dan numerasi, yang memerlukan pendampingan khusus untuk memupuk dan terus mengasahnya.

SEPAKU, PENAJAM PASER UTARA — Jika fondasi literasi dan numerasi telah kokoh, maka anak-anak akan lebih mudah dalam mengarungi proses belajar selanjutnya. Mereka juga akan semakin mantap menyongsong masa depan lantaran terlatih untuk berpikir kritis dan logis. Empati dan kejelikan guru dalam mengamati siswa-siswinya menjadi kunci awal untuk menentukan

langkah pembelajaran selanjutnya. Guru-guru inilah, yang senantiasa menjaga denyut pembelajaran literasi dan numerasi bagi anak-anak negeri.

Seperti keseharian di SD Negeri 019 di Jalan Pelawan, Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Guru-guru di sana telah mempraktikkan bagaimana



membumikan literasi dan numerasi. Dengan dukungan dari manajemen sekolah serta pendampingan mitra INOVASI, mereka mengajarkan literasi dan numerasi seperti membimbing anak-anak menapaki tangga kemampuan. Tangga yang dipijak setahap demi setahap sesuai dengan titik tumbuhnya masing-masing.

Salah seorang guru kelas di SDN 019 Sepaku, Lilis Sugianti mengatakan, sebelumnya pengajaran literasi dan numerasi di kelas tinggi seringkali terjebak dalam asumsi ragam tunggal. Kerap kali, guru beranggapan bahwa seluruh murid kelas IV atau kelas VI otomatis sudah lancar membaca teks panjang. Mereka mengira anak-anak kelas IV, V dan VI telah mahir mengoperasikan perhitungan Matematika tingkat lanjut.

Anggapan itu tentu saja mesti dicermati lagi. Karenanya, butuh kejelian serta empati bagi guru untuk mengamati satu persatu murid. Memang, butuh effort lebih para pendidik untuk menyibak tirai ketimpangan fondasi dasar yang kerap

tersembunyi.

Pada kenyataannya, masih ada murid yang belum tuntas dalam hal membaca dan menulis. Si Anak tersebut belum dapat menguasai pengenalan suku kata, misalnya. Ada pula yang masih tertatih memahami pola bilangan dasar. Imbasnya, anak yang tertinggal menjadi jenuh dan kehilangan minat, sementara anak yang sudah mahir merasa bosan dan kurang tertantang.

“Dulu, pemahaman kita kalau anak sudah kelas empat itu pasti sudah lancar membaca. Padahal ternyata tidak semuanya sama. Kalau dulu yang tidak paham jadi sibuk sendiri atau bermain saat mengerjakan tugas, kita jadi lebih sulit mengajar. Tapi sekarang, kalau anak memang baru bisa di tingkat kata, ya kami kasih soalnya di kata. Begitu juga di numerasi, walau sudah kelas empat kalau posisinya masih di dasar, kami dampingi dari dasar,” ungkap Lilis bijak.

Pendekatan ini, lanjut Lilis, diawali dengan asesmen awal pada murid untuk memetakan kemampuan literasi

dan numerasinya. Dengan begitu, guru tidak lagi menduga-duga kemampuan murid. Semua menjadi lebih terukur dalam sebuah data. Data inilah yang menjadi peta, penunjuk jalan bagi guru dalam mengelompokkan murid secara dinamis dan fleksibel.

“Setelah kami dapat data, barulah kami merancang pembelajaran. Dan lagi kami merancang secara berdiferensiasi. Jadi anak itu tidak sama. Memang di awal saat kami merancang itu sama, tapi nanti saat sudah mulai penugasan, itu sudah kami kelompokkan. Nanti saat pendampingan juga berbeda antara anak yang sudah pandai, yang rata-rata, sampai yang rendah, itu juga kami bedakan. Mulai dari tugas, cara pendampingan, ya juga dibedakan. Kalau memang anak itu butuh bimbingan ekstra, kami kasih di kelas tambahan,” imbuh Lilis.

Langkah yang ditempuh Lilis itu membawa perubahan nyata pada interaksi dan tata kelola di ruang kelas. Guru bergerak aktif memfasilitasi kebutuhan yang beragam.



“Saya buat di kelas itu tiga kelompok, mulai dari Matematika, Bahasa Indonesia. Saya buat selalu tiga karena itu yang dasarnya untuk pembelajaran. Jadi anak yang memang butuh bimbingan, itu dekat dengan saya. Nah, terus anak yang memang bisa dilepas sedikit tapi tetap harus dipantau, itu duduknya agak jauh. Nah, kalau anak yang memang sudah bisa dilepas, itu dia biasanya duduk paling jauh dari saya. Bukan berarti mereka jauh terus kita lepas, tidak. Tetap kita harus berkeliling,” tutur Lilis.

Tak bisa dipungkiri, dukungan penuh dari manajemen sekolah turut memperkuat keberlanjutan praktik ini. Kepala SD Negeri 019 Sepaku, Suleiman Effendi menegaskan bahwa

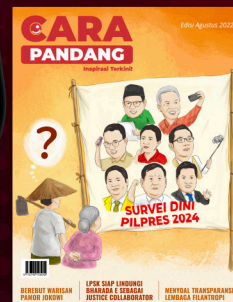
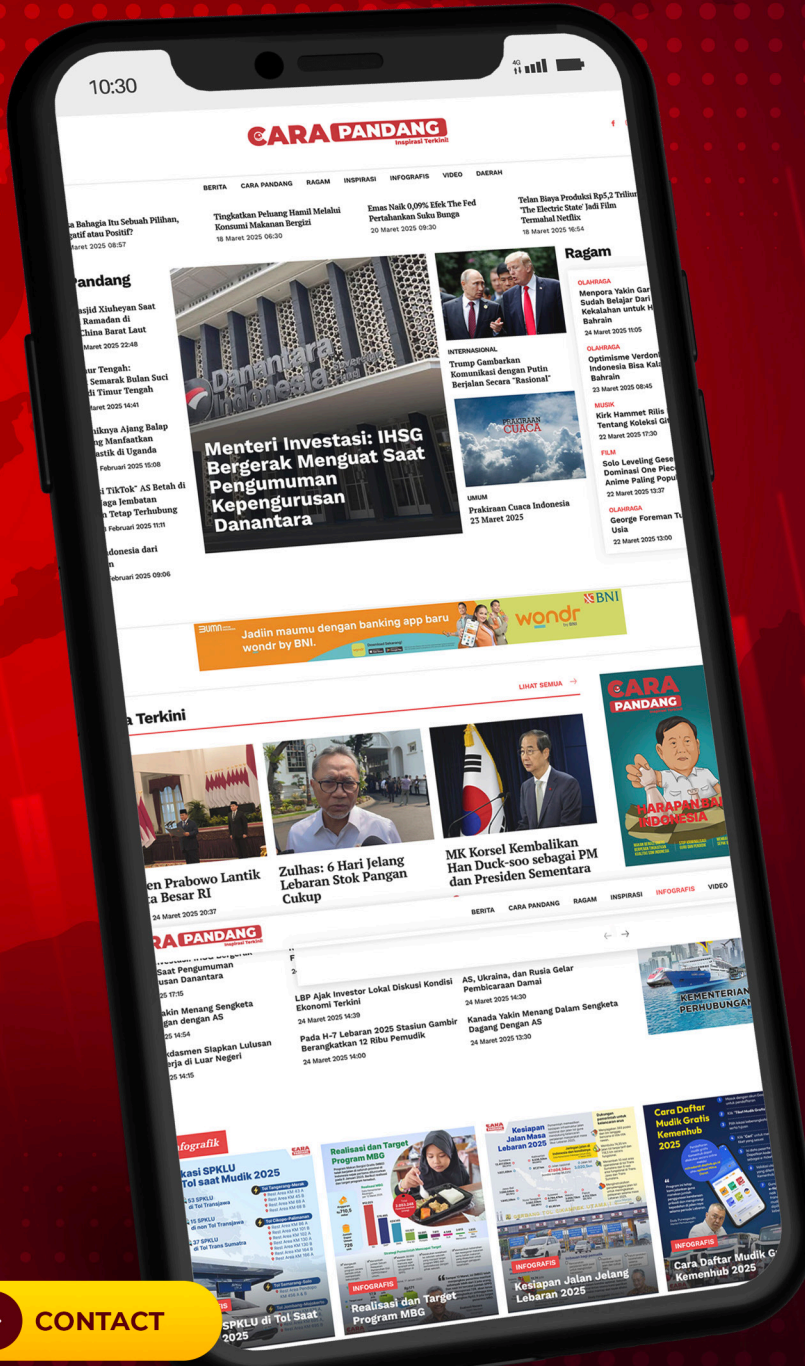
penguasaan literasi dan numerasi dasar yang tepat adalah fondasi utama bagi seluruh proses belajar selanjutnya.

“Perubahan terbesar yang kami rasakan adalah terciptanya iklim sekolah yang benar-benar berpihak pada murid. Ketika guru-guru kami mau menyesuaikan tingkat pengajaran literasi dan numerasi dengan kemampuan riil anak, suasana belajar menjadi jauh lebih hidup. Kami di sekolah berkomitmen penuh untuk terus menyediakan ruang kolaborasi dan fasilitas pendukungnya,” tegas Suleiman Effendi.

Ketika fondasi literasi dan numerasi dibangun dengan penuh empati, setiap anak di Sepaku kini memiliki pijakan yang kokoh untuk menatap masa

depan.

Seperti yang kita ketahui, kemampuan literasi dan numerasi merupakan fondasi pokok dalam mengolah informasi. Baik informasi berupa teks, angka serta simbol-simbol Matematika yang semuanya berguna untuk memecahkan masalah sehari-hari. Khusus literasi, ini berfokus pada pemahaman dan pengolahan teks yang nantinya akan melatih kemampuan anak untuk berpikir kritis. Sementara itu, numerasi terkait dengan penggunaan logika, angka-angka serta analisa data yang nyata. Numerasi penting untuk mengajarkan generasi kita agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang logis. ADV



→ CONTACT

0812 1037 9124

carapandangcom@gmail.com

WWW.CARAPANDANG.COM